



DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

20
21



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN
STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN

KATA PENGANTAR



Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dan anggaran yang telah dilaksanakan unit kerja Eselon II selama satu tahun. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja terhadap publik dan para *stakeholders* terkait dalam mendukung terciptanya *good and clean governance* di lingkungan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.

Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2021 disusun dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Laporan kinerja ini merupakan gambaran sejumlah ketercapaian kinerja berdasarkan target dan arah kebijakan yang tercantum pada Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2020-2024.

Kami berharap melalui Laporan kinerja ini dapat menyajikan informasi yang komprehensif mengenai capaian kinerja dari sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah menjadi komitmen dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2021.

Akhir kata, tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2021. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat bagi para pemangku kepentingan terkait serta dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam menyusun kebijakan pada tahun berikutnya demi perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

Jakarta, Januari 2022

Agus Sulaeman

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai salah satu unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mempunyai tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024 yaitu: 1) Meningkatkan efektivitas sistem dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, termasuk kebijakan bantuan pembiayaan perumahan; 2) Meningkatkan kualitas perencanaan (termasuk program jangka menengah, tahunan dan identifikasi proyek KPBU) dan evaluasi pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berbasis data base; 3) Meningkatkan kepatuhan intern, manajemen risiko dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal; 4) Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pembiayaan infrastruktur pekerjaan dan perumahan; serta 5) Meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan dan perumahan.

Dalam suatu instansi pemerintah, laporan kinerja merupakan sebuah laporan yang didalamnya mencakup ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian kinerja yang diperoleh diukur dengan mengacu pada metode perhitungan yang terdapat pada Renstra Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Sehingga di dalam dokumen perjanjian kinerja memuat sasaran program/kegiatan, indikator kinerja, target dan jumlah total anggaran yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan target kinerja tahunan tersebut. Dan perjanjian kinerja tersebut ditandatangani oleh atasan pimpinan unit kerja dan pimpinan unit kerja, dalam hal ini berarti perjanjian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Direktur Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 dan menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja Direktorat Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan ini berisi ikhtisar capaian kinerja tahun 2021, capaian kinerja tahun berjalan serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan program dimana Direktorat Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

Dengan penyusunan Laporan Kinerja ini, capaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mampu mencapai 100,80% dari target dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2021.

Adapun Sasaran Kegiatan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan (Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2021)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline 2020	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
	Meningkatnya pelaksanaan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan umum dan perumahan	Tingkat pencapaian pelaksanaan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	98,13%	100%

Pagu awal anggaran Tahun 2021 adalah sebesar Rp 21.127.189.000.000. Pada Bulan Februari Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran menjadi Rp 14.080.661.000. Kemudian, pada Bulan April terjadi penambahan pagu anggaran sebesar Rp 11.992.620.000 yang disebabkan adanya percepatan penarikan PHLN NAHP sehingga total pagu anggaran menjadi Rp 26.073.281.000.

Pada Bulan Juli terjadi perubahan pagu anggaran menjadi Rp 34.500.917.000. Hal ini terjadi karena *refocussing* dan realokasi serta percepatan penarikan PHLN NAHP tahap 2 yang sebelumnya juga telah dilakukan di awal tahun yakni pada Bulan Februari dan April. Disamping itu, Pada Bulan Agustus terdapat arahan untuk melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Hal tersebut mempengaruhi total pagu anggaran menjadi Rp 34.493.044.000.

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 27.878.008.000 atau sebesar 85,14% dari pagu anggaran Tahun 2021 yang telah direvisi. Dalam pencapaian kinerja, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan memiliki 1 (satu) sasaran kegiatan yaitu Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan seperti yang tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Capaian Kinerja Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 (Sumber: *Cascading* Capaian Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2021)

NO	SASARAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
	Tingkat pencapaian pelaksanaan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	%	100%	100,80%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	I
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR GAMBAR.....	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI.....	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	4
1.4 ISU STRATEGIS	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS.....	7
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	14
2.3 METODE PENGUKURAN.....	15
2.4 TARGET TAHUN 2021 MENURUT RENSTRA.....	16
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	22
3.1 SUMBER DAYA MANUSIA	22
3.2 SARANA DAN PRASARANA.....	34
3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)	37
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA.....	38
4.1. CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN TAHUN 2021	38
4.2. REALISASI ANGGARAN.....	48
4.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA.....	60
4.4. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUATAN TERHADAP LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN	65
BAB V PENUTUP	68
5.1 KESIMPULAN.....	68
5.2 REKOMENDASI.....	69
LAMPIRAN	70
PERJANJIAN KINERJA	70
RENCANA KERJA.....	74
POHON KINERJA.....	84
BERITA ACARA KESEPAKATAN.....	90
DIPA.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan (Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2021)-----	ii
Tabel 2. Capaian Kinerja Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 (Sumber: Cascading Capaian Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2021) -----	iii
Tabel 2. 1 Sasaran Kegiatan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020-2024 -----	10
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan (Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2021)-----	14
Tabel 2. 3 Metode Perhitungan -----	16
Tabel 2. 4 Perubahan DIPA -----	18
Tabel 2. 5 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2021 (Sumber data: Rencana Strategis Direktorat Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2020-2024) -----	19
Tabel 3. 1 Rekapitulasi Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2021 -----	24
Tabel 3. 2 Rekapitulasi PNS berdasarkan Jabatan -----	24
Tabel 3. 3 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan Jabatan Fungsional-----	25
Tabel 3. 4 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jabatan dan Gender -----	25
Tabel 3. 5 Rekapitulasi SDM Berdasarkan Pendidikan-----	26
Tabel 3. 6 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan dan Pendidikan -----	26
Tabel 3. 7 Rekapitulasi SDM berdasarkan Gender -----	27
Tabel 3. 8 Rekapitulasi PNS berdasarkan Golongan dan Gender -----	27
Tabel 3. 9 Rekapitulasi SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia -----	28
Tabel 3. 10 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jabatan Fungsional-----	29
Tabel 3. 11 Pegawai di Lingkungan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan (Sumber Data: Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan) -----	30

Tabel 3. 12 Jumlah Sarana dan Prasarana	36
Tabel 3. 13 Perubahan DIPA	37
Tabel 4. 1 Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan.....	40
Tabel 4. 2 Cascading Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2021	41
Tabel 4. 3 Hasil Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	46
Tabel 4. 4 Hasil Survey Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	48
Tabel 4. 5 Realisasi Anggaran Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2021	49
Tabel 4. 6 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	60
Tabel 4. 7 Perbandingan Realisasi Anggaran Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020 dan Tahun 2021	61
Tabel 4. 8 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dengan Target Renstra 2020-2024	64
Tabel 4. 9 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Evaluatan Terhadap Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020	65
Tabel 4. 10 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Evaluatan Terhadap Implementasi Sakip Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020.....	66

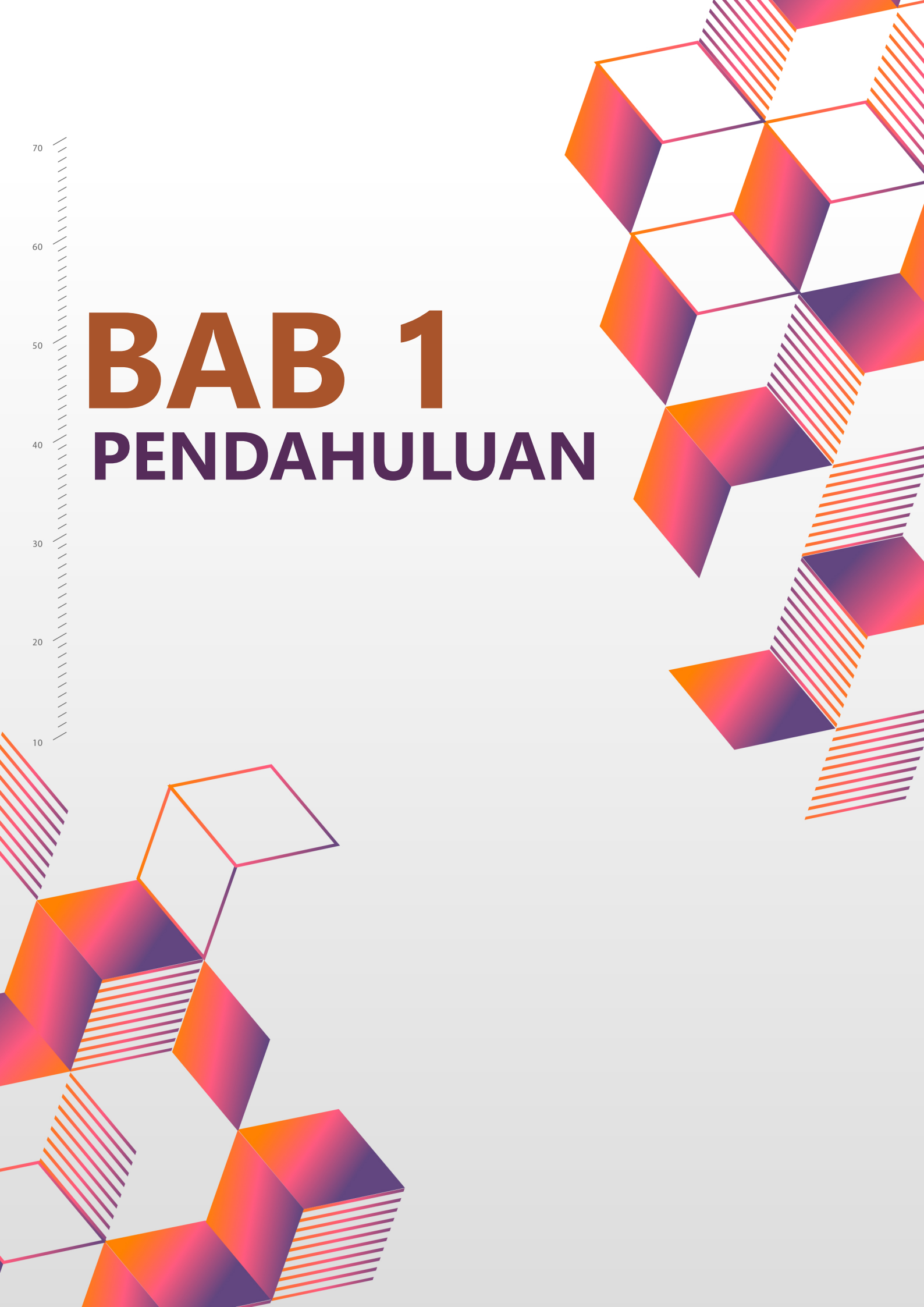
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan (Sumber: Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020- 2024 -----	5
Gambar 3. 1 Persentase SDM Tahun 2021 -----	24
Gambar 3. 2 Persentase PNS Berdasarkan Jabatan-----	24
Gambar 3. 3 Persentase PNS Berdasarkan Golongan Jabatan-----	25
Gambar 3. 4 Persentase PNS Berdasarkan Jabatan dan Gender -----	25
Gambar 3. 5 Persentase SDM Berdasarkan Pendidikan-----	26
Gambar 3. 6 Persentase PNS Berdasarkan Golongan dan Pendidikan -----	26
Gambar 3. 7 Persentase SDM Berdasarkan Gender-----	27
Gambar 3. 8 Persentase PNS Berdasarkan Golongan dan Gender -----	27
Gambar 3. 9 Persentase SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia -----	28
Gambar 3. 10 Persentase PNS Berdasarkan Jabatan Fungsional-----	29
Gambar 3. 11 Ruang/Kantor-----	36



BAB 1

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang menyebutkan bahwa Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/ Lembaga menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, maka Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan diwajibkan untuk menyusun rencana strategis, perjanjian kinerja, rencana aksi, laporan monev, dan laporan kinerja yang merupakan bagian dari komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai target kinerja tahun 2019, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020–2024.

Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan memberikan informasi mengenai pencapaian misi sebagai upaya terukur mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi dan efektifitas pemanfaatan dana publik terhadap jasa atau produk prima yang dihasilkan (*excellency*) dan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali (*equity*).

Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan salah satu unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR wajib melaporkan progres pelaksanaan kinerja pada setiap akhir tahun. Laporan kinerja tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Pasal 25 Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dibantu oleh 6 (enam) unit kerja Eselon II, diantaranya adalah Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan. Adapun tugas dan fungsi tersebut antara lain yakni:

1.2.1 TUGAS

Tugas Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

1.2.2 FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- b. Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- c. Pelaksana kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- d. Koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dengan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- e. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- g. Pengelolaan data dan informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- h. Pelaksanaan kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal;
- i. Pembinaan jabatan fungsional di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi serta rencana strategis Tahun 2020-2024, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dibantu oleh 3 (tiga) unit sub direktorat, yaitu:

- a. Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur;
- b. Sub Direktorat Kepatuhan Intern;
- c. Sub Bagian Tata Usaha; dan

1.3.1. SUB DIREKTORAT PENGELOLAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur terdiri atas kelompok jabatan fungsional (JF), antara lain:

1. JF Analis Kebijakan;
2. JF Analis Anggaran;
3. JF Perencana;
4. JF Statistisi;
5. JF Pranata Komputer; dan
6. JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan

1.3.2. SUB DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN

Sub Direktorat Kepatuhan Intern mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko, dan pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko atas kecurangan dan pencapaian target program dan kegiatan, dan pelaksanaan konsolidasi atas penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta penyusunan laporan rutin, laporan pimpinan, laporan kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.

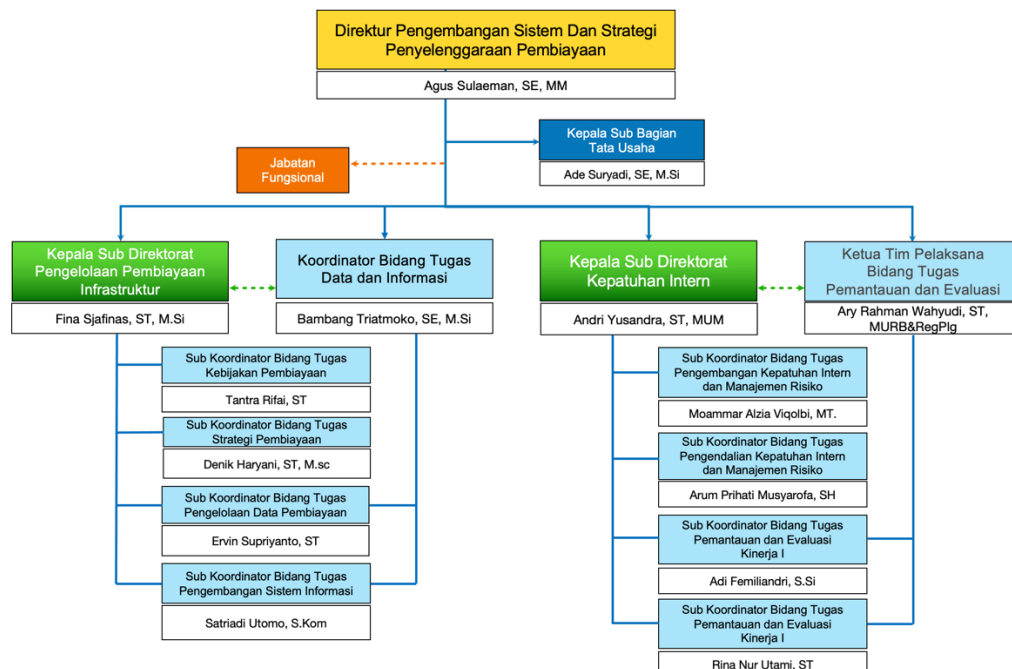
Sub Direktorat Kepatuhan Intern terdiri atas kelompok jabatan fungsional (JF), antara lain:

1. JF Analis Kebijakan;
2. JF Pranata Komputer; dan
3. JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;

1.3.3. SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Sub Bagian Tata Usaha hanya terdiri atas Jabatan Fungsional (JF) Arsiparis.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan (Sumber: Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020- 2024

1.4 ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis terkait potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah:

1. Belum banyak rencana proyek Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang akan dikerjakan melalui skema KPBU;
2. Perencanaan tahunan dan lima tahunan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan data *supply* dan *demand*;
3. Belum adanya kriteria pemilihan proyek KPBU untuk Proyek Strategis Nasional (PSN);
4. Perencanaan tahunan dan lima tahunan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan data *supply* dan *demand*;
5. Keterbatasan dukungan fiskal Pemerintah terhadap proyek KPBU *Unsolicited*;
6. Banyaknya proyek yang belum siap untuk diusulkan dibiayai dengan skema KPBU;
7. Terbatasnya sumber pembiayaan untuk perencanaan dan penyediaan KPBU;
8. Banyak *stakeholder* yang belum memahami skema KPBU;
9. Proses penyiapan proyek KPBU cenderung membutuhkan waktu yang lama;
10. Terbatasnya skema pembiayaan KPBU yang diterapkan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;
11. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/ pemangku kepentingan khususnya dalam proses pengadaan lahan proyek KPBU;
12. Rendahnya minat Badan Usaha terhadap KPBU sektor SDA dan Perumahan karena kurang menguntungkan secara finansial;
13. Belum terdapat unit dalam Kementerian PUPR yang berfungsi sebagai *Paying Agent* dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama;
14. Adanya keterbatasan anggaran Kementerian PUPR untuk pembiayaan KPBU- *Availability Payment*;
15. Belum optimalnya pengintegrasian data dan informasi terkait progress proyek KPBU pada *tools Management Information System (MIS)*;
16. Belum optimalnya pelaksanaan Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan Serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan (ARSAP4);
17. Perlu adanya peningkatan kedalaman analisis terhadap data dan informasi terkait pasar perumahan dan hasil-hasil kajian perumahan; dan
18. Kegiatan percepatan pelaksanaan *National Affordable Housing Program (NAHP)*.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA





2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Infrastruktur merupakan sebuah strategi dalam mewujudkan konektivitas ruang yang berdampak pada kemudahan akses terhadap sumber daya sehingga perekonomian nasional dan daya saing bangsa dalam persaingan global dapat meningkat. Berdasarkan *The Global Competitiveness Report 2018-2019*, Pada Tahun 2019, Indonesia berada di peringkat 50, turun 5 peringkat dari tahun sebelumnya (terdapat perubahan Indikator setelah tahun 2017). Indonesia berada di peringkat ke-4 di ASEAN setelah Singapura (1), Malaysia (27), dan Thailand (40). Indonesia mengalami penurunan peringkat dari Tahun 2018 ke Tahun 2019 (penurunan skor pada pilar 3 (*ICT Adoption*) dan pilar 5 (*Health*). Kondisi ini menjadi indikasi bahwa Pemerintah perlu memberi perhatian lebih kepada sektor infrastruktur karena sektor tersebut saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebagai institusi yang mengemban amanah penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Indonesia pada dasarnya telah melakukan strategi dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Adapun dalam menyukseskan rencana penyelenggaraan infrastruktur di periode RPJMN IV, Kementerian PUPR telah menetapkan Visium 2030 yang memproyeksikan bahwa kebutuhan investasi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur selama Tahun 2020- 2024 adalah sebanyak Rp 2.058 Triliun. Jumlah kebutuhan tersebut tidak dapat didanai seluruhnya oleh anggaran Pemerintah karena keterbatasan akan APBN 2020-2024 yang jumlahnya diperkirakan hanya 30% dari total kebutuhan anggaran atau sebesar Rp 623 Triliun.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan sebuah kebutuhan mendesak, oleh karenanya Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif untuk memenuhi *gap funding* yang ada. Salah satu strategi yang telah dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat. Melalui peraturan tersebut, Pemerintah melakukan penguatan dan revitalisasi organisasi di lingkungan Kementerian PUPR serta membentuk Unit Organisasi yang secara khusus menangani bidang pembiayaan infrastruktur, yaitu Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan, khususnya pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), termasuk menjadi koordinator pemrograman, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan proyek-proyek KPBU dengan Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian PUPR.

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas untuk: (1) melakukan penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama, informasi serta evaluasi kinerja pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, (2) melakukan pengembangan sistem dan strategi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, (3) melakukan penyusunan NSPK pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, (3) melaksanakan penyusunan profil risiko pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, (4) melakukan pengelolaan data dan sistem informasi pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, (5) melakukan pemantauan dan evaluasi pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta (6) melakukan penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan lainnya dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

2.1.1. TUJUAN DAN SASARAN SRATEGIS

1. TUJUAN

Tujuan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas sistem dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, termasuk kebijakan bantuan pembiayaan perumahan;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan (termasuk program jangka menengah, tahunan, dan identifikasi proyek KPBU) dan evaluasi pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berbasis *database*;

- c. Meningkatkan kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- e. Meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

2. SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020-2024 disusun untuk mendukung sasaran Program Dukungan Manajemen yaitu Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya. Adapun sasaran kegiatan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Detail manual Sasaran Kegiatan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, berikut Indikator Kinerja dan metode perhitungannya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Sasaran Kegiatan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020-2024

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	IKSP, merupakan nilai komposit dari indikator 1. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang siap dikerjasamakan (%)	IKSP2, dihitung pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (30%) 1. Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target. Indikator 2 (70%) 2. Dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan akibat kegiatan penyiapan Pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan)		Internal dan Eksternal

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SK	Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dit. Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan)	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat implementasi kegiatan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan kepatuhan internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 3. Tingkat implementasi kegiatan penyelenggaraan SAKIP (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (40%) • Jumlah rekomendasi Kebijakan, Strategi, Program dan pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah fasilitasi kerjasama pembiayaan perumahan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%)		Internal

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				- Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) Indikator 2 (30%) - Jumlah Laporan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%) - Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Profil Risiko KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (50%) Indikator 3 (30%) Penilaian dari Kementerian PAN dan RB		

3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Adapun arah kebijakan dan strategi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Revisi atas Peraturan Menteri PUPR terkait Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Peningkatan Koordinasi antara Simpul KPBU, Unit Organisasi di Kementerian PUPR dengan Kantor Bersama KPBU;
- c. Penyusunan Rencana Umum proyek KPBU Infrastruktur PU dan Perumahan selaras dengan Renstra Kementerian PUPR dan RPJMN 2020- 2024;
- d. Peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur PU dan Perumahan melalui bundling infrastruktur;
- e. Pengembangan skema pembiayaan KPBU;
- f. Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berfungsi sebagai *bridging finance* KPBU bidang PUPR dan vehicle dalam menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- g. Relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan (AP) untuk proyek *unsolicited*;
- h. Percepatan dan penyederhanaan proses pengajuan proyek *unsolicited* dari badan usaha pemrakarsa;
- i. *Re-focusing* kegiatan penyiapan proyek KPBU Bidang PU dan Perumahan
- j. Alokasi APBN untuk mendukung KPBU dalam meningkatkan daya ungkit dan *scale up* pembiayaan infrastruktur;
- k. Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbitan KPR Rumah Umum.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan pada TA 2021 mengalami 3 (tiga) kali perubahan sehingga terdapat 4 (empat) dokumen perjanjian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan pada tahun 2021 (terlampir).

Perjanjian kinerja awal diterbitkan pada Januari 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp21.127.189.000. Perjanjian kinerja tersebut terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan dan 1 (satu) indikator kinerja. Sasaran kegiatannya yaitu meningkatnya pelaksanaan pengembangan sistem dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. Indikator Kinerja Kegiatan yaitu tingkat pencapaian pelaksanaan pengembangan sistem, kebijakan, dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

Revisi pertama perjanjian kinerja diterbitkan pada bulan Februari 2021. Pada revisi pertama terjadi realokasi pagu anggaran menjadi Rp 14.080.661.000. Revisi perjanjian kinerja kedua dilakukan pada bulan April 2021. Pada revisi kedua ada penambahan pagu anggaran menjadi Rp. 25.073.281.000. Pada Bulan Agustus terjadi perubahan atau revisi ketiga perjanjian kinerja. Pada revisi ketiga juga terjadi penambahan pagu anggaran menjadi Rp. 32.743.044.000.

Berikut ini Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2021:

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan (Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2021)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
	Meningkatnya pelaksanaan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Tingkat pencapaian pelaksanaan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	%	100

2.3 METODE PENGUKURAN

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi. Kinerja suatu organisasi bisa diketahui hanya jika organisasi tersebut mempunyai kriteria/indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan biasanya dikaitkan dengan target-target tertentu yang hendak dicapai.

Indikator Kegiatan (*output*) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan dari pelaksanaan dan tercapainya *output* dari kegiatan tersebut. Penetapan indikator dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga mudah diukur, mudah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tersedia. Indikator Kinerja Utama (IKU) Output Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan;
2. Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
3. Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
4. NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
5. Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Pembiayaan Perumahan;
6. Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
7. Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
8. Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN
Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat implementasi kegiatan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan kepatuhan	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (40%) sbb: • Jumlah rekomendasi Kebijakan, Strategi, Program dan pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%)

	internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan (%) 3. Tingkat implementasi kegiatan penyelenggaraan SAKIP (%)	• Jumlah fasilitasi kerjasama pembiayaan perumahan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah dokumen pengelolaan data dan informasi di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) Indikator 2 (30%) • Jumlah Laporan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%) • Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Profil Risiko KPBU Infrastruktur PU dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (50%) Indikator 3 (30%) Penilaian dari Kementerian PAN dan RB
--	--	--

Tabel 2. 3 Metode Perhitungan

2.4 TARGET TAHUN 2021 MENURUT RENSTRA

2.4.1. TARGET KINERJA

Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan melaksanakan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, dengan Sasaran Kegiatan (*Output*) dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan;
2. Jumlah Dokumen Penyusunan Standar dan kriteria Bidang Pembiayaan Prumahan;
3. Jumlah Dokumen Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Perumahan;

4. Jumlah Draft Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
5. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
6. Jumlah Dokumen Pengembangan Sumber Dana dan Pola Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
7. Jumlah Dokumen Pengembangan Kemitraan dan Koordinasi Penyiapan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
8. Jumlah Profil Risiko Penyusunan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
9. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
10. Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
11. Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
12. Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan;
13. Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
14. Jumlah Laporan Pengendalian dan Pemantauan Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
15. Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
16. Jumlah dokumen Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
17. Jumlah Dokumen Pengelolaan Konsultasi dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
18. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
19. Jumlah Laporan dan Informasi pimpinan di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
20. Jumlah Laporan Kinerja Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

2.4.2. KERANGKA PENDANAAN

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama TA. 2021 telah mengalami (8) delapan kali revisi DIPA. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II juga telah merevisi DIPA sebanyak 4 (empat) kali pada TA. 2021. Berdasarkan total kebutuhan pendanaan kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2021 adalah sebesar Rp32.743.044.000.

Tabel 2. 4 Perubahan DIPA

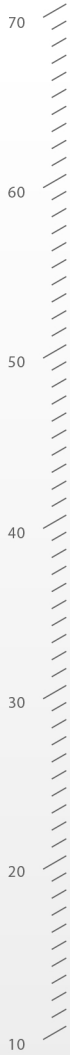
No	Perubahan DIPA	Alasan Revisi
1	DIPA Awal tanggal Januari 2021	
2	DIPA Revisi ke 01 tanggal 18 Februari 2021	<i>Refocussing</i> dan Realokasi Tahap 1
3	DIPA Revisi ke 02 tanggal 15 April 2021	Percepatan Penarikan PHLN NAHP
4	DIPA Revisi ke 03 tanggal 28 Juli 2021	<i>Refocussing</i> dan Realokasi dan Percepatan Penarikan PHLN NAHP
5	DIPA Revisi ke 04 tanggal 20 Agustus 2021	<i>Refocussing/</i> Pemotongan Covid

Tabel 2. 5 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2021 (Sumber data: Rencana Strategis Direktorat Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2020-2024)

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEGIATAN 2: Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		%	100	100	100	100	100	100	40,240	51,221	23,602	22,500	22,500	160,063
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :														
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	100	100	100	100	100	100	40,240	51,221	23,602	22,500	22,500	160,063
KOORDINATOR: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan														
PELAKSANA: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan									40,240	51,221	23,602	22,500	22,500	160,063
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	3	2	0	0	0	3	16,316	10,877	-	-	-	27,193
1	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0	0	0	1	4,500	2,625	-	-	-	7,125
2	Jumlah Dokumen Penyusunan Standar dan Kriteria Bidang Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0	0	0	1	5,004	2,700	-	-	-	7,704
3	Jumlah Dokumen Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0	0	0	1	6,812	5,553	-	-	-	12,365
2	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	6	5	6	6	6	29	4,317	21,734	6,000	6,000	6,000	44,051
1	Jumlah Draft Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	4	2	2	2	2	12	3,203	1,600	2,500	2,500	2,500	12,303
2	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	10	1,114	19,357	1,500	1,500	1,500	24,971
3	Jumlah Dokumen Pengembangan Sumber Dana dan Pola Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	0	0	1	1	1	3	-	-	1,000	1,000	1,000	3,000
4	Jumlah Dokumen Pengembangan Kemitraan dan Koordinasi Penyiapan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	0	1	1	1	1	4	-	777	1,000	1,000	1,000	3,777

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3		Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	5	6	6	6	6	29	3,871	5,000	6,000	6,000	6,000	26,871
	1	Jumlah Profil Risiko Penyusunan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	4	4	4	4	4	20	2,531	3,400	4,000	4,000	4,000	17,931
	2	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	0	1	1	1	1	4	-	750	1,000	1,000	1,000	3,750
	3	Jumlah Dokumen Fasilitas dan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	1,340	850	1,000	1,000	1,000	5,190
4		NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	NSPK	2	0	1	1	1	5	1,575	-	2,000	2,000	2,000	7,575
	1	Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	NSPK	2	0	1	1	1	5	1,575	-	2,000	2,000	2,000	7,575
5		Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	1	1	1	0	0	1	7,144	6,610	1,102	-	-	14,856
	1	Jumlah Fasilitas dan koordinasi Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	1	1	1	0	0	1	7,144	6,610	1,102	-	-	14,856
6		Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0	3	3	3	3	12	-	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
	2	Jumlah Laporan Layanan dan konsultasi Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
	3	Jumlah Laporan Pengendalian dan pemantauan Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
7		Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	4	4	4	4	4	20	3,127	2,000	3,000	3,000	3,000	14,127
	1	Jumlah Dokumen pengelolaan Data Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	1	2	2	2	2	9	949	1,000	1,000	1,000	1,000	4,949
	2	Jumlah Dokumen pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	2	1	1	1	1	6	1,622	500	1,000	1,000	1,000	5,122
	3	Jumlah Dokumen pengelolaan Konsultasi dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	1	1	1	1	1	5	556	500	1,000	1,000	1,000	4,056

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8		Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	7	3	3	3	3	19	3,890	2,000	2,500	2,500	2,500	13,390
	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	3	1	1	1	1	7	1,866	900	1,000	1,000	1,000	5,766
	2	Jumlah Laporan dan Informasi pimpinan di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	2	1	1	1	1	6	1,274	700	1,000	1,000	1,000	4,974
	3	Jumlah Laporan Kinerja Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	2	1	1	1	1	6	750	400	500	500	500	2,650



BAB 3

KAPASITAS ORGANISASI





3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, maka diperlukan Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, perlu diwujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan Pegawai Negeri Sipil maka ditetapkannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang “Manajemen Pegawai Negeri Sipil”. Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna. Kebijakan - kebijakan yang terdapat dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban dan kedudukan hukum.

Pada realitanya kedua hal di atas mengalami distorsi dalam pelaksanaannya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan seringkali belum diarahkan secara maksimal pada analisis kebutuhan organisasi/unit kerja. Kondisi ini menyebabkan tidak optimalnya *output* atau *outcome* dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kinerja pegawai maupun organisasinya. Sementara itu, dalam pengembangan karier pegawai juga tidak jarang tanpa mendasarkan pada profesionalisme (*merit system*), akan tetapi lebih kepada senioritas atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Hal-hal semacam ini pada akhirnya menyebabkan pembinaan atau pengembangan pegawai, khususnya Pegawai Negeri Sipil, menjadi belum terpetakan dengan baik dan menunjang tugas dan fungsi dalam organisasi.

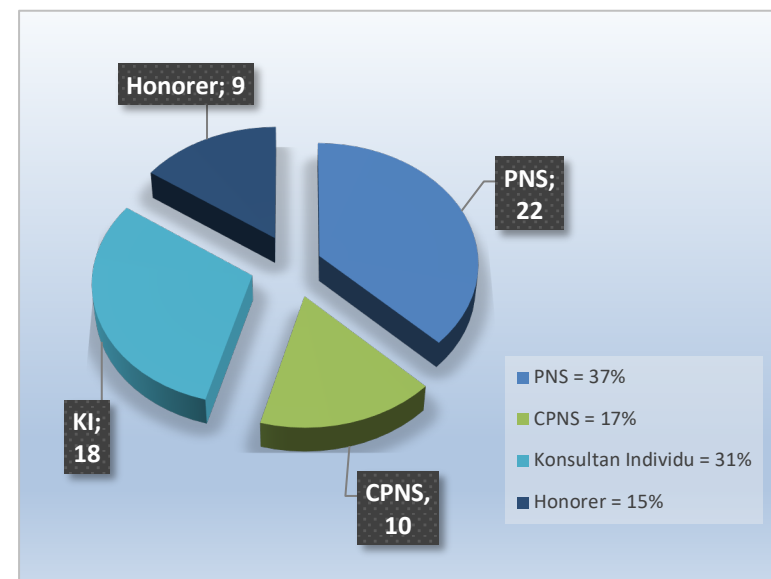
Secara teknis, sumber daya manusia merupakan penunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan apabila mencukupi dari sisi jumlah, kualitas, dan professional dibidangnya, apalagi sumber daya manusia yang dimiliki mempunyai motivasi tinggi, kreatif dan mampu mengembangkan inovasi, maka pencapaian kinerja akan semakin baik. Dalam rangka perbaikan untuk pengembangan sumber daya manusia, perlu dilakukan penyusunan *roadmap* pengembangan sumber daya manusia dengan terencana dan terstruktur. Hal demikian selaras dengan amanat Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 saat resmi meluncurkan *core value* dan *employer branding* Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK. BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Adanya *core value* Aparatur Sipil Negara (ASN) ini sebagai penerjemah terhadap nilai-nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. *Core value* menjadi penguatan budaya kerja yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah. Hadirnya *core value* ini diharapkan mampu menciptakan generasi ASN khususnya di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan yang memiliki semangat berkarya, berkualitas serta profesional dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Berikut merupakan rekapitulasi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2021 pada tabel-tabel berikut:

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2021

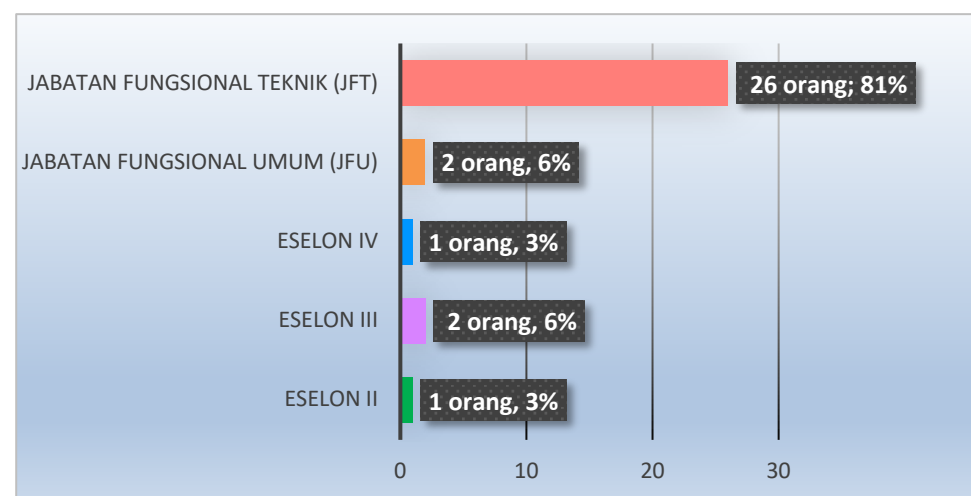
No	STATUS PEGAWAI	JUMLAH
1	PNS*	32
	Pimpinan Tinggi Pratama	1
	Pejabat Administrator/KPT	4
	Pejabat Pengawas/SKPT	9
	Staf/Pelaksana	8
	CPNS	10
2	Konsultan Individu	18
3	Honorar	9
TOTAL		59



Gambar 3. 1 Persentase SDM Tahun 2021

Tabel 3. 2 Rekapitulasi PNS berdasarkan Jabatan

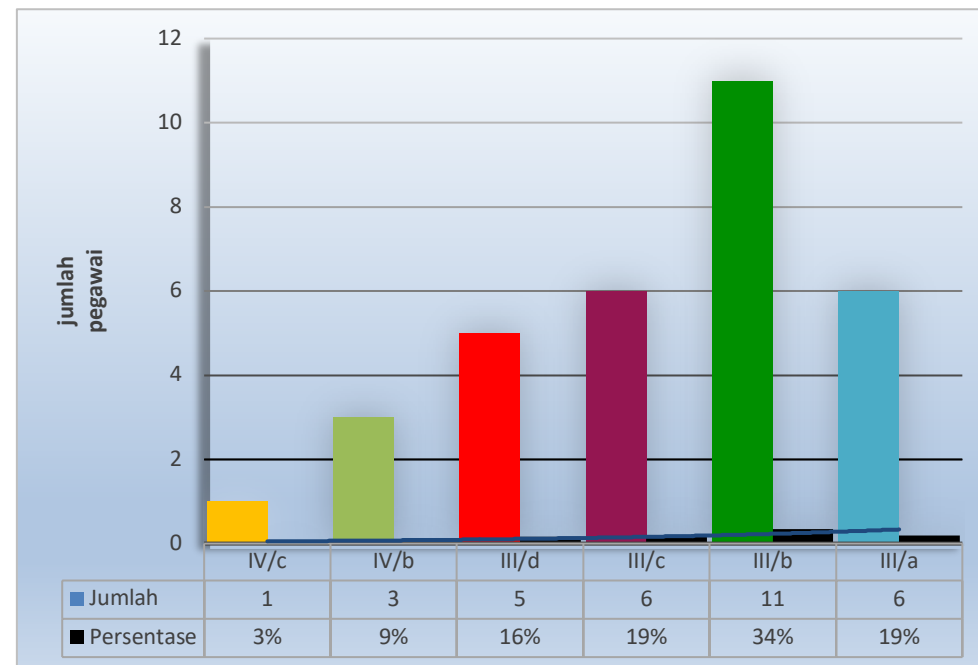
No	JABATAN	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Eselon III	2
3	Eselon IV	1
4	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	2
5	Jabatan Fungsional Teknik (JFT)	26
TOTAL		32



Gambar 3. 2 Persentase PNS Berdasarkan Jabatan

Tabel 3. 3 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan Jabatan Fungsional

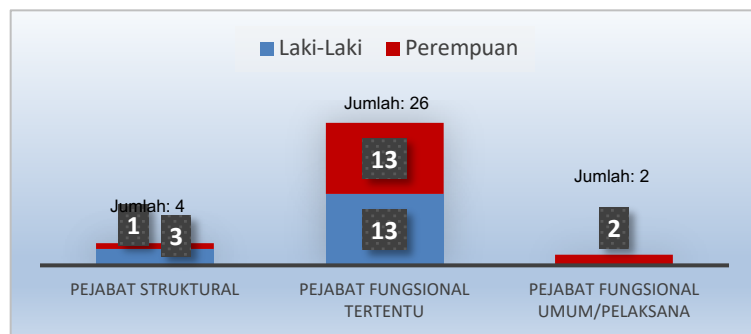
No	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV/e	0
2	IV/d	0
3	IV/c	1
4	IV/b	3
5	IV/a	0
6	III/d	5
7	III/c	6
8	III/b	11
9	III/a	6
10	II/d	0
11	II/c	0
12	II/b	0
13	II/a	0
14	I/d	0
15	I/c	0
16	I/b	0
17	I/a	0
TOTAL		32



Gambar 3. 3 Persentase PNS Berdasarkan Golongan Jabatan

Tabel 3. 4 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jabatan dan Gender

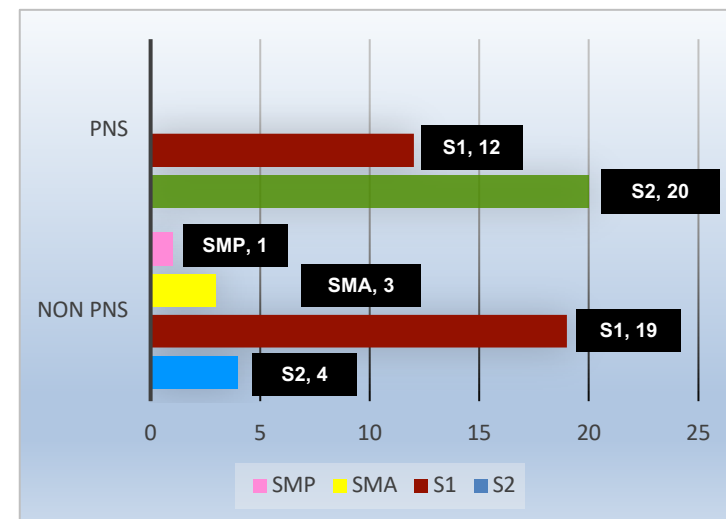
No	JABATAN	GENDER		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Pejabat Struktural	3	1	4
2	Pejabat Fungsional Tertentu	13	13	26
3	Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana	0	2	2
TOTAL		16	16	32



Gambar 3. 4 Persentase PNS Berdasarkan Jabatan dan Gender

Tabel 3. 5 Rekapitulasi SDM Berdasarkan Pendidikan

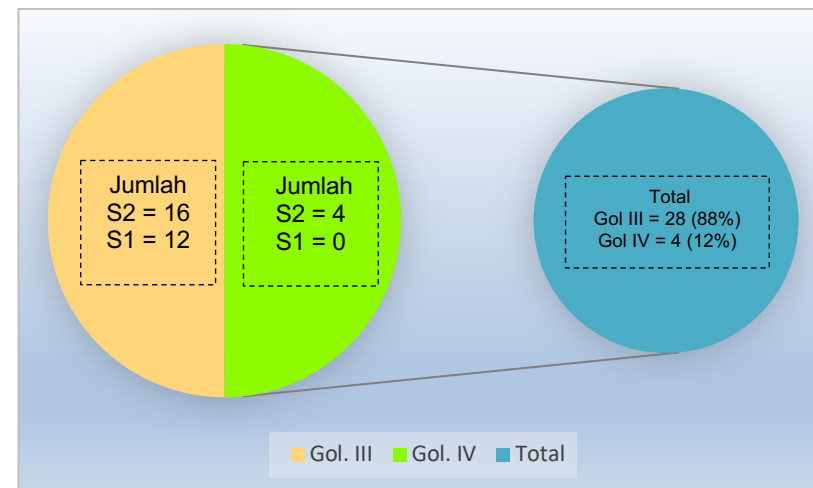
NO	PENDIDIKAN	PNS	NON PNS		JUMLAH
			Substansi	Pendukung	
1	S3	-	-	-	-
2	S2	20	4	-	24
3	S1	12	14	5	31
4	D3	-	-	-	-
5	SMA/Sederajat	--	-	3	3
6	SMP/Sederajat	-	-	1	1
7	SD	-	-	-	-
TOTAL		32	18	9	59



Gambar 3. 5 Persentase SDM Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3. 6 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

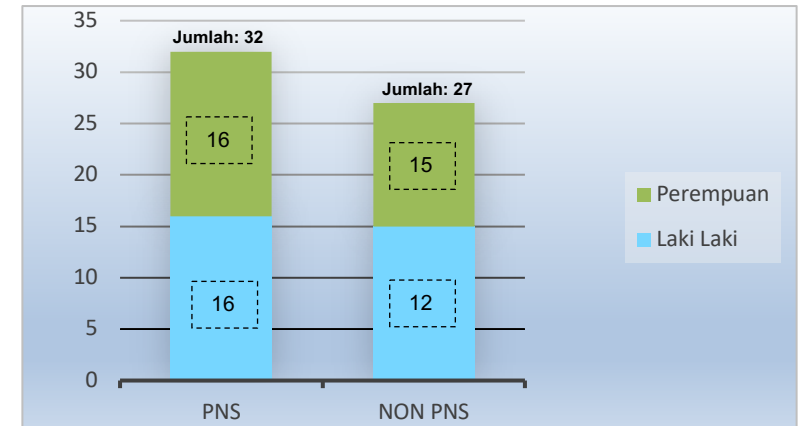
NO.	GOLONGAN	PENDIDIKAN					JUMLAH
		S2	S1	D3	SMA	BELUM TERDATA	
1	Golongan I	-	-	-	-	-	0
2	Golongan II	-	-	-	-	-	0
3	Golongan III	16	12	-	-	-	28
4	Golongan IV	4	-	-	-	-	4
TOTAL		20	12	-	-	-	32



Gambar 3. 6 Persentase PNS Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Tabel 3. 7 Rekapitulasi SDM berdasarkan Gender

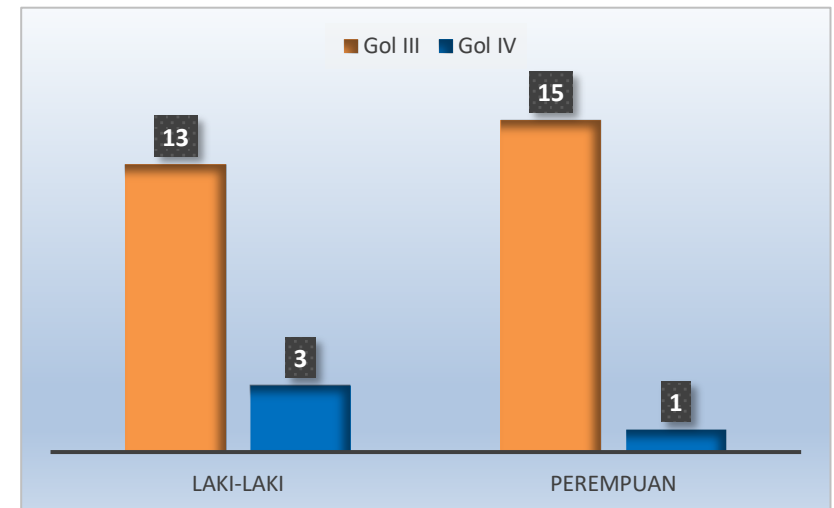
GENDER	PNS	NON PNS		JUMLAH
		Substansi	Pendukung	
Laki-laki	16	10	5	31
Perempuan	16	8	4	28
TOTAL	32	18	9	59



Gambar 3. 7 Persentase SDM Berdasarkan Gender

Tabel 3. 8 Rekapitulasi PNS berdasarkan Golongan dan Gender

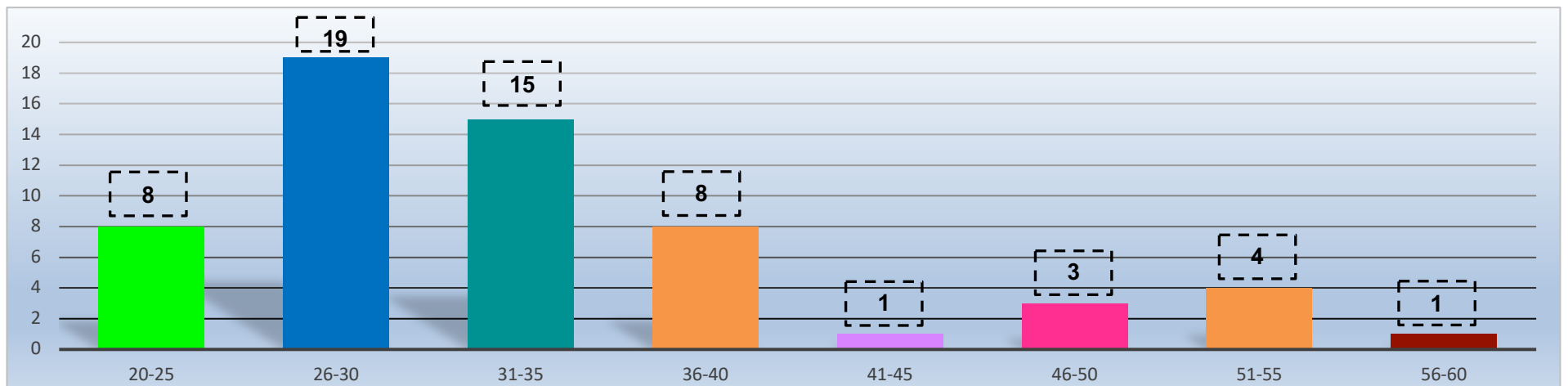
NO.	GOLONGAN	GENDER		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	-	-	-
3	Golongan III	13	15	28
4	Golongan IV	3	1	4
TOTAL		16	16	32



Gambar 3. 8 Persentase PNS Berdasarkan Golongan dan Gender

Tabel 3. 9 Rekapitulasi SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia

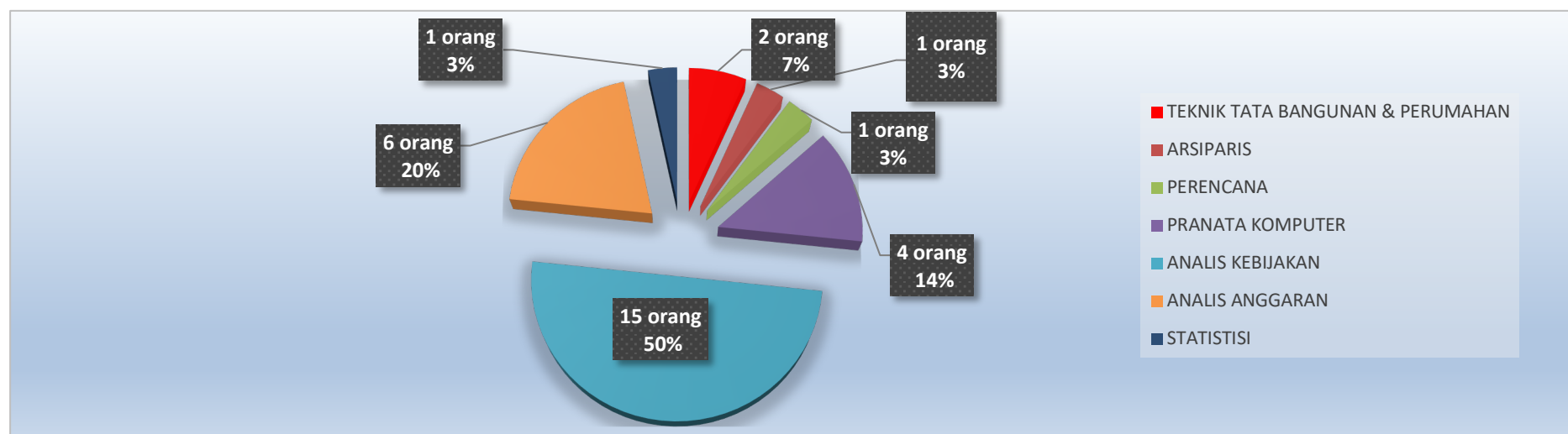
NO	USIA	TINGKAT PENDIDIKAN														TOTAL
		S3		S2		S1		D3		SMA		SMP		SD	BELUM TERDATA	
		TEKNIK	NON TEKNIK	TEKNIK	NON TEKNIK	TEKNIK	NON TEKNIK	TEKNIK	NON TEKNIK	TEKNIK	NON TEKNIK	TEKNIK	NON TEKNIK			
1	DI BAWAH 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	20-25	0	0	0	0	3	4	0	0	0	1	0	0	0	0	8
3	26-30	0	0	2	5	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	19
4	31-35	0	0	2	7	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	15
5	36-40	0	0	1	1	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	8
6	41-45	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	46-50	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
8	51-55	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
9	56-60	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	DI ATAS 60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	6	18	11	20	0	0	0	3	0	1	0	0	59



Gambar 3. 9 Persentase SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Tabel 3. 10 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Nama Jabatan	Rumpun PUPR	Utama		Madya		Muda		Pertama		Penyelia		Mahir		pelaksana		Pemula		Jumlah		Jumlah
			JFT Aktif	JFT NonAktif	JFT Aktif	JFT NonAktif	JFT Aktif	JFT NonAktif	JFT Aktif	JFT NonAktif	JFT Aktif	JFT NonAktif	JFT Aktif	JFT NonAktif	JFT Aktif	JFT NonAktif	JFT Aktif	JFT NonAktif	JFT Aktif	JFT NonAktif	
1	TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	PUPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	TEKNIK TATA BANGUNAN & PERUMAHAN	PUPR	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
3	ANALIS KEPEGAWAIAN	NON PUPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ARSIPARIS	NON PUPR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
5	PENELITI	NON PUPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	NON PUPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PERENCANA	NON PUPR	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8	PRANATA HUMAS	NON PUPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PRANATA KOMPUTER	NON PUPR	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4
10	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	NON PUPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ANALIS KEBIJAKAN	NON PUPR	0	0	1	0	2	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15
12	ANALIS ANGGARAN	NON PUPR	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6
13	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN	NON PUPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PRANATA KEUANGAN APBN	NON PUPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ANALIS PERBENDAHARAAN	NON PUPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	STATISTISI	NON PUPR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Jumlah			0	0	1	3	10	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	3	30



Gambar 3. 10 Persentase PNS Berdasarkan Jabatan Fungsional

Tabel 3. 11 Pegawai di Lingkungan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan (Sumber Data: Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan)

NO.	NAMA	NIP/NRP	JABATAN	KET.
1	Agus Sulaeman, SE, M.Si	196808271997031002	Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	
2	Fina Sjafinas, ST, M.Si	196611221994032002	Kasubdit Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur	
3	Andri Yusandra, ST., MUM.	196811051997031001	Kasubdit Kepatuhan Intern	
4	Bambang Triatmoko, SE, M.Si	196311071990031003	KBT Perencanaan, Pengelolaan Data dan Informasi	
5	Tantra Rifai, ST.	198602222009121003	SKBT Kebijakan Pembiayaan	
6	Denik Haryani, ST., MS.c	198601152009122001	SKBT Strategi Pembiayaan	
7	Ervin Supriyanto, ST.	19830207200901004	SKBT Pengelolaan Data Pembiayaan	
8	Satriadi Utomo, S.Kom	198105202009121001	SKBT Pengembangan Sistem Informasi	
9	Ary Rahman Wahyudi, ST., MURB&RegPlg	198405132009121001	Ketua Tim Pelaksana Bidang Tugas Pemantauan dan Evaluasi	
10	Arum Prihati Musyarofa, SH	19731022200502201	SKBT Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	
11	Moammad Alzia Viqolbi, ST., MT.	198906162018021001	SKBT Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	
12	Adi Femiliandri, S.Si.	197705032005011008	SKBT Pemantauan dan Evaluasi Kinerja I	
13	Rina Nur Utami, ST.	198203112009012002	SKBT Pemantauan dan Evaluasi Kinerja I	
14	Ade Suryadi, SE., M.Si.	197105172002121001	Kasubag Tata Usaha	
15	Sabrina Sabila, ST., MT.	198606152010012006	Staf Subdit Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur	
16	Dwi Putri Heritasari, ST.	199402192019032013		
17	Novi Riandini, S.Kom.	199311072018022002		
18	Gusti Ayu Prathita Ananta, S.Kom.	199410252019032010		
19	Nadya Indah Yulita, ST.	198907012019032007		
20	Fahmil Ridho Ilahi, SE.	199104242019031007		

NO.	NAMA	NIP/NRP	JABATAN	KET.
21	Muhammad Yodi Rizkyardi, S.E., M.B.A.	198911012020121002	Staf Subdit Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur	
22	Linda Dwi Roswitasari, S.E., M.M.	199009292020122003		
23	Raissa Rahmaditya Rabilla, S.E., M.M.	199209132020122005		
24	Muhammad Nur Hidayat, S.E., M.B.A.	199109062020121006		
25	Farisah Arum Rosyana, SST., M.M.	198908242020122003		
26	Sri Rahmi Purnamasari, S.I.Kom.	198310282009122001	Staf Subdit Kepatuhan Intern	
27	Deka Bayu Dirgantara, S.Tr.M	199602052019031007		
28	Chisillia Mayangsari, S.E., M.E.	199305052020122005		
29	Melyana Gita Astika, S.E., M.E.	199205262020122004		
30	Sandy Sugama, M.B.A.	198911212020121003		
31	Rini Wulansari, S.E., M.M.	199401062020122004		
32	Javier Almer Davinsi, S.E., M.M.	199011052020121002		
33	Ria Risma Ardiani, ST	Konsultan Individual	Staf Subdit Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur	
34	Evi Triarini, S.T.	Konsultan Individual		
35	Amira Dhiandini, S.T	Konsultan Individual		
36	Muhammad Idham Alwi, S.T	Konsultan Individual		
37	Andri Dirgantara, S.T, M.T, M.Sc	Konsultan Individual		
38	Benni Prihantoro, S.Sos., M.Si	Konsultan Individual		
39	Ilham Surachman, S.I.Kom.	Konsultan Individual		
40	Benny Subekti, S.Kom.	Konsultan Individual		
41	Hanna Anindya Anjastari, S.T	Konsultan Individual	Staf Subdit Kepatuhan Intern	
42	Fajar Eli Benjamin S.T	Konsultan Individual		
43	Angga Maesa Danu, S.T, M.T	Konsultan Individual		
44	Sinthia Mahesa Tari, S.Ak	Konsultan Individual		
45	Aisyah Visi Murpratiwi, S.T.	Konsultan Individual		
46	Raden Ajeng Alya Aulia Maharani, S.Si	Konsultan Individual		
47	Tri Mulyadi, SE.	Konsultan Individual		
48	Adam Ramadhan, SH.	Konsultan Individual		
49	Panji Kurniawan, ST.	Konsultan Individual		
50	Widya Astuti, ST., MT.	Konsultan Individual		

NO.	NAMA	NIP/NRP	JABATAN	KET.
51	Daphne Hariyati R, SE.	H22061981092018001	Staf Honorar	
52	Dina Fitriana, SE.	E21021996062018001		
53	Ardiyansyah, S.Kom.	E04061987062018003		
54	Feby Kharisma Darmasakti, SAP.	H10021984092018001		
55	Fujiah Hasanatur Rohmah, S.Pd	H18021994092018001		
56	Putery Eno Lestari	H27041997092018001		
57	M. Novel	H24081987092018001		
58	Taufik Ismail	H28101974092018001		
59	Mardi Prayogi	H28041982092018001		

Berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan memiliki SDM berjumlah 59 (lima puluh sembilan) orang. Sebagai upaya untuk menunjang kualitas manajemen SDM yang profesional, kompeten dan kredibel, maka penting halnya untuk melakukan perencanaan, pengembangan dan distribusi pegawai atau yang disebut dengan analisis beban kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dijelaskan bahwa analisis beban kerja merupakan teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Melalui pelaksanaan analisis beban kerja dapat mengukur beban kerja jabatan yang sesuai dengan jumlah, komposisi dan kualifikasi ASN di lingkungan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan. Hasil analisis beban kerja juga dapat dijadikan tolak ukur untuk meningkatkan produktivitas kerja serta langkah-langkah lainnya dalam rangka meningkatkan pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur negara baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian. Upaya tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan analisis beban kerja pada setiap unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah secara konsisten dan berkesinambungan.

Secara teknis, sumber daya manusia merupakan penunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan apabila mencukupi dari sisi jumlah, kualitas dan profesional di bidangnya. Apalagi jika sumber daya manusia yang dimiliki itu mempunyai motivasi tinggi, kreatif, dan mampu mengembangkan inovasi, maka pencapaian kinerja akan semakin baik. Sebagai upaya perbaikan untuk pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pelatihan unit kerja di lingkungan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan. Kebutuhan pelatihan tersebut sebagai berikut:

1. Perencanaan Program dan Anggaran

- a. Perencanaan Anggaran;
- b. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); dan
- c. Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

2. Pembiayaan Perumahan

- a. Dasar Pembiayaan Perumahan;
- b. *Webinar Subsidized Housing Location Suitability Tool and Program;*

- c. Amortisasi dan Kredit Pemilikan Rumah (FINANSIAL) Program; dan
- d. Pasar Pembiayaan Sekunder.

3. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

- a. *Financial Modelling*;
- b. Penyusunan Studi Pendahuluan (SP), *Outline Business Case* (OBC), dan *Final Business Case* (FBC);
- c. *Legal drafting* Perjanjian Proyek KPBU;
- d. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU;
- e. *Certified Public-Private Partnerships Professional* (CP³P) semua level;
- f. *Training Management Information Systems* (MIS) Database Proyek KPBU; dan
- g. *Public and Private Infrastructure Investment Management Center* (PIMAC) *Sharing Session*.

4. Data dan Informasi

- a. Pelatihan *Junior Cyber Security*;
- b. Pelatihan Statistik dan Riset Pasar;
- c. *Training* Statistik dan Sistem Pelaporan Informasi; dan
- d. Diklat Pengolahan Data Statistik Dengan Menggunakan Aplikasi.

5. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

- a. Bimbingan Teknis Evaluator SAKIP;
- b. Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan II; dan
- c. Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan

3.2 SARANA DAN PRASARANA

Fasilitas kerja yang merupakan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai. Faktor yang diperhitungkan untuk meningkatkan semangat kerja pegawai adalah fasilitas kerja yang memadai dan dapat membantu pegawai dalam mengerjakan tugasnya. Hal ini cukup beralasan sebab fasilitas kerja merupakan faktor yang mempengaruhi manajemen sarana dan prasarana suatu organisasi dalam mendukung proses berjalannya suatu organisasi.

Sistem penyelenggaraan pemerintah secara menyeluruh telah mengalami perubahan baik di pusat maupun di daerah dengan berbasis kinerja, tingkat capaian yang berdasarkan pada kinerja serta pelayanan yang prima, untuk mencapai keberhasilan kinerja yang baik pegawai pemerintah diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi membuka konsekuensi dengan tuntutan perubahan untuk mengikuti perkembangan teknologi, sarana dan prasarana

apabila tidak disiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi akan mengalami ketertinggalan atau keterbelakangan di segala bidang. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu proses manajemen sarana dan prasarana agar lebih menjamin bahwa unit kerja ini sudah tersedia sarana dan prasarana yang cukup sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung berbagai kegiatan, tugas dan fungsi yang sesuai, cepat, tepat dan bermanfaat. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja pasal 3 (tiga) yang menjelaskan tentang penataan sarana dan prasarana kerja, antara lain:

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Untuk menyikapi hal tersebut di atas, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Saat ini Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menempati gedung **A1 lantai 2 wing 4** yang terdiri dari ruangan Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, dan juga di tempati oleh Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur dan Sub Direktorat Kepatuhan Intern serta memiliki 1 ruang rapat internal. Adapun sarana dan prasarana pendukung di lingkungan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 12 Jumlah Sarana dan Prasarana

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Lemari Besi/Metal	12 Buah
2	Filling Cabinet Besi	7 Buah
3	Alat Penghancur Kertas	3 Buah
4	LCD Projector/Infocus	2 Buah
5	Access Control System	1 Buah
6	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1 Buah
7	Meja Kerja	34 Buah
8	Meja Rapat	2 Set
9	Kursi Kerja	54 Buah
10	Kursi Rapat	11 Buah
11	Kursi Futura	12 Buah
12	Nakas	1 Buah
13	A.C. Sentral	5 Buah
14	A.C. Split	7 Buah
15	Exhaust Fan	1 Buah
16	Kitchen Set	1 Buah
17	Televisi	2 Buah
18	P.C Unit	37 Buah
19	Notebook	2 Buah
20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	45 buah
21	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3 Buah
22	Switch	1 Buah
23	Access Point	2 Buah



Gambar 3. 11 Ruang/Kantor
Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditunjang dengan kegiatan yang ada di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor: SP DIPA-033.16.1.631003/2021, Tanggal 23 November 2020.

Tabel 3. 13 Perubahan DIPA

No.	Perubahan DIPA	Alasan Revisi
1	DIPA Awal tanggal Januari 2021	
2	DIPA Revisi ke 01 tanggal 18 Februari 2021	<i>Refocussing</i> dan Realokasi Tahap 1
3	DIPA Revisi ke 02 tanggal 15 April 2021	Percepatan Penarikan PHLN NAHP
4	DIPA Revisi ke 03 tanggal 28 Juli 2021	<i>Refocussing</i> dan Realokasi dan Percepatan Penarikan PHLN NAHP
5	DIPA Revisi ke 04 tanggal 20 Agustus 2021	Refocussing/ Pemotongan Covid

70
60
50
40
30
20
10

BAB 4

AKUNTABILITAS KINERJA





4.1. CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN TAHUN 2021

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung-jawaban secara periodik. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah adalah komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan yang akuntabel, sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Dalam rangka melaksanakan akuntabilitas kinerja tersebut, maka perlu disampaikan berbagai capaian kinerja. Capaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pencapaian kinerja tahun 2021 ini, sebagai umpan balik guna melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Dalam redesain program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari kegiatan: (1) Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Permukiman; (2) Penyediaan Akses Rumah Layak Huni; dan (3) Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan. Serta memiliki Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan: (1) Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; (2) Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan; dan (3) Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan perumahan.

Untuk mencapai sasaran kegiatan, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menetapkan 20 (dua puluh) indikator kinerja, yaitu:

1. Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan;
2. Jumlah Dokumen Penyusunan Standar dan kriteria Bidang Pembiayaan Perumahan;
3. Jumlah Dokumen Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Perumahan;
4. Jumlah Draft Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
5. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
6. Jumlah Dokumen Pengembangan Sumber Dana dan Pola Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
7. Jumlah Dokumen Pengembangan Kemitraan dan Koordinasi Penyiapan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
8. Jumlah Profil Risiko Penyusunan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
9. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
10. Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
11. Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
12. Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan;
13. Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
14. Jumlah Laporan Pengendalian dan Pemantauan Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
15. Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
16. Jumlah dokumen Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
17. Jumlah Dokumen Pengelolaan Konsultasi dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

18. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
19. Jumlah Laporan dan Informasi pimpinan di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
20. Jumlah Laporan Kinerja Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Pencapaian keseluruhan Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dapat dilihat pada tabel Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2021 dan cara perhitungannya (terlampir) sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	100	100,80%

Sumber: data diolah, 2021

Tabel 4. 2 *Cascading* Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Indikator Kontributor	Sub Komponen Perhitungan	Target DIPA	Target Renstra	Capaian DIPA	Capaian Renstra	DIPA (%)	Renstra (%)	Total DIPA	Total Renstra	DIPA	RENSTRA	Total Capaian DIPA	Total Capaian Renstra
Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Indikator 1 (40%) Tingkat implementasi kegiatan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan (%)	Jumlah rekomendasi Kebijakan, Strategi, Program dan pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (20%)	Pengembangan Kapasitas dan Reformasi Kebijakan Pembiayaan Sekunder Perumahan	2	2	3	3	150%	150%	30%	30%	140%	110%	56%	44%
			PPP Affordable Housing												
			Grand Design Housing dan Real Estate Information System (HREIS)												
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%)	Penyusunan Rencana Kerja Direktorat TA 2022	2	5	5	5	250%	100%	50%	20%				
			Penyusunan Rencana Umum Proyek KPBU TA 2022												
			PMC Firm to Support DGIF for Public Works and Housing with Implementation of The Accelerating Infrastructure Delivery Through Better Engineering Services Project (ESP)												
			Koordinasi Simpul KPBU Kementerian PUPR TA. 2021												
			Koordinasi Kerja Sama dan Kemitraan Direktorat Jenderal												
		Jumlah fasilitasi kerjasama pembiayaan perumahan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (20%)	Jasa Layanan Konsultan Advisory untuk Komite Pengelola Proyek (PMC) NAHP	1	1	1	1	100%	100%	20%	20%				

Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Indikator Kontributor	Sub Komponen Perhitungan	Target DIPA	Target Renstra	Capaian DIPA	Capaian Renstra	DIPA (%)	Renstra (%)	Total DIPA	Total Renstra	DIPA	RENSTRA	Total Capaian DIPA	Total Capaian Renstra
		Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%)	-	0	0	0	0	0%	0%	20%	20%				
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%)	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Bidang Pembiayaan IPUP Tahun 2021 Pengelolaan Akreditasi dan Sertifikasi Badan Usaha Pengembang Perumahan Tahun 2021 Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan IPUP Tahun 2021 Layanan Informasi Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021	4	4	4	4	100%	100%	20%	20%				
	Indikator 2 (30%) Tingkat implementasi kegiatan kepatuhan internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)	Jumlah Laporan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%)	Penyusunan Dokumen Kelayakan Bisnis dan Dokumen Pengadaan Badan Usaha Proyek Infrastruktur Strategis/Prioritas Rintisan dan Multi Sektoral Layanan Kepatuhan Intern Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3	3	3	3	100%	100%	50%	50%	100%	83,33%	30%	25%

Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Indikator Kontributor	Sub Komponen Perhitungan	Target DIPA	Target Renstra	Capaian DIPA	Capaian Renstra	DIPA (%)	Renstra (%)	Total DIPA	Total Renstra	DIPA	RENSTRA	Total Capaian DIPA	Total Capaian Renstra
			Penyusunan Profil Kepatuhan Intern di Bidang Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan												
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Profil Risiko KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (50%)	Penyusunan Profil Risiko dan Pola Penanganan Risiko Program Strategis/Proyek Prioritas Bidang Jalan dan Jembatan	4	6	4	4	100%	66,67%	50%	33,33%				
			Penyusunan Profil Risiko dan Pola Penanganan Risiko Program Strategis/Proyek Prioritas Bidang Sumber Daya Air												
			Penyusunan Profil Risiko dan Pola Penanganan Risiko Program Strategis/Proyek Prioritas Bidang Perumahan												
			Penyusunan Profil Risiko dan Pola Penanganan Risiko Program Strategis/Proyek Prioritas Bidang Permukiman												

Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Indikator Kontributor	Sub Komponen Perhitungan	Target DIPA	Target Renstra	Capaian DIPA	Capaian Renstra	DIPA (%)	Renstra (%)	Total DIPA	Total Renstra	DIPA	RENSTRA	Total Capaian DIPA	Total Capaian Renstra
	Indikator 3 (30%) Tingkat implementasi kegiatan penyelenggaraan SAKIP (%)	Penilaian dari Kementerian PAN dan RB (30%)	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Bidang PUPR	3	3	3	3	100%	100%	30%	30%	30,00%	30,00%	31,80%	31,80%
			Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan												
			Penyusunan Profil Kinerja Pengembangan Sistem dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan												
Hasil Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA 2021														117,80%	100,80%

Sumber: data diolah, 2021

Tingkat pencapaian pelaksanaan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan diperoleh dari hasil penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: 40% berasal dari tingkat implementasi kegiatan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan infrastruktur PU dan Perumahan, 30% dari tingkat implementasi kegiatan kepatuhan internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan dan 30% dari tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA 2021 secara keseluruhan menunjukkan kinerja baik dengan didukung oleh peningkatan kinerja yang melampaui target sebesar 100% yakni dengan nilai 100,80%. Tingkat implementasi kegiatan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan infrastruktur PU dan Perumahan memberikan kontribusi sebesar 44%, terutama didukung oleh capaian komponen jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, program dan pengembangan sistem informasi pembiayaan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target, dan dari komponen jumlah rekomendasi kebijakan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target.

Sementara itu, tingkat implementasi kegiatan kepatuhan internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan hanya memberikan kontribusi sebesar 25% atau belum sesuai target yang diharapkan yaitu 30%. Hal demikian disebabkan adanya *refocusing* anggaran sehingga komponen jumlah rekomendasi kebijakan terkait profil risiko KPBU infrastruktur PU dan Perumahan mempengaruhi nilai capaian pada indikator ini.

Tingkat implementasi kegiatan penyelenggaraan SAKIP memperoleh nilai sebesar 31,80% yang artinya telah melebihi 1,80% dari target komposit indikator kinerja pada angka 30%. Nilai tersebut didapatkan dari hasil perbandingan antara nilai SAKIP Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020 dengan nilai SAKIP Kementerian PUPR Tahun 2020.

Kontribusi hasil capaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan sebesar 100,80% mendukung penilaian kegiatan Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya, **Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan** menjadi salah satu indikator yang dinilai. Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan salah satu *tools* yang digunakan untuk menangkap umpan balik dan dijadikan alat penilaian. Dengan adanya umpan balik ini, maka tingkat penerapan hasil pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur dapat dinilai dan hasil penilaian dapat menjadi rujukan pengambilan keputusan terhadap peningkatan kualitas mutu pelayanan publik.

Penetapan indikator kinerja yang akan diukur serta dijadikan pertanyaan yang dituangkan ke dalam kuesioner/survey berdasarkan pemetaan Model Logika, yaitu; (1) Indikator Masukan (*input*) yang mengukur jumlah sumber daya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan, (2) Indikator Keluaran (*ouput*) digunakan untuk mengukur keluaran yang langsung dihasilkan dari suatu pelaksanaan kegiatan, (3) Indikator Hasil (*outcome*) digunakan untuk mengukur capaian dari berbagai kegiatan dalam suatu program yang telah selesai dilaksanakan, serta (4) Indikator Dampak (*impact*) yang menunjukkan pengaruh, baik positif maupun negatif, yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan.

Berdasarkan hasil pengumpulan kuesioner dari 30 responden, maka didapatkan hasil berikut ini:

Tabel 4. 3 Hasil Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Jenis Indikator	Jumlah Pertanyaan	Nilai (%)	Bobot 30%
Indikator Masukan	13	94,67	28,27
Indikator Keluaran	2	93,67	
Indikator Hasil	9	93,70	
Indikator Dampak	2	94,33	
Nilai Total Survey	26	94,23	

Sumber: data diolah, 2021

Indikator Keluaran memiliki poin nilai yang paling rendah diantara ketiga indikator lainnya. Adapun poin yang dinilai adalah:

- Pendapat mengenai Jumlah layanan yang berupa kebijakan, strategi dan pengembangan sistem pada kegiatan penyiapan proyek KPBU bidang PUPR.
- Pendapat mengenai jumlah pelaksanaan kegiatan yang mendukung penyiapan proyek KPBU bidang PUPR.

Berdasarkan hasil kuesioner, bisa disimpulkan bahwa jumlah layanan berupa kebijakan, strategi dan pengembangan sistem pada kegiatan penyiapan proyek KPBU dan jumlah pelaksanaan kegiatan yang mendukung penyiapan proyek KPBU bisa dikatakan sudah memuaskan, akan tetapi masih ada responden yang merasakan bahwa output yang dihasilkan masih bisa ditingkatkan lagi dalam tahun-tahun berikutnya.

Jika dilihat dari bobot indikator 1 IKSP yang sebesar 30%, tingkat penerapan hasil mencapai poin 28,27 dari nilai maksimal yang sebesar 30,00. Hal ini menandakan Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PUPR sudah dijalankan dengan efektif dan efisien, namun masih ada ruang untuk dilakukan peningkatan mutu layanan sehingga mencapai tingkatan yang optimal.

Kontribusi hasil capaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan sebesar 100,80% juga turut mendukung **Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Strategi, dan Kebijakan** merupakan salah satu indikator di dalam Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya. Indikator Kinerja ini dihitung melalui penjumlahan dari indikator kontributor dengan bobot 30%. Metode perhitungannya dilakukan melalui *Survey Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan, dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan*.

Penetapan Indikator kinerja dikembangkan dari nilai-nilai pada dimensi *service quality* yang kemudian dihubungkan dengan masing-masing *scope* penilaian. Adapun dimensi *service quality* terdiri dari 5 (lima) nilai, yaitu; 1. *Reliability* (Keandalan); 2. *Reponsiveness* (Daya Tanggap); 3. *Assurance* (Kepastian); 4. *Emphaty* (Empati); 5. *Tangible* (berwujud). Dari 5 nilai tersebut terdapat batasan-batasan yang dinilai antara lain *Man, Method, Money, Resource, Time*. Seluruh Nilai beserta batasan kemudian dituangkan dalam Survey yang dimana pertanyaan-pertanyaan survey tersebut dibagi menjadi 3 kategori, yaitu; Perencanaan, Pelaksanaan dan *Outcomes*.

Berdasarkan hasil pengumpulan kuisioner dari 30 responden, maka didapatkan hasil berikut ini:

Tabel 4. 4 Hasil Survey Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kategori	Jumlah Pertanyaan	Nilai (%)	Bobot 30%
Perencanaan	7	94,10	28,38
Pelaksanaan	6	94,11	
Outcomes	6	95,67	
Nilai Total Survey	19	94,60	

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan hasil kuisioner, hasil dari masing-masing kategori memiliki nilai yang saling berdekatan terutama pada kategori perencanaan dan kategori pelaksanaan. Adapun kategori yang memiliki nilai yang paling tinggi adalah *outcomes*, pada kategori *outcomes* hal-hal yang dinilai berkaitan dengan keselarasan antara kebijakan dan strategi yang disusun dengan tujuan serta kebijakan yang ada dapat menyelesaikan permasalahan, memenuhi kebutuhan, dan membantu pelaksanaan pembiayaan infrastruktur bidang PUPR.

4.2. REALISASI ANGGARAN

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan di Tahun Anggaran 2021 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 27.878.008.000 dengan rincian realisasi keuangan sebesar 85,14% dan realisasi fisik sebesar 100%. Secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 5 Realisasi Anggaran Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2021

KODE	PAKET KEGIATAN	VOL	SATUAN	PAGU (Ribu)	Realisasi (Ribu)	REALISASI (%)	
						KEU	FISIK
4195	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			32.743.044	27.878.008	85,14	100
KRO	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	8	Rekomendasi Kebijakan	23.902.188	20.586.885	86,13	100
RO	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	3	Rekomendasi	11.627.128	10.686.495	90,25	100
Komponen	Pengembangan Kapasitas dan Reformasi Kebijakan Pembiayaan Sekunder Perumahan	1	Rekomendasi	2.414.415	2.414.415	100	100
Komponen	PPP Affordable Housing	1	Rekomendasi	2.589.298	1.949.715	75,3	100
Komponen	Grand Design Housing dan Real Estate Information System (HREIS)	1	Rekomendasi	6.623.415	6.322.365	95,45	100
RO	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	5	Rekomendasi	10.555.197	8.182.829	94,47	100
Komponen	Penyusunan Rencana Kerja Direktorat TA 2022	1	Rekomendasi	440.435	439.885	99,88	100
Komponen	Penyusunan Rencana Umum Proyek KPBU TA 2022	1	Rekomendasi	461.800	460.823	99,79	100
Komponen	PMC Firm to Support DGIF for Public Works and Housing with Implementation of The Accelerating Infrastructure Delivery Through Better Engineering Services Project (ESP)	1	Rekomendasi	8.818.301	6.449.396	73,14	100
Komponen	Koordinasi Simpul KPBU Kementerian PUPR TA. 2021	1	Rekomendasi	411.472	409.990	99,64	100
Komponen	Koordinasi Kerja Sama dan Kemitraan Direktorat Jenderal	1	Rekomendasi	423.189	422.735	99,89	100
RO	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4	Rekomendasi	1.719.863	1.717.561	99,87	100
Komponen	Penyusunan Profil Risiko dan Pola Penanganan Risiko Program Strategis/Proyek Prioritas Bidang Jalan dan Jembatan	1	Rekomendasi	431.588	430.786	99,81	100

KODE	PAKET KEGIATAN	VOL	SATUAN	PAGU (Ribu)	Realisasi (Ribu)	REALISASI (%)	
						KEU	FISIK
Komponen	Penyusunan Profil Risiko dan Pola Penanganan Risiko Program Strategis/Proyek Prioritas Bidang Sumber Daya Air	1	Rekomendasi	360.747	360.605	99,96	100
Komponen	Penyusunan Profil Risiko dan Pola Penanganan Risiko Program Strategis/Proyek Prioritas Bidang Perumahan	1	Rekomendasi	422.667	421.775	99,79	100
Komponen	Penyusunan Profil Risiko dan Pola Penanganan Risiko Program Strategis/Proyek Prioritas Bidang Permukiman	1	Rekomendasi	504.861	504.395	99,91	100
KRO	Koordinasi	1	Kegiatan	5.165.492	3.618.839	70,06	100
RO	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Bidang Pembiayaan Perumahan	1	Kegiatan	5.165.492	3.618.839	70,06	100
Komponen	Jasa Layanan Konsultan Advisory untuk Komite Pengelola Proyek (PMC) NAHP	1	Kegiatan	5.165.492	3.618.839	70,06	100
KRO	Layanan Data dan Informasi	4	Layanan	1.510.000	1.508.699	99,92	100
RO	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4	Layanan	1.510.000	1.508.699	99,92	100
Komponen	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Bidang Pembiayaan IPUP Tahun 2021	1	Layanan	367.000	366.737	99,93	100
Komponen	Pengelolaan Akreditasi dan Sertifikasi Badan Usaha Pengembang Perumahan Tahun 2021	1	Layanan	369.000	368.325	99,82	100
Komponen	Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan IPUP Tahun 2021	1	Layanan	400.000	399.827	99,96	100
Komponen	Layanan Informasi Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021	1	Layanan	374.000	373.810	99,95	100
KRO	Layanan Pengawasan Internal	3	Laporan	1.211.543	1.209.821	99,85	100
RO	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	Laporan	1.211.543	1.209.821	99,85	100,00

KODE	PAKET KEGIATAN	VOL	SATUAN	PAGU (Ribu)	Realisasi (Ribu)	REALISASI (%)	
						KEU	FISIK
Komponen	Penyusunan Dokumen Kelayakan Bisnis dan Dokumen Pengadaan Badan Usaha Proyek Infrastruktur Strategis/Priotas Rintisan dan Multi Sektoral	1	Laporan	489.303	488.796	99,90	100
Komponen	Layanan Kepatuhan Intern Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	Laporan	363.807	363.448	99,90	100
Komponen	Penyusunan Profil Kepatuhan Intern di Bidang Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	Laporan	358.433	357.577	99,76	100
KRO	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3	Laporan	953.821	953.765	99,99	100
RO	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3	Laporan	953.821	953.765	99,99	100
Komponen	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Bidang PUPR	1	Laporan	357.894	357.893	100	100
Komponen	Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	Laporan	341.179	341.134	99,99	100
Komponen	Penyusunan Profil Kinerja Pengembangan Sistem dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	Laporan	254.748	254.738	100	100

Sumber : *emonitoring.pu.go.id* (31 Desember 2021)





Pengelolaan Akreditasi dan Sertifikasi Badan Usaha Pengembang Perumahan Tahun 2021







Poin diskusi utama

Elemen Studi OBC	Topik	1	2	3	4	5	6	7
1. Analisis Permintaan dan Pemangku Kepentingan	Penentuan posisi proyek	1. Apa saja strategi untuk meningkatkan nilai proposition rumah susun terutama Rusunawa untuk menarik sasaran pengguna, misal pekerja pabrik? (cth. kerja sama strategis dengan kawasan industri dalam penyediaan shuttle bus atau fasilitas lain)	2. Apa saja strategi untuk dapat menarik persepsi sasaran pengguna terhadap rumah susun?	3. Apakah hak atas bangunan yang sesuai untuk proyek rumah susun di atas BMN?	4. Apa saja langkah untuk meningkatkan penerimaan SKBG di masyarakat?	5. Unit komersial SHMSRS dapat mensubsidi silang Rusunawa & Rusunami SKBG. Bagaimana kemungkinan SHMSRS di atas BMN? Apa saja kebijakan yang mungkin dapat diambil untuk memungkinkan SHMSRS di atas BMN?	6. Apakah unit hunian komersial sewa memungkinkan untuk dibangun di atas BMN?	7. Apakah HGB di atas HPL dapat sesuai untuk lahan BMN (catatan: HGB dapat dijadikan kolateral)?
2. Hukum dan Regulasi	Kerangka regulasi	1. Bagaimana kelayakan pembangunan fly over KA sebagai akses utama?	2. Apa strategi untuk mengurangi biaya fly over? Apa implikasi ketika biaya fly over dikurangi?	3. Apakah ada alternatif lain sebagai akses utama ke lokasi proyek?	4. Bagaimana memastikan agar bangunan bertingkat tinggi dan rumah susun umum bekerja dengan baik?	5. Bagaimana memastikan konfigurasi/proporsi unit yang seimbang dan optimal untuk berbagai produk (Rusunawa, Rusunami, komersial)?	6. Bagaimana menyeimbangkan antara besaran subsidi dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan?	7. Bagaimana mengurangi besaran kontribusi pemerintah untuk meningkatkan Value for Money?
3. Analisis Lahan, Sosial, dan Lingkungan	Dampak sosial	1. Bagaimana memastikan konfigurasi/proporsi unit yang seimbang dan optimal untuk berbagai produk (Rusunawa, Rusunami, komersial)?	2. Bagaimana menyeimbangkan antara besaran subsidi dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan?	3. Bagaimana mengurangi besaran kontribusi pemerintah untuk meningkatkan Value for Money?	4. Bagaimana memastikan konfigurasi/proporsi unit yang seimbang dan optimal untuk berbagai produk (Rusunawa, Rusunami, komersial)?	5. Bagaimana menyeimbangkan antara besaran subsidi dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan?	6. Bagaimana mengurangi besaran kontribusi pemerintah untuk meningkatkan Value for Money?	7. Bagaimana memastikan konfigurasi/proporsi unit yang seimbang dan optimal untuk berbagai produk (Rusunawa, Rusunami, komersial)?
4. Operasional	Infrastruktur dan utilitas	1. Bagaimana memastikan konfigurasi/proporsi unit yang seimbang dan optimal untuk berbagai produk (Rusunawa, Rusunami, komersial)?	2. Bagaimana menyeimbangkan antara besaran subsidi dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan?	3. Bagaimana mengurangi besaran kontribusi pemerintah untuk meningkatkan Value for Money?	4. Bagaimana memastikan konfigurasi/proporsi unit yang seimbang dan optimal untuk berbagai produk (Rusunawa, Rusunami, komersial)?	5. Bagaimana menyeimbangkan antara besaran subsidi dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan?	6. Bagaimana mengurangi besaran kontribusi pemerintah untuk meningkatkan Value for Money?	7. Bagaimana memastikan konfigurasi/proporsi unit yang seimbang dan optimal untuk berbagai produk (Rusunawa, Rusunami, komersial)?
5. Analisis Teknis	Estimasi biaya OBM	1. Bagaimana memastikan konfigurasi/proporsi unit yang seimbang dan optimal untuk berbagai produk (Rusunawa, Rusunami, komersial)?	2. Bagaimana menyeimbangkan antara besaran subsidi dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan?	3. Bagaimana mengurangi besaran kontribusi pemerintah untuk meningkatkan Value for Money?	4. Bagaimana memastikan konfigurasi/proporsi unit yang seimbang dan optimal untuk berbagai produk (Rusunawa, Rusunami, komersial)?	5. Bagaimana menyeimbangkan antara besaran subsidi dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan?	6. Bagaimana mengurangi besaran kontribusi pemerintah untuk meningkatkan Value for Money?	7. Bagaimana memastikan konfigurasi/proporsi unit yang seimbang dan optimal untuk berbagai produk (Rusunawa, Rusunami, komersial)?
6. Analisis Keuangan dan Risiko	Estimasi biaya proyek	1. Bagaimana memastikan konfigurasi/proporsi unit yang seimbang dan optimal untuk berbagai produk (Rusunawa, Rusunami, komersial)?	2. Bagaimana menyeimbangkan antara besaran subsidi dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan?	3. Bagaimana mengurangi besaran kontribusi pemerintah untuk meningkatkan Value for Money?	4. Bagaimana memastikan konfigurasi/proporsi unit yang seimbang dan optimal untuk berbagai produk (Rusunawa, Rusunami, komersial)?	5. Bagaimana menyeimbangkan antara besaran subsidi dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan?	6. Bagaimana mengurangi besaran kontribusi pemerintah untuk meningkatkan Value for Money?	7. Bagaimana memastikan konfigurasi/proporsi unit yang seimbang dan optimal untuk berbagai produk (Rusunawa, Rusunami, komersial)?
7. Bentuk PPP, Dukungan Pemerintah, dan Pengadaan	Analisis risiko secara umum	1. Bagaimana memastikan konfigurasi/proporsi unit yang seimbang dan optimal untuk berbagai produk (Rusunawa, Rusunami, komersial)?	2. Bagaimana menyeimbangkan antara besaran subsidi dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan?	3. Bagaimana mengurangi besaran kontribusi pemerintah untuk meningkatkan Value for Money?	4. Bagaimana memastikan konfigurasi/proporsi unit yang seimbang dan optimal untuk berbagai produk (Rusunawa, Rusunami, komersial)?	5. Bagaimana menyeimbangkan antara besaran subsidi dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan?	6. Bagaimana mengurangi besaran kontribusi pemerintah untuk meningkatkan Value for Money?	7. Bagaimana memastikan konfigurasi/proporsi unit yang seimbang dan optimal untuk berbagai produk (Rusunawa, Rusunami, komersial)?



PPP Affordable Housing

Temuan utama dari Tinjauan terhadap Laporan CPS Karawang Spuur

- Tinjauan CPS menunjukkan kelayakan proyek berada di kategori rendah-sedang terutama karena kurangnya analisis permintaan dan pasar dan kondisi lahan yang terbatas untuk memaksimalkan ukuran proyek.
- Strategi untuk merancang proyek secara "project package" ke dalam beberapa lokasi di sekitarnya akan menjadi poin diskusi utama

Elemen OBC/ FBC	Penilaian	Informasi yang Tersedia di CPS	Analisis Lebih Lanjut yang Diperlukan dalam OBC
1. Analisis Permintaan dan Pemangku Kepentingan	Signifikan	- Kesesuaian dengan RTRW (RTRW sedang direvisi) - Penempatan posisi proyek, pemetaan pemangku kepentingan, konsultasi publik - Pra-RDS dan penilaian awal terhadap pasar. Permintaan terhadap rumah susun rendah*	- Kesesuaian dengan revisi RTRW, RDTR, dan RP3KP - Analisis terkait posisi kawasan industri - Analisis konjolin untuk penilaian pasar dan RDS
2. Hukum dan Regulasi	Sedang	- Regulasi dan undang-undang terkait - Penentuan tarif tidak konsisten untuk segmen yang berbeda	- Dampak hak uji materi UU Cipta Kerja - Klarifikasi terhadap regulasi penentuan tarif
3. Lahan, Sosial, dan Lingkungan	Signifikan	- Lahan proyek relatif kecil, salah satunya dikarenakan adanya garis sempadan SUTT** - Akses melalui gerbang Kampung Budaya - Potensi konflik penyediaan lahan makam - Risiko banjir (sering terjadi genangan, banjir terakhir tahun 2014)	- Klarifikasi akses menuju lokasi proyek terkait gerbang Kampung Budaya - Penyelesaian konflik terkait penyediaan lahan makam - Langkah mitigasi risiko banjir
4. Operasional	Sedang	- Daftar fasilitas, utilitas, dan infrastruktur yang dibutuhkan; kepemilikan aset; dan OPEX - Potensi kerja sama dengan Kampung Budaya	Klarifikasi dan analisis terkait detail kerja sama dengan Kampung Budaya, misal pemangku kepentingan, jenis aktivitas, jangka waktu, dll
5. Analisis Teknis	Sedang	- Spesifikasi keluaran secara umum (desain teknis) - Bangunan dengan 27 lantai mungkin tidak layak secara finansial untuk Rusunawa	- Pengaturan akses terhadap fasilitas Rusun - Konfigurasi masa bangunan yang optimal dari segi kelayakan finansial dan permintaan
6. Analisis Keuangan dan Risiko	N/A	N/A	Analisis finansial dan VM yang mendalam
7. Bentuk PPP, Dukungan Pemerintah, Pengadaan	N/A	N/A	Rekomendasi modalitas KPBU (skema proyek, lingkup, dan jangka waktu)

Signifikan Terdapat gap yang signifikan: *) Tipe A: Analisis yang ada belum cukup dan masih memerlukan tambahan informasi penting; **) Tipe B: Terdapat gap yang signifikan terkait kelayakan proyek

Sedang Terdapat sejumlah gap: Analisis secara umum sudah cukup, tetapi ada sejumlah gap yang perlu diatasi

Minor Ditemukan sedikit gap: Analisis sudah baik dan hanya ada sedikit gap

N/A Tidak tersedia: Laporan belum mencapai tahap OBC dan beberapa elemennya belum dinilai

Temuan utama dalam OBC Desa Besar Medan

Secara keseluruhan, tinjauan OBC menunjukkan kelayakan proyek berada di kategori sedang dengan beberapa analisis untuk disempurnakan lebih lanjut di FBC. Memastikan proyek layak secara ekonomi dan layak secara finansial akan menjadi poin diskusi utama.

Elemen OBC/FBC	Penilaian	Informasi yang Tersedia di OBC	Analisis Lebih Lanjut yang Diperlukan dalam FBC
1. Analisis Permintaan dan Pemangku Kepentingan	Sedang	- Penentuan posisi proyek dan analisis pemangku kepentingan - RDS dan analisis pasar - Tidak ada permintaan untuk Rusunami - Bendahara permintaan dari pekerja pabrik untuk rumah susun	- Elaborasi keseluruhan dengan rencana lokal - Analisis nilai proposition Rusunami - Elaborasi strategi nilai proposition nilai rumah susun bagi pekerja pabrik
2. Hukum dan Regulasi	Minor	- Daftar peraturan terkait yang mempengaruhi Omnibus Law - Uji dan prosedur yang diperlukan	Elaborasi beberapa dasar hukum yang terkait dengan BIUP
3. Lahan, Sosial, dan Lingkungan	Sedang	- Kesesuaian lokasi, misalnya status, kepemilikan, beberapa pengaruh lain, masalah kelayakan - Analisis dampak lingkungan	- Elaborasi tentang bagaimana meningkatkan kelayakan, misalnya kelayakan dengan rencana transportasi masa depan dan rencana pengembangan wilayah - Melakukan pembaruan lahan
4. Operasional	Sedang	- Keperluan aset dan biaya OBM - Risiko akses air yang terbatas - Sambungan pipa utilitas di bawah rel	- Elaborasi tentang akses air alternatif - Klarifikasi untuk menghubungkan pipa utilitas, misalnya sinkronisasi ke PT KMI atau pemangku kepentingan terkait
5. Analisis Teknis	Sedang	- Spesifikasi produk dan biaya teknis - Dimensi fly over dengan biaya konstruksi yang besar	- Klarifikasi rencana perluasan ke lantai atas - Strategi penanganan biaya fly over
6. Analisis Keuangan dan Risiko	Sedang	- Penilaian makro risiko - Analisis keuangan dan ekonomi	- Penyempurnaan analisis keuangan dan VM - Analisis biaya-manfaat yang lebih mendalam
7. Bentuk PPP, Dukungan Pemerintah, dan Pengadaan	Minor	- Open modulus PPP - Informasi dukungan dan jaminan pemerintah	Pengaturan pasar untuk memperjelas minat dari sektor swasta

Signifikan Terdapat gap yang signifikan: *) Tipe A: Analisis yang ada belum cukup dan masih memerlukan tambahan informasi penting; **) Tipe B: Terdapat gap yang signifikan terkait kelayakan proyek

Sedang Terdapat sejumlah gap: Analisis secara umum sudah cukup, tetapi ada sejumlah gap yang perlu diatasi

Minor Ditemukan sedikit gap: Analisis sudah baik dan hanya ada sedikit gap

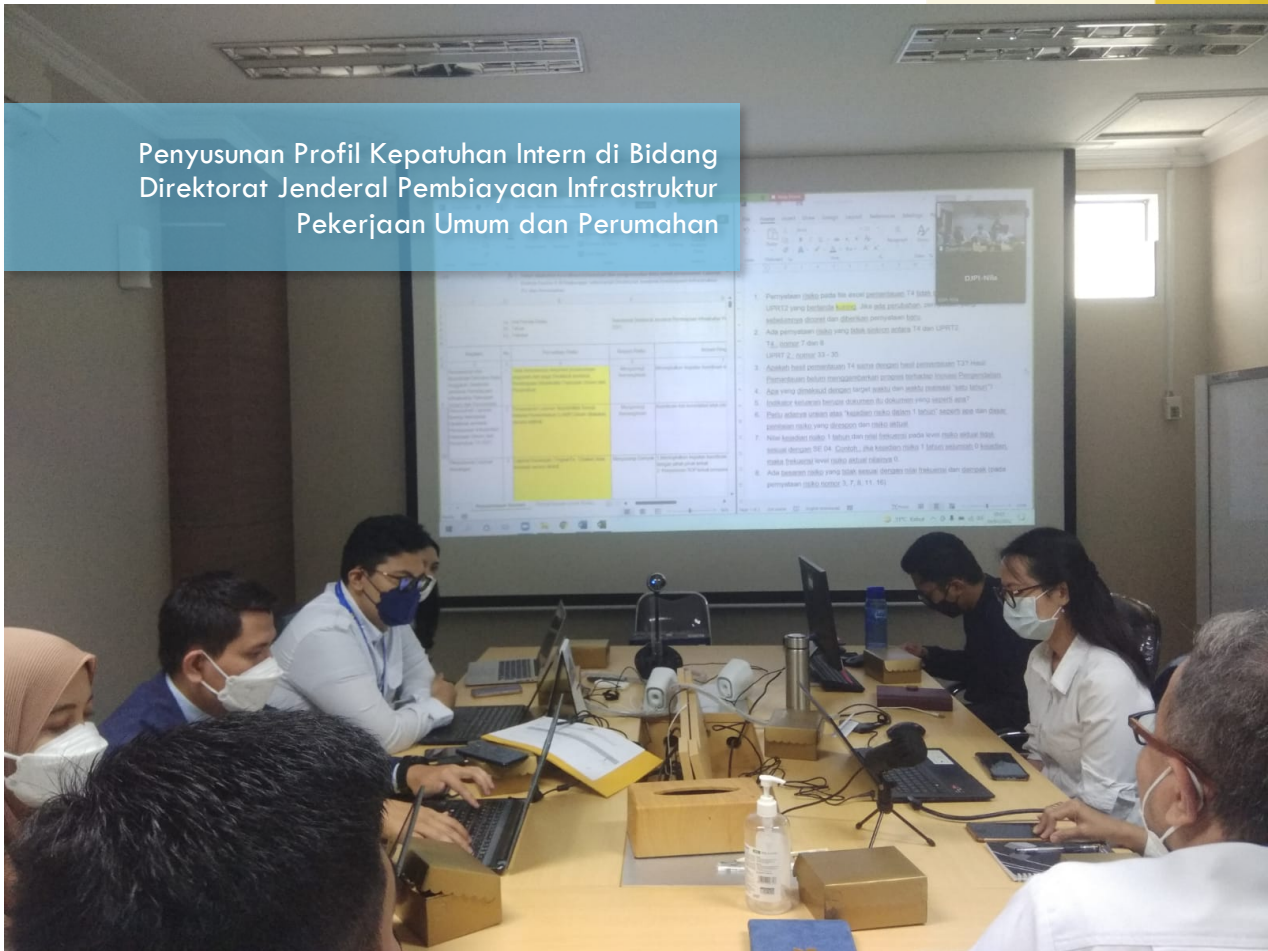
N/A Tidak tersedia: Laporan belum mencapai tahap OBC dan beberapa elemennya belum dinilai



**Penyusunan Rencana Kerja
Direktorat TA 2022**



Penyusunan Profil Kepatuhan Intern di Bidang
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan



Penyusunan Profil Risiko dan Pola Penanganan Risiko
Program Strategis/Proyek Prioritas Bidang Permukiman





4.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

4.3.1. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021

Berdasarkan data hasil capaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA 2020 dan TA 2021 pada Tabel 4.6 diketahui bahwa terjadi peningkatan kinerja dengan persentase sebesar 2,67% dari nilai perolehan 98,13% menjadi 100,80%. Hal demikian menunjukkan bahwa pada TA 2021, realisasi kinerja berada pada nilai positif dan melampaui target 100% atau surplus sebesar 0,80%.

Tabel 4. 6 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi (%)	
					2020	2021
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	100	98,13	100,80

Sumber : data diolah, 2021

4.3.2. PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021

Pada Tabel 4.7, struktur DIPA TA 2020 memiliki perbedaan signifikan dengan DIPA TA 2021. Hal ini disebabkan DIPA TA 2020 ditetapkan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya finalisasi Renstra Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA 2020-2024, sehingga perlu mendesain kembali terkait perencanaan dan penganggaran.

Pada Tahun 2020, paket kegiatan Layanan Pengawasan Internal belum mulai dilaksanakan, sedangkan di Tahun 2021, paket kegiatan ini sudah berjalan dan memberikan kontribusi sebesar 99,86%. Adapun pada Tahun 2021, Paket kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dan Penyusunan NSPK Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan tidak dilaksanakan karena dalam Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024 tidak tercantum target Tahun 2021.

Tabel 4. 7 Perbandingan Realisasi Anggaran Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020 dan Tahun 2021

KODE	PAKET KEGIATAN	2020			2021		
		PAGU (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	PERSENTASE (%)	PAGU (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	PERSENTASE (%)
4195	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	46.619.170	38.795.443	83,22%	32.743.044	27.878.009	85,14%
KRO	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	13.211.883	11.636.742	89%	23.902.188	20.586.885	86,13%
RO	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	5.536.848	4.487.891	81%	11.627.128	10.686.495	91,91%
RO	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.453.339	4.263.525	96%	10.555.197	8.182.829	77,52%
RO	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.221.696	2.885.326	90%	1.719.863	1.717.561	99,87%
KRO	Koordinasi	7.114.865	4.696.463	66%	5.165.492	3.618.839	70,06%
RO	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Bidang Pembiayaan Perumahan	7.114.865	4.696.463	66%	5.165.492	3.618.839	70,06%
KRO	Layanan Data dan Informasi	11.456.983	9.660.726	84%	1.510.000	1.508.699	99,91%
RO	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	11.456.983	9.660.726	84%	1.510.000	1.508.699	99,91%
KRO	Layanan Pengawasan Internal	-	-	0%	1.211.543	1.209.821	99,86%
RO	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	-	0%	1.211.543	1.209.821	99,86%
KRO	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3.591.496	3.485.277	97%	953.821	953.765	100%

KODE	PAKET KEGIATAN	2020			2021		
		PAGU (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	PERSENTASE (%)	PAGU (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	PERSENTASE (%)
RO	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.591.496	3.485.277	97%	953.821	953.765	100%
KRO	Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1.014.646	980.896	97%	-	-	0%
RO	Koordinasi Simpul KPBU Kementerian PUPR TA. 2020	561.269	540.143	96%	-	-	0%
RO	Identifikasi dan Seleksi Proyek Potensial KPBU Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2021	453.377	440.753	97%	-	-	0%
KRO	Penyusunan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	9.229.297	7.361.385	80%	-	-	0%
RO	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	725.722	688.703	95%	-	-	0%
RO	Penyusunan Kriteria Proyek Strategi Nasional (PSN) Pembiayaan Infrastruktur PUPR	800.000	795.344	99%	-	-	0%
RO	Penyusunan Standar dan Kriteria Bidang Pembiayaan Perumahan	7.703.575	5.877.338	76%	-	-	0%
KRO	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.000.000	973.954	97%	-	-	0%
RO	Operasional Direktorat	1.000.000	973.954	97%	-	-	0%

Sumber : *emonitoring.pu.go.id* (31 Desember 2021)

4.3.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAN RENSTRA 2020-2024

Pembandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 dilakukan untuk mengetahui respon terhadap 8 (delapan) output kegiatan yang telah diperjanjikan untuk mencapai sasaran kegiatan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan yakni meningkatkan pelaksanaan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh informasi bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, 2020 sampai dengan 2021 persentase realiasi kinerja terhadap target Renstra 2020-2024 menunjukkan kinerja yang positif. 3 (tiga) dari 8 (delapan) output kegiatan yakni 1) Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan, 2) Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Pembiayaan Perumahan dan 3) Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah merealisasikan lebih dari 50%. Sehingga dengan skenario optimis dalam periode waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, 2022 hingga 2024 mampu merealisasikan angka 100% dengan nilai anggaran sebesar Rp160.063.000.000. Berikut pada tabel dibawah ini merupakan perbandingan capaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dengan Target Renstra 2020-2024.

Tabel 4. 8 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dengan Target Renstra 2020-2024

NO	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA 2020-2024	REALISASI (%)			PERSENTASE (%)
				2020	2021	TOTAL	
1	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	3	1	3	4	133%
2	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	29	7	5	12	41%
3	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	29	5	4	9	31%
4	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	NSPK	5	2	0	2	40%
5	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	1	1	1	2	200%
6	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	12	0	3	3	25%
7	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	20	5	4	9	45%
8	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	19	7	3	10	53%

Sumber : *emonitoring.pu.go.id* (31 Desember 2021)

4.4. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUATAN TERHADAP LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN

4.4.1. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUATAN TERHADAP LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN TAHUN SEBELUMNYA (2020)

Tabel 4. 9 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Evaluatan Terhadap Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lama dan baru Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan agar terlaksananya <i>whole of government</i> antar unit kerja.	Telah melaksanakan rapat koordinasi dengan unit kerja yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terkait tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.
2	Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan agar penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai rencana.	Melaksanakan rapat progres penyerapan anggaran yang dilaksanakan oleh Satker setiap awal bulan pada tahun anggaran 2021.
3	Peningkatan Mutu baik dari segi kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta peningkatan kompetensi secara berkelanjutan bagi pegawai baik PNS maupun non PNS.	Mengikutsertakan pegawai PNS dan non PNS dalam diklat teknis maupun non teknis yang diselenggarakan oleh BPSDM PUPR dan lembaga pelatihan lainnya.
4	Menyusun revisi reuiu renstra tingkat eselon II di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.	Penyusunan reuiu renstra tingkat eselon II akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

4.4.2. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUATAN TERHADAP IMPLEMENTASI SAKIP DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN TAHUN SEBELUMNYA (2020)

Tabel 4. 10 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Evaluatan Terhadap Implementasi Sakip Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020

No.	Kriteria Evaluasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	Perlu menyampaikan usulan terkait mekanisme reuiu terhadap Dokumen Renstra	Telah melaksanakan rapat usulan reuiu renstra pada tanggal 15 April 2021
		Perlu dilakukan reuiu terhadap Dokumen Renstra tingkat Eselon II secara berkala, agar terdapat keselarasan antara Dokumen Renstra dengan Perjanjian Kinerja	Telah melaksanakan rapat usulan reuiu renstra pada tanggal 15 April 2021
2	Pengukur Kinerja	Perlu dirumusan mekanisme pemberian <i>reward</i> & <i>punishment</i> berdasarkan hasil pengukuran kinerja	Menunggu aturan yang ada dari BPSDM terkait pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>
		Perlu melakukan monitoring secara berkala terhadap target kinerja sampai staf	Sudah dilaksanakan monitoring berkala terhadap target kinerja pegawai sampai dengan staf oleh bagian kepegawaian
3	Pelaporan Kinerja	Informasi yang ada pada laporan kinerja perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan pelaksanaan kegiatan organisasi	Sudah melaksanakan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan kegiatan dengan rencana aksi
4	Evaluasi Kinerja	Perlu ada tindak lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan perencanaan	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sudah ditindak lanjuti dengan perbaikan perencanaan di renja TA 2022
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	Capaian kinerja output dan outcome perlu ditingkatkan lebih baik dari tahun sebelumnya	Tahun 2021 capaian kinerja Direktorat PSSPP sudah meningkat dari Tahun 2020

4.4.3. ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI DI TAHUN ANGGARAN 2021

Sepanjang Tahun 2021, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mengupayakan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja melalui:

1. Penggunaan *Management Information System* (MIS) KPBU sebagai alat kontrol pimpinan untuk melihat progres proyek KPBU Kementerian PUPR;
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui *e-monitoring*, *e-sakip*, *e-kinerja* serta pengelolaan data terkait kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan seperti SiKasep, SiKumbang dan SiPetruk;
3. Pengoptimalisasian pemanfaatan aplikasi dan media komunikasi berbasis teknologi informasi, antara lain *Google Working Space*, *Zoom Meeting*, *Cisco Webex*, dan *Whatsapp* yang memudahkan konektivitas kerja yang saat ini sering dilakukan secara *hybrid*; dan
4. Dari sisi anggaran, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan berupaya sangat efektif dan efisien dalam mencapai *outcome*. Hal ini dilihat dari total realisasi anggaran yang mampu mencapai 85,14% atau setara dengan Rp.27.878.008.000,00.



BAB 5

PENUTUP



5.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2021 merupakan laporan pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja antara Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2021.

Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2021 berisi akuntabilitas kinerja yang merupakan capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja ini telah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan analisis akuntabilitas kinerja, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2021 mampu mencapai kinerja sebesar **100,80%**. Hal demikian didasarkan pada persentase atas realisasi indikator kinerja yang melebihi target yang tertera pada Renstra Direktorat TA 2020-2024. Berdasarkan capaian realisasi anggaran Tahun 2021, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan berhasil meraih nilai sebesar **84,50%** dari target 100%. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan teridentifikasi beberapa kendala yang dihadapi untuk memenuhi target kinerja, antara lain:

- Adanya *refocussing* anggaran yang dilakukan beberapa kali menyebabkan proses penyerapan anggaran menjadi terhambat;

- Adanya penyerapan paket kontraktual yang tidak dapat terealisasi dikarenakan banyak kegiatan seperti rapat dan *survey* yang sepenuhnya tidak dapat dilakukan terkait dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sehingga realisasi anggaran tidak mencapai 100%; dan
- Penyesuaian waktu kerja dan terhambatnya koordinasi kerja antar pegawai di Direktorat PSSPP dan antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terkait penerapan sistem WFH (*work from home*).

5.2 REKOMENDASI

Dalam mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan tersebut dan untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan perlu melakukan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan kontraktual sesuai yang tercantum pada TOR dan RAB.
- Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan agar terlaksananya *whole of government* antar unit kerja;
- Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan agar penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai rencana;
- Peningkatan Mutu baik dari segi kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta peningkatan kompetensi secara berkelanjutan bagi pegawai baik PNS maupun non PNS; dan
- Menyusun revaluasi tingkat eselon II di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan secara komprehensif kepada pihak-pihak terkait. Serta sebagai masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022.

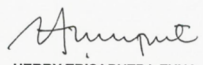


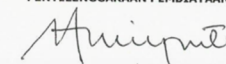
LAMPIRAN



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021		
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN		
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:		
Nama	: Herry Trisaputra Zuna	
Jabatan	: Direktur Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA		
Nama	: Eko D. Heripoerwanto	
Jabatan	: Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA		
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:		
1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.		
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.		
Jakarta, Januari 2021		
Pihak Kedua	Pihak Pertama	
		
EKO D. HERIPOERWANTO	HERRY TRISAPUTRA ZUNA	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021		
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN		
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		
SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2020	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	98,93%	100%
SK. Meningkatkan Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	98,13%	100%
SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	55,50%	63,35%
SK. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	100%	100%
KEGIATAN		
Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
ANGGARAN		
Rp21.127.189.000,00		
JAKARTA, JANUARI 2021		
DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	DIREKTUR PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN	
		
EKO D. HERIPOERWANTO	HERRY TRISAPUTRA ZUNA	

Perjanjian Kinerja Awal

PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Herry Trisaputra Zuna
 Jabatan : Direktorat Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Eko D. Heripoerwanto
 Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

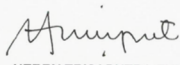
- Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Februari 2021
Pihak Pertama



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

REVISI

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2020	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	98,93%	100%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	98,13%	100%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	55,50%	63,35%
SK. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	100%	100%

KEGIATAN

Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN
 Rp14.080.661.000,00

JAKARTA, FEBRUARI 2021

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**



EKO D. HERIPOERWANTO

**DIREKTUR PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN**



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Perjanjian Kinerja Revisi ke-1

PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
 Jabatan : **Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan**
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
 Jabatan : **Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

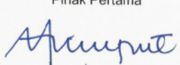
- Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, April 2021
Pihak Pertama



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

REVISI

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2020	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	98,93%	100%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	98,13%	100%

KEGIATAN

Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

ANGGARAN

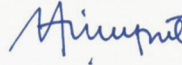
Rp25.073.281.000,00

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN



EKO D. HERIPOERWANTO

DIREKTUR PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Perjanjian Kinerja Revisi ke-2

PERJANJIAN KINERJA



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Agus Sulaeman**
 Jabatan : Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
 Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

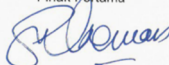
Pihak Kedua



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Jakarta, Agustus 2021

Pihak Pertama



AGUS SULAEMAN

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2020	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	98,93%	100%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	98,13%	100%

KEGIATAN

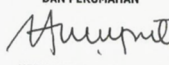
Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

ANGGARAN

Rp32.743.044.000,00

JAKARTA, AGUSTUS 2021

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

**DIREKTUR PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN**



AGUS SULAEMAN

Perjanjian Kinerja Revisi ke-3

RENCANA KERJA

[illegible]

RENCANA KERJA

[illegible]

RENCANA KERJA

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
	053 - Pelaksanaan Pengelolaan Konsultasi dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
01.EAK	Layanan Pengawasan Internal										3.000.000,0
01.EAK.001	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan								000 - Bukan Tematik		3.000.000,0
	051 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan										1.000.000,0
		Pusat	Pusat								1.000.000,0
	052 - Pelaksanaan Pelayanan dan Konsultasi Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan										1.000.000,0
		Pusat	Pusat								1.000.000,0
	053 - Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan										1.000.000,0
		Pusat	Pusat								1.000.000,0
01.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal										2.000.000,0
01.EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan								000 - Bukan Tematik		2.000.000,0

RENCANA KERJA

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan										900.000,0
		Pusat	Pusat								900.000,0
	052 - Penyusunan Laporan dan Informasi Pimpinan di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan										700.000,0
		Pusat	Pusat								700.000,0
	053 - Penyusunan Laporan Kinerja Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan										400.000,0
		Pusat	Pusat								400.000,0
Total											20.127.189,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				20.127.189,0				23.602.000,0	22.500.000,0	22.500.000,0
01.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	9	Rekomendasi Kebijakan		11.827.189,0				12.000.000,0	12.000.000,0	12.000.000,0
01.ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan				3.500.000,0				0,0	0,0	0,0
01.ABF.001.051	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan	1,0	Rekomendasi Kebijakan	900.000,0	900.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABF.001.052	Penyusunan Standar dan Kriteria Bidang Pembiayaan Perumahan	1,0	Rekomendasi Kebijakan	900.000,0	900.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABF.001.053	Pelaksanaan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Perumahan	1,0	Rekomendasi Kebijakan	1.700.000,0	1.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RENCANA KERJA

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01.ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				3.327.189,0				6.000.000,0	6.000.000,0	6.000.000,0
01.ABF.002.051	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2,0	Rekomendasi Kebijakan	800.000,0	1.600.000,0	2,0	2,0	2,0	2.500.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0
01.ABF.002.052	Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2,0	Rekomendasi Kebijakan	425.000,0	850.000,0	2,0	2,0	2,0	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
01.ABF.002.053	Pelaksanaan Pengembangan Sumber Dana dan Pola Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	0,0	Rekomendasi Kebijakan	NaN	0,0	1,0	1,0	1,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
01.ABF.002.054	Pelaksanaan Pengembangan Kemitraan dan Koordinasi Penyiapan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1,0	Rekomendasi Kebijakan	877.189,0	877.189,0	1,0	1,0	1,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
01.ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				5.000.000,0				6.000.000,0	6.000.000,0	6.000.000,0
01.ABF.003.051	Penyusunan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4,0	Rekomendasi Kebijakan	850.000,0	3.400.000,0	4,0	4,0	4,0	4.000.000,0	4.000.000,0	4.000.000,0
01.ABF.003.052	Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1,0	Rekomendasi Kebijakan	750.000,0	750.000,0	1,0	1,0	1,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
01.ABF.003.053	Pelaksanaan Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1,0	Rekomendasi Kebijakan	850.000,0	850.000,0	1,0	1,0	1,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
01.AEA	Koordinasi	1	kegiatan		1.300.000,0				1.102.000,0	0,0	0,0
01.AEA.001	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Bidang Pembiayaan Perumahan				1.300.000,0				1.102.000,0	0,0	0,0
01.AEA.001.051	Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan	1,0	Kegiatan	1.300.000,0	1.300.000,0	1,0	0,0	0,0	1.102.000,0	0,0	0,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	0	NSPK		0,0				2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0
01.AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				0,0				2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0
01.AFA.001.051	Penyusunan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	0,0	NSPK	NaN	0,0	1,0	1,0	1,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0
01.EAJ	Layanan Data dan Informasi	4	Layanan		2.000.000,0				3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0

RENCANA KERJA

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01.EAJ.001	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				2.000.000,0				3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0
01.EAJ.001.051	Pelaksanaan Pengelolaan Data Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2,0	Layanan	500.000,0	1.000.000,0	2,0	2,0	2,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
01.EAJ.001.052	Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1,0	Layanan	500.000,0	500.000,0	1,0	1,0	1,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
01.EAJ.001.053	Pelaksanaan Pengelolaan Konsultasi dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1,0	Layanan	500.000,0	500.000,0	1,0	1,0	1,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
01.EAK	Layanan Pengawasan Internal	3	Laporan		3.000.000,0				3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0
01.EAK.001	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				3.000.000,0				3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0
01.EAK.001.051	Pelaksanaan dan Pengelolaan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1,0	Laporan	1.000.000,0	1.000.000,0	1,0	1,0	1,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
01.EAK.001.052	Pelaksanaan Pelayanan dan Konsultasi Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1,0	Laporan	1.000.000,0	1.000.000,0	1,0	1,0	1,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
01.EAK.001.053	Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1,0	Laporan	1.000.000,0	1.000.000,0	1,0	1,0	1,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
01.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3	Laporan		2.000.000,0				2.500.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0
01.EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				2.000.000,0				2.500.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0
01.EAL.001.051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1,0	Laporan	900.000,0	900.000,0	1,0	1,0	1,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
01.EAL.001.052	Penyusunan Laporan dan Informasi Pimpinan di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1,0	Laporan	700.000,0	700.000,0	1,0	1,0	1,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0

RENCANA KERJA

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01.EAL.001.053	Penyusunan Laporan Kinerja Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1,0	Laporan	400.000,0	400.000,0	1,0	1,0	1,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0
Total					20.127.189,0	-	-	-	23.602.000,0	22.500.000,0	22.500.000,0

C. SUMBER PENDANAAN

[illegible]

RENCANA KERJA

[illegible]

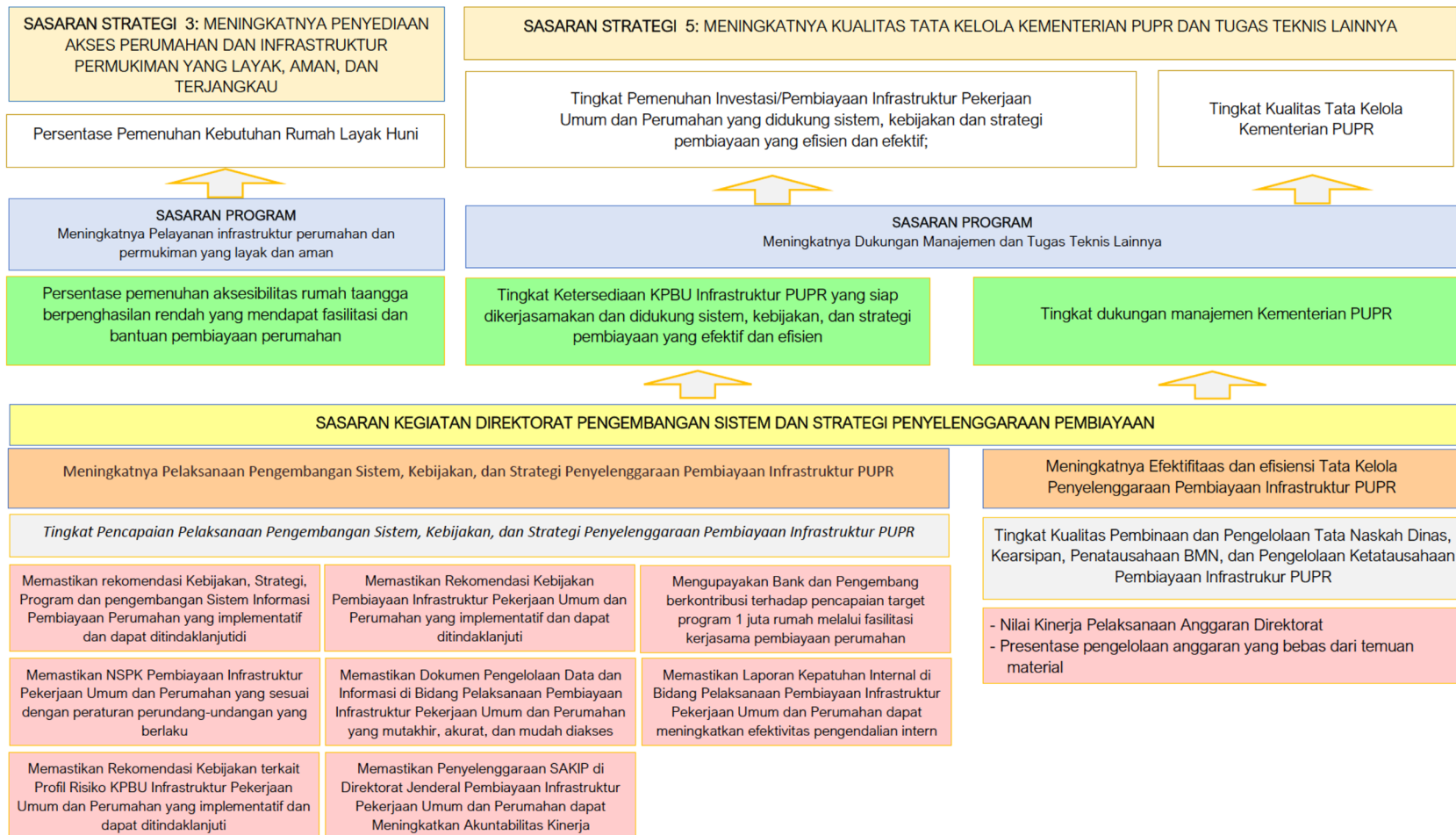
RENCANA KERJA

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.EAK.001.052	Pelaksanaan Pelayanan dan Konsultasi Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Utama	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
01.EAK.001.053	Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Utama	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
01.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0
01.EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0
01.EAL.001.051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Utama	900.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900.000,0
01.EAL.001.052	Penyusunan Laporan dan Informasi Pimpinan di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Utama	700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700.000,0
01.EAL.001.053	Penyusunan Laporan Kinerja Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Utama	400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
Total			15.277.189,0	0,0	4.850.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.127.189,0

Jakarta, 19 Juli 2020
Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

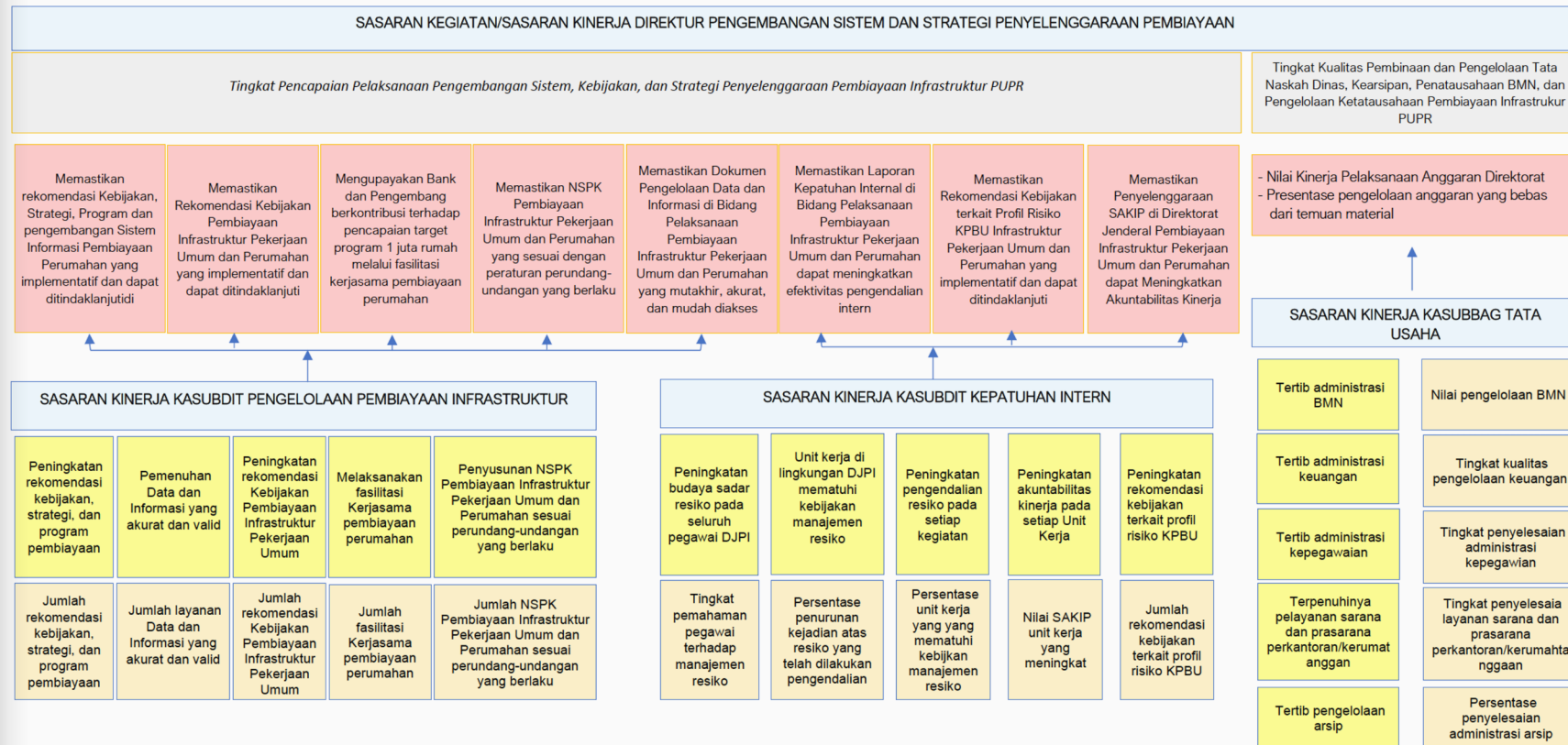
Ir. Herry Trisaputra Zuna, S.E., M.T.
NIP. 196705151996031001

POHON KINERJA



POHON KINERJA

Pohon Kinerja Unit Eselon III dan IV



POHON KINERJA

Matriks Pembagian Peran Dan Hasil Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur

NAMA DAN JABATAN PEGAWAI	INTERMEDIATE OUTCOME / PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA			
KEPALA SUB DIREKTORAT PENGELOLAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR	Rekomendasi Kebijakan, Strategi, Program dan pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan yang implementatif dan dapat ditindaklanjuti	Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang implementatif dan dapat ditindaklanjuti	Bank dan Pengembang berkontribusi terhadap pencapaian target program 1 juta rumah melalui fasilitasi kerjasama pembiayaan perumahan	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Tantra Rifai, Subkoordinator Bidang Tugas Kebijakan Pembiayaan yang merangkap sebagai JF Analisis Anggaran Ahli Muda	Draf Rekomendasi Kebijakan, Strategi, Program dan pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan yang akurat dan terselesaikan secara tepat waktu			Draf NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akurat, dan terselesaikan secara tepat waktu
Denik Haryani, Subkoordinator Bidang Tugas Strategi Pembiayaan yang merangkap sebagai JF Anggaran Ahli Muda		Draf Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang akurat dan terselesaikan secara tepat waktu	- materi fasilitasi disusun secara lengkap dan informatif. - Peserta memahami materi yang disampaikan - Peserta yang mengikuti fasilitasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan	
JF Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Data dan Informasi terkait Kebijakan, Strategi, Program dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan yang lengkap, mutakhir, dan informatif	Data dan Informasi terkait Kebijakan, Pembiayaan PUPR yang lengkap, mutakhir, dan informatif	- Data Bank dan Pengembang yang sesuai kriteria, lengkap, dan mutakhir - Data masukan, saran, dan keluhan dari peserta fasilitasi terdokumentasi secara lengkap dan mutakhir	Data dan Informasi mengenai Peraturan perundang-undangan terkait yang lengkap dan mutakhir
JF Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Data masukan, saran, dan keluhan terdokumentasi secara akurat dan reliable	Data masukan, saran, dan keluhan yang terdokumentasi secara akurat dan reliable	Pelaksanaan fasilitasi dievaluasi dan dilaporkan sebagai bahan peningkatan proses kerja selanjutnya.	Data masukan dan saran dari pengguna NSPK terdokumentasi secara berkala

POHON KINERJA

Matriks Koordinator Bidang Tugas Data dan Informasi

NAMA DAN JABATAN PEGAWAI	INTERMEDIATE OUTCOME / PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA
KOORDINATOR BIDANG TUGAS DATA DAN INFORMASI	Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang mutakhir dan akurat
Ervin Supriyanto, Subkoordinator Bidang Tugas Pengelolaan Data yang merangkap sebagai JF Statistis Ahli Muda	Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang lengkap, akurat dan terselesaikan secara tepat waktu
Satriadi Utomo, Subkoordinator Bidang Tugas Pengembangan Sistem Informasi yang merangkap sebagai JF Pranata Komputer Ahli Muda	Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang mudah diakses dan mutakhir
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	- Data KB2P yang terdokumentasi lengkap, mutakhir, dan dilaporkan secara berkala - Data SBUM yang terdokumentasi lengkap, mutakhir, dan dilaporkan secara berkala
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	- Rekapitulasi Data KB2P yang akurat dan mutakhir - Rekapitulasi Data SBUM yang akurat dan mutakhir

POHON KINERJA

Matriks Pembagian Peran Dan Hasil Sub Direktorat Kepatuhan Intern

NAMA DAN JABATAN PEGAWAI	INTERMEDIATE OUTCOME / PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA	
KEPALA SUB DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian intern	Rekomendasi Kebijakan terkait Profil Risiko KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang implementatif dan dapat ditindaklanjuti
Ary Rahman Wahyudi, Subkoordinator Bidang Tugas Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko yang merangkap JF Analis Kebijakan Ahli Muda		Draft Rekomendasi Kebijakan terkait Profil Risiko KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang akurat dan terselesaikan secara tepat waktu
Arum Prihati Musyarofa, Subkoordinator Bidang Tugas Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko yang merangkap sebagai JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Draft laporan kepatuhan intern DJPI yang akurat dan terselesaikan secara tepat waktu	
JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	- Data terkait pelaksanaan kepatuhan intern di DJPI yang terdokumentasi lengkap, mutakhir, dan dilaporkan secara berkala	- Data terkait proyek KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang terdokumentasi lengkap, mutakhir, dan dilaporkan secara berkala
JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	Data masukan dan saran tentang pelaksanaan kepatuhan intern di DJPI yang dilaporkan secara berkala	Data masukan dan saran tentang manajemen risiko proyek KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dilaporkan secara berkala

POHON KINERJA

Matriks Pembagian Peran Dan Hasil Koordinator Bidang Tugas Pemantauan dan Evaluasi

NAMA DAN JABATAN PEGAWAI	INTERMEDIATE OUTCOME / PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA
KOORDINATOR BIDANG TUGAS PEMANTAUAN DAN EVALUASI	• Penyelenggaraan SAKIP di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dapat Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
Adi Femiliandri, Subkoordinator Bidang Tugas Pemantauan dan Evaluasi Kinerja I, merangkap sebagai JF Analis Anggaran Ahli Muda	• Draft laporan kinerja DJPI yang akurat dan terselesaikan secara tepat waktu
Rina Nur Utami, Subkoordinator Bidang Tugas Pemantauan dan Evaluasi Kinerja II, merangkap sebagai JF Analis Anggaran Ahli Muda	• Draft laporan kinerja Dit. PSSPP yang akurat dan terselesaikan secara tepat waktu
JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	• Data pelaksanaan kinerja anggaran DJPI yang dilaporkan secara berkala • Data Pelaksanaan kinerja KPBU bidang Infrastruktur PUPR yang dilaporkan secara berkala
JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	• Data pelaksanaan kinerja penyaluran bantuan pembiayaan perumahan yang dilaporkan secara berkala

BERITA ACARA KESEPAKATAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7262535, (021) 7262535

BERITA ACARA KESEPAKATAN

NOMOR : 01/BA/PK/2022

CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN

Pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Pengembangan Sistem dan Sistem Penyelenggaraan Pembiayaan telah disepakati Berita Acara Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2021 dengan hasil sebagai berikut:

1. Capaian Realisasi Anggaran Masing-Masing Sub Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

No	Sasaran Program	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keuangan		Fisik		Capaian (%)
				RN (%)	RL (%)	RN (%)	RL (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur	28.857.817	23.817.629	100	82,53	100	100	100
2	Sub Direktorat Kepatuhan Intern	3.885.227	3.739.614	100	96,25	100	100	100
3	Tata Usaha	750.000	746.940	100	99,59	100	100	100
TOTAL		33.493.044	28.304.183	100	84,50	100	100	100

2. Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	100	100,80%

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Sistem Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2021. Atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan Terima kasih.

Jakarta, Januari 2022

Yang Menyepakati,

Kepala Sub Direktorat Pengelolaan
Pembiayaan Infrastruktur



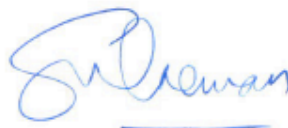
Fina Sjafinas

Kepala Sub Direktorat
Kepatuhan Intern



Andri Yusandra

Mengetahui,
Direktur



Agus Sulaeman

DIPA

DIPA AWAL



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (033) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2. Unit Organisasi | : | (16) | Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan |
| 3. Provinsi | : | (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode/Nama Satker | : | (631003) | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN |
| Sebesar | : | Rp. 200.821.494.000 | (DUA RATUS MILIAR DELAPAN RATUS DUA PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	185.821.494.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	15.000.000.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	15.000.000.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 185.821.494.000 | 2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH | (140) Rp. | 15.000.000.000 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|

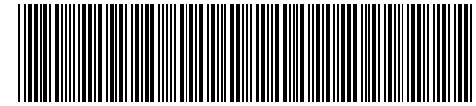
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021



DS:5798-3490-0622-3877

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	175.071.494.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	175.071.494.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	25.750.000.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	25.750.000.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021



Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	25.750.000.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	25.750.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	175.071.494.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	67.094.305.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	20.127.189.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	87.850.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



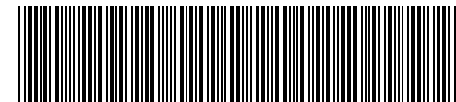
DS:5798-3490-0622-3877

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			25.750.000.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan			25.750.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	4,00	Rekomendasi Kebijakan	3.250.000.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	4,00	Rekomendasi Kebijakan	3.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK	750.000.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1,00	NSPK	750.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	2,00	Laporan	1.750.000.000
Rincian Output	:	01 EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	2,00	Laporan	1.750.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	500.000.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)	1,00	Kegiatan	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan	9.500.000.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1,00	Layanan	4.500.000.000
		02 QAH.002	Fasilitas Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	1,00	Layanan	5.000.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



DS:5798-3490-0622-3877

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	6	:	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	312,00	Rumah Tangga	10.000.000.000
Rincian Output		:	01	QFC.001 Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	312.00	Orang	10.000.000.000
Program		:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen			175.071.494.000
Kegiatan		:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			67.094.305.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
			7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP			
			8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4194.EAA	Layanan Perkantoran	3,00	Layanan	52.094.305.000
Rincian Output		:	01	EAA.004 Gaji dan Tunjangan DJPI	1.00	Layanan	26.292.062.000
			02	EAA.005 Operasionalisasi Kantor DJPI	1.00	layanan	20.802.243.000
			03	EAA.006 Opsionalisasi Kantor Direktorat	1.00	1	5.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	4,00	Layanan	2.690.000.000
Rincian Output		:	01	EAB.001 Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	1.00	laporan	890.000.000
			02	EAB.002 Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I	2.00	laporan	1.300.000.000
			03	EAB.003 Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI	1.00	laporan	500.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 3

Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal					Layanan	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EAC	Layanan Umum	3,00	Layanan 1.500.000.000
Rincian Output		:	01 EAC.002	Tata Kelola TNDE dan Arsip	1,00	laporan 500.000.000
		:	02 EAC.003	Kerumahtanggaan	2,00	laporan 1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EAD	Layanan Sarana Internal	2,00	unit 1.000.000.000
Rincian Output		:	01 EAD.003	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	1,00	unit 500.000.000
		:	02 EAD.004	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	1,00	unit 500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	1,00	unit 410.000.000
Rincian Output		:	01 EAE.001	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1,00	unit 410.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4194.EAF	Layanan SDM	260,00	orang 1.500.000.000
Rincian Output		:	01 EAF.001	Pengelolaan Pegawai	260,00	orang 1.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4194.EAG	Layanan Hukum	6,00	Layanan 2.700.000.000
Rincian Output		:	01 EAG.001	Advokasi Hukum	2,00	Layanan 800.000.000
		:	02 EAG.002	MoU dengan APH dan Instansi Lain terkait	1,00	Layanan 400.000.000
		:	03 EAG.003	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	3,00	Layanan 1.500.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



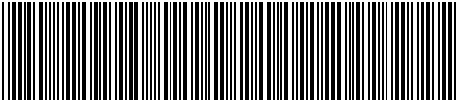
DS:5798-3490-0622-3877

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	8	:	4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3,00	Layanan	1.500.000.000
Rincian Output		:	01	EAH.001 Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	1.00	Layanan	300.000.000
		:	02	EAH.002 Manajemen Transformasi Organisasi	2.00	Layanan	1.200.000.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	4,00	Layanan	1.900.000.000
Rincian Output		:	01	EAI.001 Strategi Komunikasi	2.00	Layanan	1.100.000.000
		:	02	EAI.002 Publikasi	2.00	Layanan	800.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	1.800.000.000
Rincian Output		:	01	EAL.001 Laporan Keuangan Unit Eselon I	1.00	Laporan	500.000.000
		:	02	EAL.002 Laporan Kinerja Unit Eselon II	1.00	Laporan	300.000.000
		:	03	EAL.003 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	1.00	Laporan	1.000.000.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			20.127.189.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	11	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	9,00	Rekomendasi Kebijakan	11.827.189.000
Rincian Output		:	01	ABF.001 Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.500.000.000
		:	02	ABF.002 Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.327.189.000
		:	03	ABF.003 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	5.00	Rekomendasi Kebijakan	5.000.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



DS:5798-3490-0622-3877

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 5

Klasifikasi Rincian Output	12	:	4195.AEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	1.300.000.000
Rincian Output	:	01	AEA.001	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Bidang Pembiayaan Perumahan	1.00	Kegiatan	1.300.000.000
Klasifikasi Rincian Output	13	:	4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi	4,00	Layanan	2.000.000.000
Rincian Output	:	01	EAJ.001	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.00	Layanan	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	14	:	4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal	3,00	Laporan	3.000.000.000
Rincian Output	:	01	EAK.001	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.00	Laporan	3.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	15	:	4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	2.000.000.000
Rincian Output	:	01	EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.00	Laporan	2.000.000.000
Kegiatan	:	4197		Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			87.850.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01		Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
		2. 02		Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			
		3. 03		Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
		4. 04		Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	16	:	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	29,00	Rekomendasi Kebijakan	50.050.000.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.200.000.000
		02	ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.100.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 6

Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				Rekomendasi Kebijakan			
	03	ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	5,00	Rekomendasi Kebijakan	11.550.000.000	
	04	ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,00	Rekomendasi Kebijakan	700.000.000	
	05	ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000	
	06	ABF.006	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000.000	
	07	ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4,00	Rekomendasi Kebijakan	9.200.000.000	
	08	ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	3.500.000.000	
	09	ABF.009	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.800.000.000	
	10	ABF.010	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1,00	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000.000	
	11	ABF.011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2,00	Rekomendasi Kebijakan	5.500.000.000	
	12	ABF.012	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000	
	13	ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	500.000.000	
	14	ABF.014	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000	
	15	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	5.750.000.000	
	16	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	750.000.000	
Klasifikasi Rincian Output	17	4197.AEE	Kemitraan	21,00	Kesepakatan	22.396.000.000	
Rincian Output	:	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2,00	Kesepakatan	4.000.000.000
		02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	13,00	Kesepakatan	7.500.000.000
		03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	4,00	Kesepakatan	6.800.000.000
		04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	2,00	Kesepakatan	4.096.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

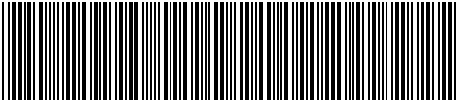
Halaman : I A. 7

Klasifikasi Rincian Output	18	:	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5,00	NSPK	3.700.000.000
Rincian Output	:	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	NSPK	1.200.000.000
		02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	1.000.000.000
		03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	500.000.000
		04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	19	:	4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	14,00	Laporan	11.704.000.000
Rincian Output	:	01	EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Laporan	950.000.000
		02	EAL.002	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	300.000.000
		03	EAL.003	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4.00	Laporan	6.500.000.000
		04	EAL.004	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Laporan	300.000.000
		05	EAL.005	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Laporan	2.200.000.000
		06	EAL.006	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Laporan	300.000.000
		07	EAL.007	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	854.000.000
		08	EAL.008	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	300.000.000

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021



DS:5798-3490-0622-3877

I B. SUMBER DANA

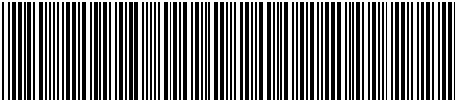
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	200.821.494.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	185.821.494.000		(2) RPLN	US\$	1.041.667	Rp.	15.000.000.000
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	15.000.000.000		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	ASIANDVELOPMENTB 3455-INO 1F1NDHGA	USD USD IDR	13,70 200.000,00	3	200.000			
2	1	INTERNATIONALBANK 8717-ID 1HG72SWA	USD USD IDR	1.013,70 14.800.000,00	3	14.800.000			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



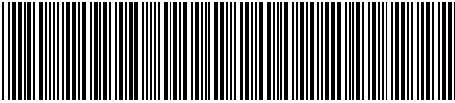
DS:5798-3490-0622-3877

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
 Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	26.292.062	173.119.432	1.410.000	-	-	200.821.494	01 . 54	
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	25.750.000	-	-	-	25.750.000		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	-	25.750.000	-	-	-	25.750.000		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	3.250.000	-	-	-	3.250.000		
01	RM	-	3.250.000	-	-	-	3.250.000		
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	750.000	-	-	-	750.000		
01	RM	-	750.000	-	-	-	750.000		
4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.750.000	-	-	-	1.750.000		
01	RM	-	1.750.000	-	-	-	1.750.000		
4976.PEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	500.000	-	-	-	500.000		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:5798-3490-0622-3877

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
 Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	500.000	-	-	-	500.000	139	RK 1HG72SWA
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	9.500.000	-	-	-	9.500.000	01 . 54	
01 RM		-	9.500.000	-	-	-	9.500.000	139	
4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	01 . 54	
02 PLN		-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	140	
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	26.292.062	147.369.432	1.410.000	-	-	175.071.494		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	26.292.062	39.392.243	1.410.000	-	-	67.094.305		
4194.EAA	Layanan Perkantoran (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	26.292.062	25.802.243	-	-	-	52.094.305	01 . 54	
01 RM		26.292.062	25.802.243	-	-	-	52.094.305	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.690.000	-	-	-	2.690.000	01 . 54	
01 RM		-	2.690.000	-	-	-	2.690.000	139	
4194.EAC	Layanan Umum (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	01 . 54	
01 RM		-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	139	
4194.EAD	Layanan Sarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	01 . 54	
01 RM		-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	139	
4194.EAE	Layanan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	410.000	-	-	410.000	01 . 54	
01 RM		-	-	410.000	-	-	410.000	139	
4194.EAF	Layanan SDM (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	01 . 54	

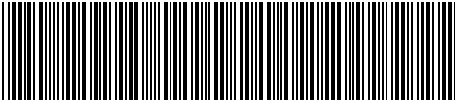
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	139	
4194.EAG	Layanan Hukum (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.700.000	-	-	-	2.700.000	01 . 54	
01 RM		-	2.700.000	-	-	-	2.700.000	139	
4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	01 . 54	
01 RM		-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	139	
4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.900.000	-	-	-	1.900.000	01 . 54	
01 RM		-	1.900.000	-	-	-	1.900.000	139	
4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.800.000	-	-	-	1.800.000	01 . 54	
01 RM		-	1.800.000	-	-	-	1.800.000	139	
4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	-	20.127.189	-	-	-	20.127.189		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



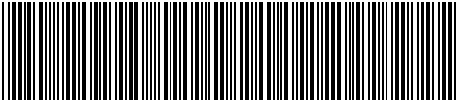
DS:5798-3490-0622-3877

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	11.827.189	-	-	-	11.827.189	01 . 54	RK 1F1NDHGA RK 1HG72SWA
01	RM	-	8.277.189	-	-	-	8.277.189	139	
02	PLN	-	50.000	-	-	-	50.000	140	
02	PLN	-	3.500.000	-	-	-	3.500.000	140	
4195.AEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.300.000	-	-	-	1.300.000	01 . 54	
02	PLN	-	1.300.000	-	-	-	1.300.000	140	
4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	01 . 54	
01	RM	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	139	
4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	01 . 54	
01	RM	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:5798-3490-0622-3877

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	01 . 54	RK 1F1NDHGA
01 RM		-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	139	
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	87.850.000	-	-	-	87.850.000		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	50.050.000	-	-	-	50.050.000	01 . 54	
01 RM		-	49.900.000	-	-	-	49.900.000	139	
02 PLN		-	150.000	-	-	-	150.000	140	
4197.AEE	Kemitraan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	22.396.000	-	-	-	22.396.000	01 . 54	
01 RM		-	22.396.000	-	-	-	22.396.000	139	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	3.700.000	-	-	-	3.700.000	01 . 54	
01 RM		-	3.700.000	-	-	-	3.700.000	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	11.704.000	-	-	-	11.704.000	01 . 54	
01 RM		-	11.704.000	-	-	-	11.704.000	139	
JUMLAH		26.292.062	173.119.432	1.410.000	-	-	200.821.494		

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

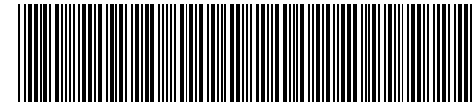
ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DS:5798-3490-0622-3877

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:5798-3490-0622-3877

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

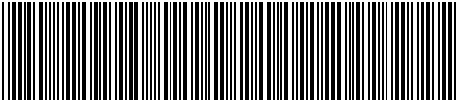
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.329.659	87.850.000

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV A. B L O K I R



DS:5798-3490-0622-3877

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

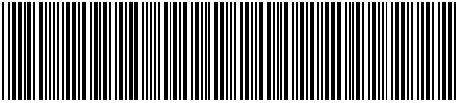
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV B. C A T A T A N



DS:5798-3490-0622-3877

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

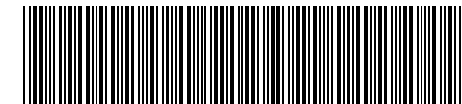
Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

REVISI KE 1



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021**

Revisi ke 01

Tanggal : 18 Februari 2021

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (033) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2. Unit Organisasi | : (16) | Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (631003) | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN |
| Sebesar | : Rp. | 159.369.850.000 (SERATUS LIMA PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 144.369.850.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 15.000.000.000 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 15.000.000.000 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 144.369.850.000 | 2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH | (140) Rp. | 15.000.000.000 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|

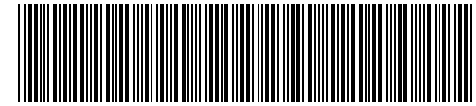
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

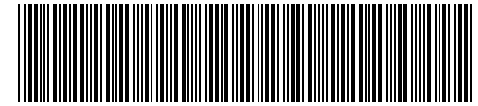


DS:4653-8672-1154-6332

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	133.619.850.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	133.619.850.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	25.750.000.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	25.750.000.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

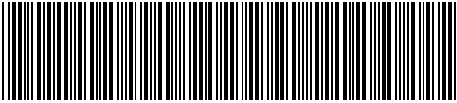


DS:4653-8672-1154-6332

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	25.750.000.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	25.750.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	133.619.850.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	61.967.862.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	13.080.661.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	58.571.327.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



DS:4653-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			25.750.000.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan			25.750.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	4,00	Rekomendasi Kebijakan	5.500.000.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	4,00	Rekomendasi Kebijakan	5.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK	750.000.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1,00	NSPK	750.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	2,00	Laporan	1.500.000.000
Rincian Output	:	01 EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	2,00	Laporan	1.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	500.000.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)	1,00	Kegiatan	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan	7.500.000.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1,00	Layanan	3.500.000.000
		02 QAH.002	Fasilitas Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	1,00	Layanan	4.000.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



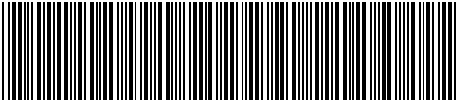
DS:4653-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	6	:	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	312,00	Rumah Tangga	10.000.000.000
Rincian Output		:	01	QFC.001 Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	312.00	Orang	10.000.000.000
Program		:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen			133.619.850.000
Kegiatan		:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			61.967.862.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
			7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP			
			8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4194.EAA	Layanan Perkantoran	3,00	Layanan	52.094.305.000
Rincian Output		:	01	EAA.004 Gaji dan Tunjangan DJPI	1.00	Layanan	26.292.062.000
			02	EAA.005 Operasionalisasi Kantor DJPI	1.00	layanan	20.802.243.000
			03	EAA.006 Opsionalisasi Kantor Direktorat	1.00	1	5.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	4,00	Layanan	1.258.516.000
Rincian Output		:	01	EAB.001 Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	1.00	laporan	416.431.000
			02	EAB.002 Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I	2.00	laporan	608.135.000
			03	EAB.003 Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI	1.00	laporan	233.950.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



DS:4653-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal					Layanan		
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EAC	Layanan Umum	3,00	Layanan	2.805.200.000
Rincian Output		:	01	EAC.002 Tata Kelola TNDE dan Arsip	1,00	laporan	406.000.000
		:	02	EAC.003 Kerumahtanggaan	2,00	laporan	2.399.200.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EAD	Layanan Sarana Internal	2,00	unit	1.000.000.000
Rincian Output		:	01	EAD.003 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	1,00	unit	500.000.000
		:	02	EAD.004 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	1,00	unit	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	1,00	unit	410.000.000
Rincian Output		:	01	EAE.001 Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1,00	unit	410.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4194.EAF	Layanan SDM	260,00	orang	605.692.000
Rincian Output		:	01	EAF.001 Pengelolaan Pegawai	260,00	orang	605.692.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4194.EAG	Layanan Hukum	3,00	Layanan	961.922.000
Rincian Output		:	01	EAG.001 Advokasi Hukum	1,00	Layanan	427.204.000
		:	02	EAG.003 Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	2,00	Layanan	534.718.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



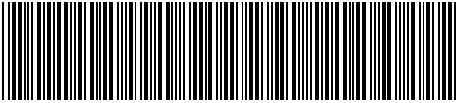
DS:4653-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	8	:	4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3,00	Layanan	799.725.000
Rincian Output		:	01	EAH.001 Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	1.00	Layanan	100.383.000
		:	02	EAH.002 Manajemen Transformasi Organisasi	2.00	Layanan	699.342.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	3,00	Layanan	1.190.282.000
Rincian Output		:	01	EAI.001 Strategi Komunikasi	1.00	Layanan	587.600.000
		:	02	EAI.002 Publikasi	2.00	Layanan	602.682.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	842.220.000
Rincian Output		:	01	EAL.001 Laporan Keuangan Unit Eselon I	1.00	Laporan	233.950.000
		:	02	EAL.002 Laporan Kinerja Unit Eselon II	1.00	Laporan	140.370.000
		:	03	EAL.003 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	1.00	Laporan	467.900.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			13.080.661.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	11	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	8,00	Rekomendasi Kebijakan	7.465.661.000
Rincian Output		:	01	ABF.001 Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.500.000.000
		:	02	ABF.002 Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.965.661.000
		:	03	ABF.003 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



DS:4653-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 5

Klasifikasi Rincian Output	12	:	4195.AEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	1.300.000.000
Rincian Output	:	01	AEA.001	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Bidang Pembiayaan Perumahan	1.00	Kegiatan	1.300.000.000
Klasifikasi Rincian Output	13	:	4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi	4,00	Layanan	1.715.000.000
Rincian Output	:	01	EAJ.001	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.00	Layanan	1.715.000.000
Klasifikasi Rincian Output	14	:	4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal	3,00	Laporan	1.500.000.000
Rincian Output	:	01	EAK.001	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.00	Laporan	1.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	15	:	4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	1.100.000.000
Rincian Output	:	01	EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.00	Laporan	1.100.000.000
Kegiatan	:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				58.571.327.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan				
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air				
		3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman				
		4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan				
Klasifikasi Rincian Output	16	:	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	26,00	Rekomendasi Kebijakan	35.061.252.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.452.379.000
		02	ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

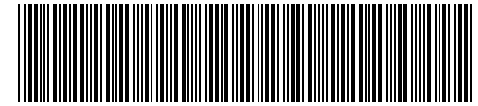


Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 6

Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				Rekomendasi Kebijakan		
	03	ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	4.00	Rekomendasi Kebijakan	7.550.000.000
	04	ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	700.000.000
	05	ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
	06	ABF.006	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.600.000.000
	07	ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	6.900.000.000
	08	ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000.000
	09	ABF.009	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.600.000.000
	10	ABF.010	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.800.000.000
	11	ABF.011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.500.000.000
	12	ABF.012	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.362.243.000
	13	ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	664.320.000
	14	ABF.014	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
	15	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.682.310.000
	16	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	750.000.000
Klasifikasi Rincian Output	17	4197.AEE	Kemitraan	20,00	Kesepakatan	12.762.243.000
Rincian Output	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	1.800.000.000
	02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	13.00	Kesepakatan	4.600.000.000
	03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	3.862.243.000
	04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	1.00	Kesepakatan	2.500.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



DS:4653-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

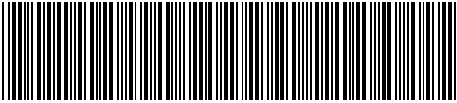
Halaman : I A. 7

Klasifikasi Rincian Output	18	:	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5,00	NSPK	2.693.832.000
Rincian Output	:	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	NSPK	800.000.000
		02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	893.832.000
		03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	500.000.000
		04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	19	:	4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	12,00	Laporan	8.054.000.000
Rincian Output	:	01	EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	800.000.000
		02	EAL.002	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	300.000.000
		03	EAL.003	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3.00	Laporan	3.600.000.000
		04	EAL.004	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Laporan	300.000.000
		05	EAL.005	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Laporan	1.600.000.000
		06	EAL.006	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Laporan	300.000.000
		07	EAL.007	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	854.000.000
		08	EAL.008	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	300.000.000

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I B. SUMBER DANA



DS:4653-8672-1154-6332

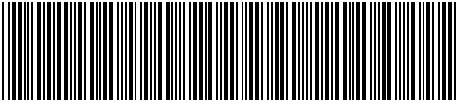
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	159.369.850.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0
1. Rupiah Murni	Rp.	144.369.850.000		(2) RPLN	US\$	1.041.667
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	15.000.000.000		(2) RHLN	US\$	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	ASIAN DEVELOPMENT BANK- 3455-INO 1F1NDHGA	USD USD IDR	13,70 200.000,00	3	200.000			
2	1	INTERNATIONAL BANK FOR 8717-ID 1HG72SWA	USD USD IDR	1.013,70 14.800.000,00	3	14.800.000			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



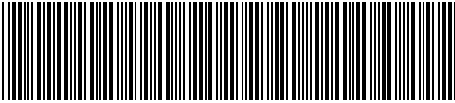
DS:4653-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	26.292.062	131.667.788	1.410.000	-	-	159.369.850		
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	25.750.000	-	-	-	25.750.000		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	-	25.750.000	-	-	-	25.750.000		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000	01 . 54	
01	RM	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000	139	
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	750.000	-	-	-	750.000	01 . 54	
01	RM	-	750.000	-	-	-	750.000	139	
4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	01 . 54	
01	RM	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	139	
4976.PEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	500.000	-	-	-	500.000	01 . 54	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



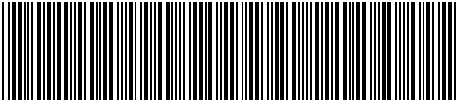
DS:4653-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	500.000	-	-	-	500.000	139	RK 1HG72SWA
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.500.000	-	-	-	7.500.000	01 . 54	
01 RM		-	7.500.000	-	-	-	7.500.000	139	
4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	01 . 54	
02 PLN		-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	140	
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	26.292.062	105.917.788	1.410.000	-	-	133.619.850		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	26.292.062	34.265.800	1.410.000	-	-	61.967.862		01 . 54
4194.EAA	Layanan Perkantoran (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	26.292.062	25.802.243	-	-	-	52.094.305		
01 RM		26.292.062	25.802.243	-	-	-	52.094.305	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:4653-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.258.516	-	-	-	1.258.516	01 . 54	
01 RM		-	1.258.516	-	-	-	1.258.516	139	
4194.EAC	Layanan Umum (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.805.200	-	-	-	2.805.200	01 . 54	
01 RM		-	2.805.200	-	-	-	2.805.200	139	
4194.EAD	Layanan Sarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	01 . 54	
01 RM		-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	139	
4194.EAE	Layanan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	410.000	-	-	410.000	01 . 54	
01 RM		-	-	410.000	-	-	410.000	139	
4194.EAF	Layanan SDM (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	605.692	-	-	-	605.692	01 . 54	

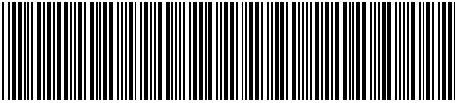
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	605.692	-	-	-	605.692	139	
4194.EAG	Layanan Hukum (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	961.922	-	-	-	961.922	01 . 54	
01 RM		-	961.922	-	-	-	961.922	139	
4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	799.725	-	-	-	799.725	01 . 54	
01 RM		-	799.725	-	-	-	799.725	139	
4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.190.282	-	-	-	1.190.282	01 . 54	
01 RM		-	1.190.282	-	-	-	1.190.282	139	
4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	842.220	-	-	-	842.220	01 . 54	
01 RM		-	842.220	-	-	-	842.220	139	
4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	-	13.080.661	-	-	-	13.080.661		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



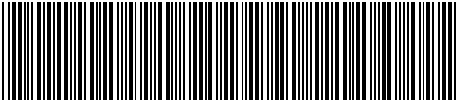
DS:4653-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.465.661	-	-	-	7.465.661	01 . 54	RK 1F1NDHGA RK 1HG72SWA
01	RM	-	3.915.661	-	-	-	3.915.661	139	
02	PLN	-	50.000	-	-	-	50.000	140	
02	PLN	-	3.500.000	-	-	-	3.500.000	140	
4195.AEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.300.000	-	-	-	1.300.000	01 . 54	
02	PLN	-	1.300.000	-	-	-	1.300.000	140	
4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.715.000	-	-	-	1.715.000	01 . 54	
01	RM	-	1.715.000	-	-	-	1.715.000	139	
4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	01 . 54	
01	RM	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



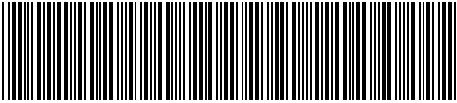
DS:4653-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	01 . 54	RK 1F1NDHGA
01 RM		-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	139	
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	58.571.327	-	-	-	58.571.327		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	35.061.252	-	-	-	35.061.252	01 . 54	
01 RM		-	34.911.252	-	-	-	34.911.252	139	
02 PLN		-	150.000	-	-	-	150.000	140	
4197.AEE	Kemitraan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	12.762.243	-	-	-	12.762.243	01 . 54	
01 RM		-	12.762.243	-	-	-	12.762.243	139	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.693.832	-	-	-	2.693.832	01 . 54	
01 RM		-	2.693.832	-	-	-	2.693.832	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:4653-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	8.054.000	-	-	-	8.054.000	01 . 54	
01 RM		-	8.054.000	-	-	-	8.054.000	139	
JUMLAH		26.292.062	131.667.788	1.410.000	-	-	159.369.850		

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

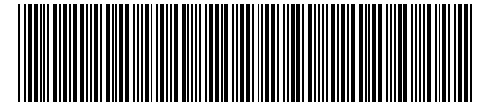
DS:4653-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi	: (16)	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker	: (631003)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:4653-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

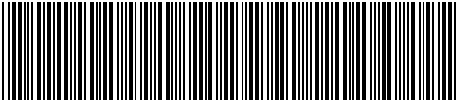
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	4.862.647	4.862.647	4.862.647	4.862.647	4.862.647	4.862.647	4.862.647	4.862.647	4.862.647	4.862.647	4.862.647	5.082.208	58.571.327

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV A. B L O K I R



DS:4653-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

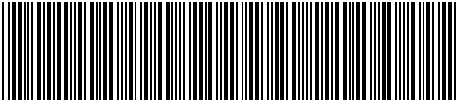
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV B. C A T A T A N



DS:4653-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

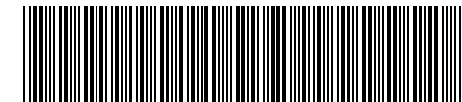
Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

REVISI KE 2



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021**



DS:0089-0960-1387-0003

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

Revisi ke 02

Tanggal : 15 April 2021

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|----------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (033) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2. Unit Organisasi | : | (16) | Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan |
| 3. Provinsi | : | (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : | (631003) | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN |
| Sebesar | : | Rp. | 206.484.097.000 (DUA RATUS ENAM MILIAR EMPAT RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	144.369.850.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	62.114.247.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	62.114.247.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	144.369.850.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	62.114.247.000
-------------------	-----------	-----------------	-----------------------------------	-----------	----------------

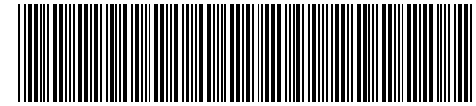
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

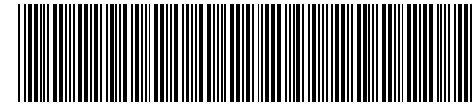


DS:0089-0960-1387-0003

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	145.612.470.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	145.612.470.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	60.871.627.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	60.871.627.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021



DS:0089-0960-1387-0003

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	60.871.627.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	60.871.627.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	145.612.470.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	61.967.862.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	25.073.281.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	58.571.327.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			60.871.627.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan			60.871.627.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	4,00	Rekomendasi Kebijakan	5.500.000.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	4,00	Rekomendasi Kebijakan	5.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK	750.000.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1,00	NSPK	750.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	2,00	Laporan	1.500.000.000
Rincian Output	:	01 EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	2,00	Laporan	1.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	500.000.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)	1,00	Kegiatan	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan	7.500.000.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1,00	Layanan	3.500.000.000
		02 QAH.002	Fasilitas Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	1,00	Layanan	4.000.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



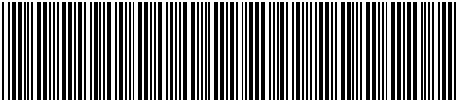
DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	6	:	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	1.000,00	Rumah Tangga	45.121.627.000
Rincian Output		:	01	QFC.001 Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	1000.00	Orang	45.121.627.000
Program		:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen			145.612.470.000
Kegiatan		:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			61.967.862.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
			7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP			
			8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4194.EAA	Layanan Perkantoran	3,00	Layanan	52.094.305.000
Rincian Output		:	01	EAA.004 Gaji dan Tunjangan DJPI	1.00	Layanan	26.292.062.000
			02	EAA.005 Operasionalisasi Kantor DJPI	1.00	layanan	20.802.243.000
			03	EAA.006 Opsionalisasi Kantor Direktorat	1.00	1	5.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	4,00	Layanan	1.258.516.000
Rincian Output		:	01	EAB.001 Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	1.00	laporan	416.431.000
			02	EAB.002 Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I	2.00	laporan	608.135.000
			03	EAB.003 Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI	1.00	laporan	233.950.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal						Layanan	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EAC	Layanan Umum	3,00	Layanan	2.805.200.000
Rincian Output	:	01	EAC.002	Tata Kelola TNDE dan Arsip	1,00	laporan	406.000.000
	:	02	EAC.003	Kerumahtanggaan	2,00	laporan	2.399.200.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EAD	Layanan Sarana Internal	2,00	unit	1.000.000.000
Rincian Output	:	01	EAD.003	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	1,00	unit	500.000.000
	:	02	EAD.004	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	1,00	unit	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	1,00	unit	410.000.000
Rincian Output	:	01	EAE.001	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1,00	unit	410.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4194.EAF	Layanan SDM	260,00	orang	605.692.000
Rincian Output	:	01	EAF.001	Pengelolaan Pegawai	260,00	orang	605.692.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4194.EAG	Layanan Hukum	3,00	Layanan	961.922.000
Rincian Output	:	01	EAG.001	Advokasi Hukum	1,00	Layanan	295.848.000
	:	02	EAG.003	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	2,00	Layanan	666.074.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



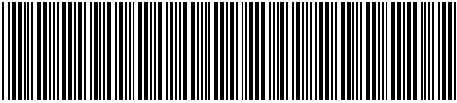
DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	8	:	4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3,00	Layanan	799.725.000
Rincian Output		:	01	EAH.001 Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	1.00	Layanan	100.383.000
		:	02	EAH.002 Manajemen Transformasi Organisasi	2.00	Layanan	699.342.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	3,00	Layanan	1.190.282.000
Rincian Output		:	01	EAI.001 Strategi Komunikasi	1.00	Layanan	520.000.000
		:	02	EAI.002 Publikasi	2.00	Layanan	670.282.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	842.220.000
Rincian Output		:	01	EAL.001 Laporan Keuangan Unit Eselon I	1.00	Laporan	233.950.000
		:	02	EAL.002 Laporan Kinerja Unit Eselon II	1.00	Laporan	140.370.000
		:	03	EAL.003 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	1.00	Laporan	467.900.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			25.073.281.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	11	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	8,00	Rekomendasi Kebijakan	15.592.789.000
Rincian Output		:	01	ABF.001 Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	11.627.128.000
		:	02	ABF.002 Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.965.661.000
		:	03	ABF.003 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 5

Klasifikasi Rincian Output	12	:	4195.AEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	5.165.492.000
Rincian Output	:	01	AEA.001	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Bidang Pembiayaan Perumahan	1.00	Kegiatan	5.165.492.000
Klasifikasi Rincian Output	13	:	4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi	4,00	Layanan	1.715.000.000
Rincian Output	:	01	EAJ.001	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.00	Layanan	1.715.000.000
Klasifikasi Rincian Output	14	:	4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal	3,00	Laporan	1.500.000.000
Rincian Output	:	01	EAK.001	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.00	Laporan	1.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	15	:	4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	1.100.000.000
Rincian Output	:	01	EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.00	Laporan	1.100.000.000
Kegiatan	:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				58.571.327.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan				
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air				
		3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman				
		4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan				
Klasifikasi Rincian Output	16	:	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	26,00	Rekomendasi Kebijakan	35.061.252.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.452.379.000
		02	ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

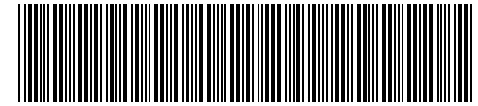


Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 6

Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				Rekomendasi Kebijakan			
	03	ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	4,00	Rekomendasi Kebijakan	7.550.000.000	
	04	ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,00	Rekomendasi Kebijakan	700.000.000	
	05	ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000	
	06	ABF.006	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.440.000.000	
	07	ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4,00	Rekomendasi Kebijakan	6.900.000.000	
	08	ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	2.160.000.000	
	09	ABF.009	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.600.000.000	
	10	ABF.010	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.800.000.000	
	11	ABF.011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2,00	Rekomendasi Kebijakan	2.500.000.000	
	12	ABF.012	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.362.243.000	
	13	ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	664.320.000	
	14	ABF.014	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000	
	15	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	2.682.310.000	
	16	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	750.000.000	
Klasifikasi Rincian Output	17	4197.AEE	Kemitraan	20,00	Kesepakatan	12.762.243.000	
Rincian Output	:	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2,00	Kesepakatan	1.800.000.000
		02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	13,00	Kesepakatan	4.600.000.000
		03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	4,00	Kesepakatan	3.862.243.000
		04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	1,00	Kesepakatan	2.500.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 7

Klasifikasi Rincian Output	18	:	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5,00	NSPK	2.693.832.000
Rincian Output	:	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	NSPK	800.000.000
		02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	893.832.000
		03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	500.000.000
		04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	19	:	4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	12,00	Laporan	8.054.000.000
Rincian Output	:	01	EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	800.000.000
		02	EAL.002	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	300.000.000
		03	EAL.003	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3.00	Laporan	3.600.000.000
		04	EAL.004	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Laporan	300.000.000
		05	EAL.005	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Laporan	1.600.000.000
		06	EAL.006	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Laporan	300.000.000
		07	EAL.007	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	854.000.000
		08	EAL.008	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	300.000.000

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021



I B. SUMBER DANA

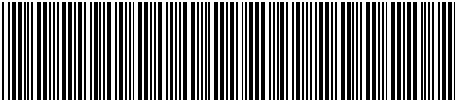
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	206.484.097.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	144.369.850.000		(2) RPLN	US\$	4.313.490	Rp.	62.114.247.000
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	62.114.247.000		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	ASIAN DEVELOPMENT BANK- 3455-INO 1F1NDHGA	USD USD IDR	13,70 200.000,00	3	200.000			
2	1	INTERNATIONAL BANK FOR 8717-ID 1HG72SWA	USD USD IDR	4.240,70 61.914.247,00	3	61.914.247			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



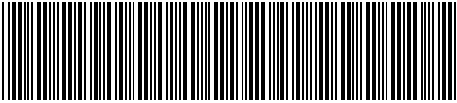
DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
 Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	26.292.062	178.782.035	1.410.000	-	-	206.484.097		
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	60.871.627	-	-	-	60.871.627		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	-	60.871.627	-	-	-	60.871.627		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000	01 . 54	
01	RM	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000	139	
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	750.000	-	-	-	750.000	01 . 54	
01	RM	-	750.000	-	-	-	750.000	139	
4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	01 . 54	
01	RM	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	139	
4976.PEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	500.000	-	-	-	500.000	01 . 54	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



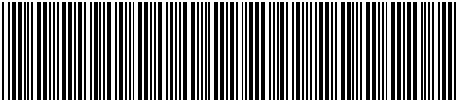
DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	500.000	-	-	-	500.000	139	RK 1HG72SWA
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.500.000	-	-	-	7.500.000	01 . 54	
01 RM		-	7.500.000	-	-	-	7.500.000	139	
4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	45.121.627	-	-	-	45.121.627	01 . 54	
02 PLN		-	45.121.627	-	-	-	45.121.627	140	
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	26.292.062	117.910.408	1.410.000	-	-	145.612.470		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	26.292.062	34.265.800	1.410.000	-	-	61.967.862		
4194.EAA	Layanan Perkantoran (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	26.292.062	25.802.243	-	-	-	52.094.305	01 . 54	
01 RM		26.292.062	25.802.243	-	-	-	52.094.305	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



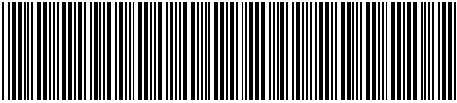
DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.258.516	-	-	-	1.258.516	01 . 54	
01 RM		-	1.258.516	-	-	-	1.258.516	139	
4194.EAC	Layanan Umum (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.805.200	-	-	-	2.805.200	01 . 54	
01 RM		-	2.805.200	-	-	-	2.805.200	139	
4194.EAD	Layanan Sarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	01 . 54	
01 RM		-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	139	
4194.EAE	Layanan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	410.000	-	-	410.000	01 . 54	
01 RM		-	-	410.000	-	-	410.000	139	
4194.EAF	Layanan SDM (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	605.692	-	-	-	605.692	01 . 54	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



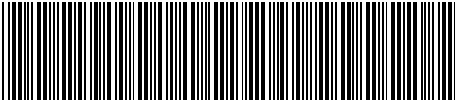
DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	605.692	-	-	-	605.692	139	
4194.EAG	Layanan Hukum (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	961.922	-	-	-	961.922	01 . 54	
01 RM		-	961.922	-	-	-	961.922	139	
4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	799.725	-	-	-	799.725	01 . 54	
01 RM		-	799.725	-	-	-	799.725	139	
4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.190.282	-	-	-	1.190.282	01 . 54	
01 RM		-	1.190.282	-	-	-	1.190.282	139	
4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	842.220	-	-	-	842.220	01 . 54	
01 RM		-	842.220	-	-	-	842.220	139	
4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	-	25.073.281	-	-	-	25.073.281		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



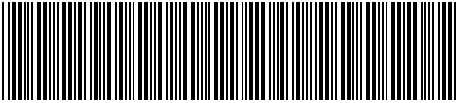
DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	15.592.789	-	-	-	15.592.789	01 . 54	RK 1F1NDHGA RK 1HG72SWA RK 1HG72SWA
01	RM	-	3.915.661	-	-	-	3.915.661	139	
02	PLN	-	50.000	-	-	-	50.000	140	
02	PLN	-	11.627.128	-	-	-	11.627.128	140	
4195.AEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.165.492	-	-	-	5.165.492	01 . 54	
02	PLN	-	5.165.492	-	-	-	5.165.492	140	
4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.715.000	-	-	-	1.715.000	01 . 54	
01	RM	-	1.715.000	-	-	-	1.715.000	139	
4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	01 . 54	
01	RM	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	01 . 54	RK 1F1NDHGA
01 RM		-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	139	
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	58.571.327	-	-	-	58.571.327		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	35.061.252	-	-	-	35.061.252	01 . 54	
01 RM		-	34.911.252	-	-	-	34.911.252	139	
02 PLN		-	150.000	-	-	-	150.000	140	
4197.AEE	Kemitraan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	12.762.243	-	-	-	12.762.243	01 . 54	
01 RM		-	12.762.243	-	-	-	12.762.243	139	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.693.832	-	-	-	2.693.832	01 . 54	
01 RM		-	2.693.832	-	-	-	2.693.832	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	8.054.000	-	-	-	8.054.000	01 . 54	
01 RM		-	8.054.000	-	-	-	8.054.000	139	
JUMLAH		26.292.062	178.782.035	1.410.000	-	-	206.484.097		

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DS:0089-0960-1387-0003

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

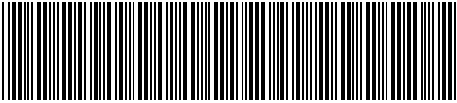
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	461.407	1.542.440	2.501.088	3.471.197	6.046.784	6.502.306	8.456.800	8.369.421	8.883.203	6.252.150	3.896.287	2.188.245	58.571.327

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV A. B L O K I R



DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

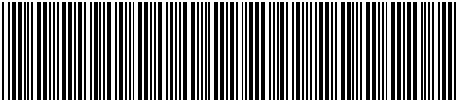
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV B. C A T A T A N



DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

REVISI KE 3



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021**



DS:3006-0010-8050-2055

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

Revisi ke 03

Tanggal : 07 Juli 2021

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|----------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (033) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2. Unit Organisasi | : | (16) | Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan |
| 3. Provinsi | : | (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : | (631003) | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN |
| Sebesar | : | Rp. | 217.084.097.000 (DUA RATUS TUJUH BELAS MILIAR DELAPAN PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 154.969.850.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 62.114.247.000 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 62.114.247.000 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 154.969.850.000 | 2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH | (140) Rp. | 62.114.247.000 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021



DS:3006-0010-8050-2055

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	156.212.470.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	156.212.470.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	60.871.627.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	60.871.627.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021



Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	60.871.627.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	60.871.627.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	156.212.470.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	72.567.862.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	25.073.281.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	58.571.327.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3006-0010-8050-2055

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			60.871.627.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan			60.871.627.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	4,00	Rekomendasi Kebijakan	5.500.000.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	4,00	Rekomendasi Kebijakan	5.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK	750.000.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1,00	NSPK	750.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	2,00	Laporan	1.500.000.000
Rincian Output	:	01 EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	2,00	Laporan	1.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	500.000.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)	1,00	Kegiatan	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan	7.500.000.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1,00	Layanan	3.500.000.000
		02 QAH.002	Fasilitas Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	1,00	Layanan	4.000.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3006-0010-8050-2055

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	6	:	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	1.000,00	Rumah Tangga	45.121.627.000
Rincian Output		:	01	QFC.001 Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	1000.00	Orang	45.121.627.000
Program		:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen			156.212.470.000
Kegiatan		:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			72.567.862.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
			7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP			
			8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4194.EAA	Layanan Perkantoran	3,00	Layanan	62.694.305.000
Rincian Output		:	01	EAA.004 Gaji dan Tunjangan DJPI	1.00	Layanan	36.892.062.000
			02	EAA.005 Operasionalisasi Kantor DJPI	1.00	layanan	20.802.243.000
			03	EAA.006 Opsionalisasi Kantor Direktorat	1.00	1	5.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	4,00	Layanan	1.258.516.000
Rincian Output		:	01	EAB.001 Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	1.00	laporan	416.431.000
			02	EAB.002 Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I	2.00	laporan	608.135.000
			03	EAB.003 Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI	1.00	laporan	233.950.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 3

Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal					Layanan		
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EAC	Layanan Umum	3,00	Layanan	2.805.200.000
Rincian Output		:	01	EAC.002 Tata Kelola TNDE dan Arsip	1,00	laporan	431.180.000
		:	02	EAC.003 Kerumahtanggaan	2,00	laporan	2.374.020.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EAD	Layanan Sarana Internal	2,00	unit	1.000.000.000
Rincian Output		:	01	EAD.003 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	1,00	unit	500.000.000
		:	02	EAD.004 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	1,00	unit	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	1,00	unit	410.000.000
Rincian Output		:	01	EAE.001 Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1,00	unit	410.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4194.EAF	Layanan SDM	260,00	orang	605.692.000
Rincian Output		:	01	EAF.001 Pengelolaan Pegawai	260,00	orang	605.692.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4194.EAG	Layanan Hukum	3,00	Layanan	961.922.000
Rincian Output		:	01	EAG.001 Advokasi Hukum	1,00	Layanan	249.272.000
		:	02	EAG.003 Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	2,00	Layanan	712.650.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3006-0010-8050-2055

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	8	:	4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3,00	Layanan	799.725.000
Rincian Output		:	01	EAH.001 Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	1.00	Layanan	100.383.000
		:	02	EAH.002 Manajemen Transformasi Organisasi	2.00	Layanan	699.342.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	3,00	Layanan	1.190.282.000
Rincian Output		:	01	EAI.001 Strategi Komunikasi	1.00	Layanan	586.808.000
		:	02	EAI.002 Publikasi	2.00	Layanan	603.474.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	842.220.000
Rincian Output		:	01	EAL.001 Laporan Keuangan Unit Eselon I	1.00	Laporan	233.950.000
		:	02	EAL.002 Laporan Kinerja Unit Eselon II	1.00	Laporan	140.370.000
		:	03	EAL.003 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	1.00	Laporan	467.900.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			25.073.281.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	11	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	8,00	Rekomendasi Kebijakan	15.592.789.000
Rincian Output		:	01	ABF.001 Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	11.627.128.000
		:	02	ABF.002 Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.965.661.000
		:	03	ABF.003 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3006-0010-8050-2055

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 5

Klasifikasi Rincian Output	12	:	4195.AEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	5.165.492.000
Rincian Output	:	01	AEA.001	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Bidang Pembiayaan Perumahan	1.00	Kegiatan	5.165.492.000
Klasifikasi Rincian Output	13	:	4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi	4,00	Layanan	1.715.000.000
Rincian Output	:	01	EAJ.001	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.00	Layanan	1.715.000.000
Klasifikasi Rincian Output	14	:	4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal	3,00	Laporan	1.500.000.000
Rincian Output	:	01	EAK.001	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.00	Laporan	1.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	15	:	4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	1.100.000.000
Rincian Output	:	01	EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.00	Laporan	1.100.000.000
Kegiatan	:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				58.571.327.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan				
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air				
		3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman				
		4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan				
Klasifikasi Rincian Output	16	:	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	26,00	Rekomendasi Kebijakan	35.061.252.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.452.379.000
		02	ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 6

Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				Rekomendasi Kebijakan			
	03	ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	4,00	Rekomendasi Kebijakan	7.550.000.000	
	04	ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,00	Rekomendasi Kebijakan	700.000.000	
	05	ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000	
	06	ABF.006	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.440.000.000	
	07	ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4,00	Rekomendasi Kebijakan	6.900.000.000	
	08	ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	2.160.000.000	
	09	ABF.009	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.600.000.000	
	10	ABF.010	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.800.000.000	
	11	ABF.011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2,00	Rekomendasi Kebijakan	2.500.000.000	
	12	ABF.012	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.362.243.000	
	13	ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	664.320.000	
	14	ABF.014	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000	
	15	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	2.682.310.000	
	16	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	750.000.000	
Klasifikasi Rincian Output	17	4197.AEE	Kemitraan	20,00	Kesepakatan	12.762.243.000	
Rincian Output	:	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2,00	Kesepakatan	1.800.000.000
		02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	13,00	Kesepakatan	4.600.000.000
		03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	4,00	Kesepakatan	3.862.243.000
		04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	1,00	Kesepakatan	2.500.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 7

Klasifikasi Rincian Output	18	:	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5,00	NSPK	2.693.832.000
Rincian Output	:	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	NSPK	800.000.000
		02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	893.832.000
		03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	500.000.000
		04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	19	:	4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	12,00	Laporan	8.054.000.000
Rincian Output	:	01	EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	800.000.000
		02	EAL.002	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	300.000.000
		03	EAL.003	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3.00	Laporan	3.600.000.000
		04	EAL.004	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Laporan	300.000.000
		05	EAL.005	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Laporan	1.600.000.000
		06	EAL.006	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Laporan	300.000.000
		07	EAL.007	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	854.000.000
		08	EAL.008	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	300.000.000

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021



I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (033)KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : (16)Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Provinsi : (01)DKI JAKARTA

Kode>Nama Satker : (631003)PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	217.084.097.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0
1. Rupiah Murni	Rp.	154.969.850.000		(2) RPLN	US\$	4.254.401
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	62.114.247.000		(2) RHLN	US\$	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	ASIAN DEVELOPMENT BANK- 3455-INO 1F1NDHGA	USD USD IDR	13,70 200.000,00	3	200.000			
2	1	INTERNATIONAL BANK FOR 8717-ID 1HG72SWA	USD USD IDR	4.240,70 61.914.247,00	3	61.914.247			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	36.892.062	178.782.035	1.410.000	-	-	217.084.097		
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	60.871.627	-	-	-	60.871.627		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	-	60.871.627	-	-	-	60.871.627		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000	01 . 54	
01	RM	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000	139	
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	750.000	-	-	-	750.000	01 . 54	
01	RM	-	750.000	-	-	-	750.000	139	
4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	01 . 54	
01	RM	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	139	
4976.PEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	500.000	-	-	-	500.000	01 . 54	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



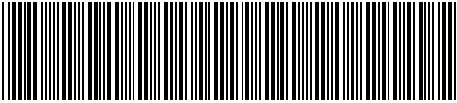
DS:3006-0010-8050-2055

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	500.000	-	-	-	500.000	139	RK 1HG72SWA
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.500.000	-	-	-	7.500.000	01 . 54	
01 RM		-	7.500.000	-	-	-	7.500.000	139	
4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	45.121.627	-	-	-	45.121.627	01 . 54	
02 PLN		-	45.121.627	-	-	-	45.121.627	140	
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	36.892.062	117.910.408	1.410.000	-	-	156.212.470		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	36.892.062	34.265.800	1.410.000	-	-	72.567.862		
4194.EAA	Layanan Perkantoran (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	36.892.062	25.802.243	-	-	-	62.694.305	01 . 54	
01 RM		36.892.062	25.802.243	-	-	-	62.694.305	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



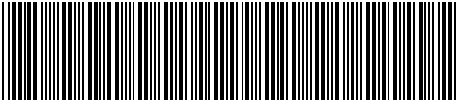
DS:3006-0010-8050-2055

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
 Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.258.516	-	-	-	1.258.516	01 . 54	
01 RM		-	1.258.516	-	-	-	1.258.516	139	
4194.EAC	Layanan Umum (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.805.200	-	-	-	2.805.200	01 . 54	
01 RM		-	2.805.200	-	-	-	2.805.200	139	
4194.EAD	Layanan Sarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	01 . 54	
01 RM		-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	139	
4194.EAE	Layanan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	410.000	-	-	410.000	01 . 54	
01 RM		-	-	410.000	-	-	410.000	139	
4194.EAF	Layanan SDM (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	605.692	-	-	-	605.692	01 . 54	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



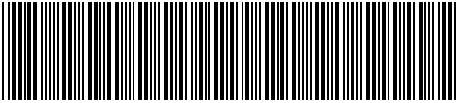
DS:3006-0010-8050-2055

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	605.692	-	-	-	605.692	139	
4194.EAG	Layanan Hukum (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	961.922	-	-	-	961.922	01 . 54	
01 RM		-	961.922	-	-	-	961.922	139	
4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	799.725	-	-	-	799.725	01 . 54	
01 RM		-	799.725	-	-	-	799.725	139	
4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.190.282	-	-	-	1.190.282	01 . 54	
01 RM		-	1.190.282	-	-	-	1.190.282	139	
4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	842.220	-	-	-	842.220	01 . 54	
01 RM		-	842.220	-	-	-	842.220	139	
4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	-	25.073.281	-	-	-	25.073.281		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



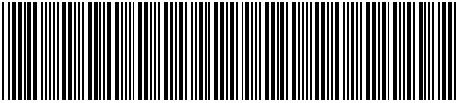
DS:3006-0010-8050-2055

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	15.592.789	-	-	-	15.592.789	01 . 54	RK 1F1NDHGA RK 1HG72SWA RK 1HG72SWA
01	RM	-	3.915.661	-	-	-	3.915.661	139	
02	PLN	-	50.000	-	-	-	50.000	140	
02	PLN	-	11.627.128	-	-	-	11.627.128	140	
4195.AEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.165.492	-	-	-	5.165.492	01 . 54	
02	PLN	-	5.165.492	-	-	-	5.165.492	140	
4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.715.000	-	-	-	1.715.000	01 . 54	
01	RM	-	1.715.000	-	-	-	1.715.000	139	
4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	01 . 54	
01	RM	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3006-0010-8050-2055

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	01 . 54	RK 1F1NDHGA
01 RM		-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	139	
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	58.571.327	-	-	-	58.571.327		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	35.061.252	-	-	-	35.061.252	01 . 54	
01 RM		-	34.911.252	-	-	-	34.911.252	139	
02 PLN		-	150.000	-	-	-	150.000	140	
4197.AEE	Kemitraan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	12.762.243	-	-	-	12.762.243	01 . 54	
01 RM		-	12.762.243	-	-	-	12.762.243	139	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.693.832	-	-	-	2.693.832	01 . 54	
01 RM		-	2.693.832	-	-	-	2.693.832	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	8.054.000	-	-	-	8.054.000	01 . 54	
01 RM		-	8.054.000	-	-	-	8.054.000	139	
JUMLAH		36.892.062	178.782.035	1.410.000	-	-	217.084.097		

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DS:3006-0010-8050-2055

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

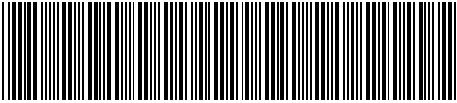
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	426.057	1.512.342	2.489.077	3.444.606	6.052.303	6.483.766	8.494.932	8.392.965	8.920.297	6.313.407	3.883.111	2.158.463	58.571.327

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV A. B L O K I R



DS:3006-0010-8050-2055

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

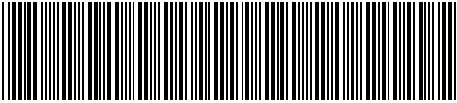
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV B. C A T A T A N



DS:3006-0010-8050-2055

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

REVISI KE 4



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021**



DS:3053-6547-1068-4603

Revisi ke 04

Tanggal : 28 Juli 2021

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (033) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2. Unit Organisasi | : | (16) | Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan |
| 3. Provinsi | : | (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : | (631003) | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN |
| Sebesar | : | Rp. 261.069.137.000 | (DUA RATUS ENAM PULUH SATU MILIAR ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 150.349.850.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBPNBPN TA Berjalan | Rp. | 0 | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 110.719.287.000 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 110.719.287.000 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 150.349.850.000 | 2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH | (140) Rp. | 110.719.287.000 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|

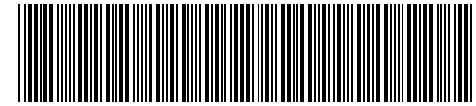
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021



DS:3053-6547-1068-4603

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	200.197.510.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	200.197.510.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	60.871.627.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	60.871.627.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021



Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	60.871.627.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	60.871.627.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	200.197.510.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	72.426.622.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	33.500.917.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	94.269.971.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3053-6547-1068-4603

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			60.871.627.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan			60.871.627.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4976.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	4,00	Rekomendasi Kebijakan	5.353.276.000
Rincian Output	:	01	ABF.001 Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	4,00	Rekomendasi Kebijakan	5.353.276.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4976.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK	709.444.000
Rincian Output	:	01	AFA.001 NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1,00	NSPK	709.444.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4976.EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	2,00	Laporan	1.403.008.000
Rincian Output	:	01	EAL.001 Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	2,00	Laporan	1.403.008.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4976.PEA Koordinasi	1,00	kegiatan	1.204.401.000
Rincian Output	:	01	PEA.001 Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)	1,00	Kegiatan	1.204.401.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4976.QAH Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan	7.079.871.000
Rincian Output	:	01	QAH.001 Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1,00	Layanan	3.380.920.000
		02	QAH.002 Fasilitas Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	1,00	Layanan	3.698.951.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



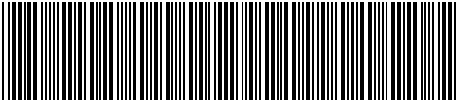
DS:3053-6547-1068-4603

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	6	:	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	1.000,00	Rumah Tangga	45.121.627.000
Rincian Output		:	01	QFC.001 Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	1000.00	Orang	45.121.627.000
Program		:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen			200.197.510.000
Kegiatan		:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			72.426.622.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
			7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP			
			8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4194.EAA	Layanan Perkantoran	3,00	Layanan	62.694.305.000
Rincian Output		:	01	EAA.004 Gaji dan Tunjangan DJPI	1.00	Layanan	36.892.062.000
			02	EAA.005 Operasionalisasi Kantor DJPI	1.00	layanan	20.802.243.000
			03	EAA.006 Opsionalisasi Kantor Direktorat	1.00	1	5.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	4,00	Layanan	1.221.601.000
Rincian Output		:	01	EAB.001 Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	1.00	laporan	404.142.000
			02	EAB.002 Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I	2.00	laporan	588.077.000
			03	EAB.003 Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI	1.00	laporan	229.382.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3053-6547-1068-4603

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal						Layanan	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EAC	Layanan Umum	3,00	Layanan	2.763.835.000
Rincian Output	01	:	EAC.002	Tata Kelola TNDE dan Arsip	1,00	laporan	391.362.000
	02	:	EAC.003	Kerumahtanggaan	2,00	laporan	2.372.473.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EAD	Layanan Sarana Internal	2,00	unit	1.000.000.000
Rincian Output	01	:	EAD.003	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	1,00	unit	500.000.000
	02	:	EAD.004	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	1,00	unit	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	1,00	unit	410.000.000
Rincian Output	01	:	EAE.001	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1,00	unit	410.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4194.EAF	Layanan SDM	260,00	orang	601.373.000
Rincian Output	01	:	EAF.001	Pengelolaan Pegawai	260,00	orang	601.373.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4194.EAG	Layanan Hukum	3,00	Layanan	950.142.000
Rincian Output	01	:	EAG.001	Advokasi Hukum	1,00	Layanan	242.118.000
	02	:	EAG.003	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	2,00	Layanan	708.024.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	8	:	4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3,00	Layanan	783.757.000
Rincian Output		:	01	EAH.001 Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	1.00	Layanan	100.288.000
		:	02	EAH.002 Manajemen Transformasi Organisasi	2.00	Layanan	683.469.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	3,00	Layanan	1.183.113.000
Rincian Output		:	01	EAI.001 Strategi Komunikasi	1.00	Layanan	583.547.000
		:	02	EAI.002 Publikasi	2.00	Layanan	599.566.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	818.496.000
Rincian Output		:	01	EAL.001 Laporan Keuangan Unit Eselon I	1.00	Laporan	212.437.000
		:	02	EAL.002 Laporan Kinerja Unit Eselon II	1.00	Laporan	140.370.000
		:	03	EAL.003 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	1.00	Laporan	465.689.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			33.500.917.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	11	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	8,00	Rekomendasi Kebijakan	24.227.395.000
Rincian Output		:	01	ABF.001 Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	11.627.128.000
		:	02	ABF.002 Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	10.697.962.000
		:	03	ABF.003 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	1.902.305.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3053-6547-1068-4603

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 5

Klasifikasi Rincian Output	12	:	4195.AEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	5.165.492.000
Rincian Output	:	01	AEA.001	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Bidang Pembiayaan Perumahan	1.00	Kegiatan	5.165.492.000
Klasifikasi Rincian Output	13	:	4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi	4,00	Layanan	1.651.000.000
Rincian Output	:	01	EAJ.001	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.00	Layanan	1.651.000.000
Klasifikasi Rincian Output	14	:	4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal	3,00	Laporan	1.401.917.000
Rincian Output	:	01	EAK.001	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.00	Laporan	1.401.917.000
Klasifikasi Rincian Output	15	:	4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	1.055.113.000
Rincian Output	:	01	EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.00	Laporan	1.055.113.000
Kegiatan	:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				94.269.971.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan				
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air				
		3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman				
		4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan				
Klasifikasi Rincian Output	16	:	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	26,00	Rekomendasi Kebijakan	72.231.345.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.336.516.000
		02	ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.473.523.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 6

Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				Rekomendasi Kebijakan		
	03	ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	4.00	Rekomendasi Kebijakan	6.889.521.000
	04	ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	672.304.000
	05	ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	959.292.000
	06	ABF.006	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.355.000.000
	07	ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	45.928.637.000
	08	ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.160.000.000
	09	ABF.009	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.510.168.000
	10	ABF.010	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.720.920.000
	11	ABF.011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.397.136.000
	12	ABF.012	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.282.640.000
	13	ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	461.179.000
	14	ABF.014	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	922.008.000
	15	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.501.770.000
	16	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	660.731.000
Klasifikasi Rincian Output	17	4197.AEE	Kemitraan	20,00	Kesepakatan	12.080.546.000
Rincian Output	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	1.674.165.000
	02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	13.00	Kesepakatan	4.440.000.000
	03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	3.709.760.000
	04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	1.00	Kesepakatan	2.256.621.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 7

Klasifikasi Rincian Output	18	:	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5,00	NSPK	2.463.235.000
Rincian Output	:	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	NSPK	744.563.000
		02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	863.832.000
		03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	479.530.000
		04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	375.310.000
Klasifikasi Rincian Output	19	:	4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	12,00	Laporan	7.494.845.000
Rincian Output	:	01	EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	767.945.000
		02	EAL.002	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	275.011.000
		03	EAL.003	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3.00	Laporan	3.450.000.000
		04	EAL.004	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Laporan	300.000.000
		05	EAL.005	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Laporan	1.504.045.000
		06	EAL.006	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Laporan	261.506.000
		07	EAL.007	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	697.320.000
		08	EAL.008	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	239.018.000

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I B. SUMBER DANA



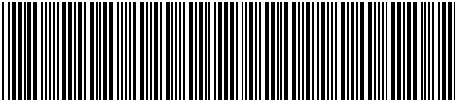
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	261.069.137.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	150.349.850.000		(2) RPLN	US\$	7.583.513	Rp.	110.719.287.000
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	110.719.287.000		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	ASIAN DEVELOPMENT BANK- 3455-INO 1F1NDHGA	USD USD IDR	3.342,81 48.805.040,00	3	48.805.040			
2	1	INTERNATIONAL BANK FOR 8717-ID 1HG72SWA	USD USD IDR	4.240,70 61.914.247,00	3	61.914.247			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3053-6547-1068-4603

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	36.892.062	222.767.075	1.410.000	-	-	261.069.137		
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	60.871.627	-	-	-	60.871.627		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	-	60.871.627	-	-	-	60.871.627		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.353.276	-	-	-	5.353.276	01 . 54	
01	RM	-	5.353.276	-	-	-	5.353.276	139	
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	709.444	-	-	-	709.444	01 . 54	
01	RM	-	709.444	-	-	-	709.444	139	
4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.403.008	-	-	-	1.403.008	01 . 54	
01	RM	-	1.403.008	-	-	-	1.403.008	139	
4976.PEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.204.401	-	-	-	1.204.401	01 . 54	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



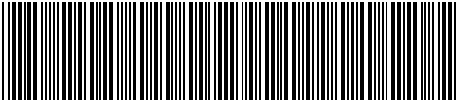
DS:3053-6547-1068-4603

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	1.204.401	-	-	-	1.204.401	139	
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.079.871	-	-	-	7.079.871	01 . 54	
01 RM		-	7.079.871	-	-	-	7.079.871	139	
4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	45.121.627	-	-	-	45.121.627	01 . 54	
02 PLN		-	45.121.627	-	-	-	45.121.627	140	
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	36.892.062	161.895.448	1.410.000	-	-	200.197.510		RK 1HG72SWA
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	36.892.062	34.124.560	1.410.000	-	-	72.426.622		
4194.EAA	Layanan Perkantoran (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	36.892.062	25.802.243	-	-	-	62.694.305	01 . 54	
01 RM		36.892.062	25.802.243	-	-	-	62.694.305	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



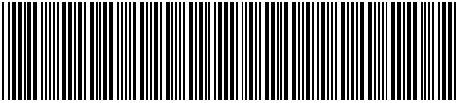
DS:3053-6547-1068-4603

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.221.601	-	-	-	1.221.601	01 . 54	
01 RM		-	1.221.601	-	-	-	1.221.601	139	
4194.EAC	Layanan Umum (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.763.835	-	-	-	2.763.835	01 . 54	
01 RM		-	2.763.835	-	-	-	2.763.835	139	
4194.EAD	Layanan Sarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	01 . 54	
01 RM		-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	139	
4194.EAE	Layanan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	410.000	-	-	410.000	01 . 54	
01 RM		-	-	410.000	-	-	410.000	139	
4194.EAF	Layanan SDM (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	601.373	-	-	-	601.373	01 . 54	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



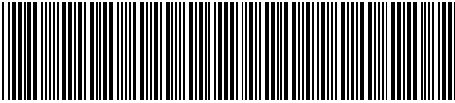
DS:3053-6547-1068-4603

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
 Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	601.373	-	-	-	601.373	139	
4194.EAG	Layanan Hukum (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	950.142	-	-	-	950.142	01 . 54	
01 RM		-	950.142	-	-	-	950.142	139	
4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	783.757	-	-	-	783.757	01 . 54	
01 RM		-	783.757	-	-	-	783.757	139	
4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.183.113	-	-	-	1.183.113	01 . 54	
01 RM		-	1.183.113	-	-	-	1.183.113	139	
4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	818.496	-	-	-	818.496	01 . 54	
01 RM		-	818.496	-	-	-	818.496	139	
4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	-	33.500.917	-	-	-	33.500.917		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



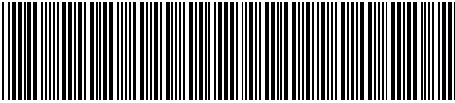
DS:3053-6547-1068-4603

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	24.227.395	-	-	-	24.227.395	01 . 54	RK 1F1NDHGA RK 1HG72SWA
01	RM	-	3.781.966	-	-	-	3.781.966	139	
02	PLN	-	8.818.301	-	-	-	8.818.301	140	
02	PLN	-	11.627.128	-	-	-	11.627.128	140	
4195.AEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.165.492	-	-	-	5.165.492	01 . 54	
02	PLN	-	5.165.492	-	-	-	5.165.492	140	
4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.651.000	-	-	-	1.651.000	01 . 54	
01	RM	-	1.651.000	-	-	-	1.651.000	139	
4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.401.917	-	-	-	1.401.917	01 . 54	
01	RM	-	1.401.917	-	-	-	1.401.917	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3053-6547-1068-4603

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.055.113	-	-	-	1.055.113	01 . 54	RK 1F1NDHGA
01 RM		-	1.055.113	-	-	-	1.055.113	139	
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	94.269.971	-	-	-	94.269.971		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	72.231.345	-	-	-	72.231.345	01 . 54	
01 RM		-	32.244.606	-	-	-	32.244.606	139	
02 PLN		-	39.986.739	-	-	-	39.986.739	140	
4197.AEE	Kemitraan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	12.080.546	-	-	-	12.080.546	01 . 54	
01 RM		-	12.080.546	-	-	-	12.080.546	139	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.463.235	-	-	-	2.463.235	01 . 54	
01 RM		-	2.463.235	-	-	-	2.463.235	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3053-6547-1068-4603

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.494.845	-	-	-	7.494.845	01 . 54	
01 RM		-	7.494.845	-	-	-	7.494.845	139	
JUMLAH		36.892.062	222.767.075	1.410.000	-	-	261.069.137		

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

Kementrian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

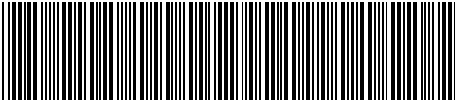
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	396.179	1.388.740	2.295.033	3.193.234	5.612.538	5.996.984	7.851.515	11.714.654	8.321.379	23.674.709	3.593.221	20.231.786	94.269.971

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV A. B L O K I R



DS:3053-6547-1068-4603

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

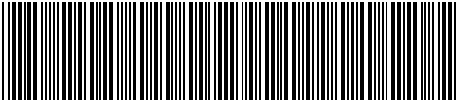
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV B. C A T A T A N



DS:3053-6547-1068-4603

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

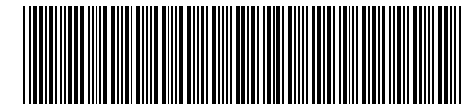
Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

REVISI KE 5



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021**



DS:1365-6650-8508-4200

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

Revisi ke 05

Tanggal : 20 Agustus 2021

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|----------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (033) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2. Unit Organisasi | : | (16) | Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan |
| 3. Provinsi | : | (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : | (631003) | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN |
| Sebesar | : | Rp. | 250.069.137.000 (DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 139.349.850.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBPNBPN TA Berjalan | Rp. | 0 | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 110.719.287.000 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 110.719.287.000 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 139.349.850.000 | 2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH | (140) Rp. | 110.719.287.000 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|

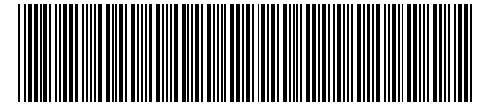
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

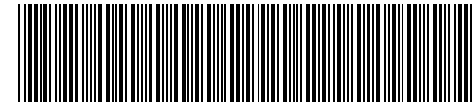


DS:1365-6650-8508-4200

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	191.697.510.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	191.697.510.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	58.371.627.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	58.371.627.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021



DS:1365-6650-8508-4200

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	58.371.627.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	58.371.627.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	191.697.510.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	70.177.235.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	32.743.044.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	88.777.231.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



DS:1365-6650-8508-4200

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			58.371.627.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan			58.371.627.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4976.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	4,00	Rekomendasi Kebijakan	4.813.401.000
Rincian Output	:	01	ABF.001 Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	4,00	Rekomendasi Kebijakan	4.813.401.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4976.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK	602.384.000
Rincian Output	:	01	AFA.001 NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1,00	NSPK	602.384.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4976.EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	2,00	Laporan	1.157.375.000
Rincian Output	:	01	EAL.001 Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	2,00	Laporan	1.157.375.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4976.PEA Koordinasi	1,00	kegiatan	729.558.000
Rincian Output	:	01	PEA.001 Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)	1,00	Kegiatan	729.558.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4976.QAH Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan	5.947.282.000
Rincian Output	:	01	QAH.001 Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1,00	Layanan	2.974.484.000
		02	QAH.002 Fasilitas Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	1,00	Layanan	2.972.798.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



DS:1365-6650-8508-4200

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	6	:	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	1.000,00	Rumah Tangga	45.121.627.000
Rincian Output		:	01	QFC.001 Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	1000.00	Orang	45.121.627.000
Program		:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen			191.697.510.000
Kegiatan		:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			70.177.235.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
			7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP			
			8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4194.EAA	Layanan Perkantoran	3,00	Layanan	61.010.563.000
Rincian Output		:	01	EAA.004 Gaji dan Tunjangan DJPI	1.00	Layanan	35.572.240.000
			02	EAA.005 Operasionalisasi Kantor DJPI	1.00	layanan	20.802.243.000
			03	EAA.006 Opsionalisasi Kantor Direktorat	1.00	1	4.636.080.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	4,00	Layanan	1.221.601.000
Rincian Output		:	01	EAB.001 Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	1.00	laporan	404.142.000
			02	EAB.002 Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I	2.00	laporan	588.077.000
			03	EAB.003 Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI	1.00	laporan	229.382.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 3

Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal						Layanan	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EAC	Layanan Umum	3,00	Layanan	2.198.190.000
Rincian Output		:	01	EAC.002 Tata Kelola TNDE dan Arsip	1,00	laporan	391.362.000
		:	02	EAC.003 Kerumahtanggaan	2,00	laporan	1.806.828.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EAD	Layanan Sarana Internal	2,00	unit	1.000.000.000
Rincian Output		:	01	EAD.003 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	1,00	unit	550.000.000
		:	02	EAD.004 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	1,00	unit	450.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	1,00	unit	410.000.000
Rincian Output		:	01	EAE.001 Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1,00	unit	410.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4194.EAF	Layanan SDM	260,00	orang	601.373.000
Rincian Output		:	01	EAF.001 Pengelolaan Pegawai	260,00	orang	601.373.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4194.EAG	Layanan Hukum	3,00	Layanan	950.142.000
Rincian Output		:	01	EAG.001 Advokasi Hukum	1,00	Layanan	242.118.000
		:	02	EAG.003 Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	2,00	Layanan	708.024.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

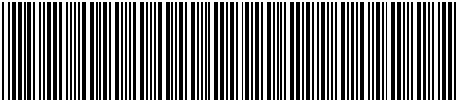


Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	8	:	4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3,00	Layanan	783.757.000
Rincian Output		:	01	EAH.001 Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	1.00	Layanan	100.288.000
		:	02	EAH.002 Manajemen Transformasi Organisasi	2.00	Layanan	683.469.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	3,00	Layanan	1.183.113.000
Rincian Output		:	01	EAI.001 Strategi Komunikasi	1.00	Layanan	583.547.000
		:	02	EAI.002 Publikasi	2.00	Layanan	599.566.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	818.496.000
Rincian Output		:	01	EAL.001 Laporan Keuangan Unit Eselon I	1.00	Laporan	212.437.000
		:	02	EAL.002 Laporan Kinerja Unit Eselon II	1.00	Laporan	140.370.000
		:	03	EAL.003 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	1.00	Laporan	465.689.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			32.743.044.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	11	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	8,00	Rekomendasi Kebijakan	23.902.188.000
Rincian Output		:	01	ABF.001 Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	11.627.128.000
		:	02	ABF.002 Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	10.555.197.000
		:	03	ABF.003 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	1.719.863.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



DS:1365-6650-8508-4200

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 5

Klasifikasi Rincian Output	12	:	4195.AEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	5.165.492.000
Rincian Output	:	01	AEA.001	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Bidang Pembiayaan Perumahan	1.00	Kegiatan	5.165.492.000
Klasifikasi Rincian Output	13	:	4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi	4,00	Layanan	1.510.000.000
Rincian Output	:	01	EAJ.001	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.00	Layanan	1.510.000.000
Klasifikasi Rincian Output	14	:	4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal	3,00	Laporan	1.211.543.000
Rincian Output	:	01	EAK.001	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.00	Laporan	1.211.543.000
Klasifikasi Rincian Output	15	:	4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	953.821.000
Rincian Output	:	01	EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.00	Laporan	953.821.000
Kegiatan	:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				88.777.231.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan				
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air				
		3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman				
		4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan				
Klasifikasi Rincian Output	16	:	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	26,00	Rekomendasi Kebijakan	69.232.074.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.064.103.000
		02	ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.488.774.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

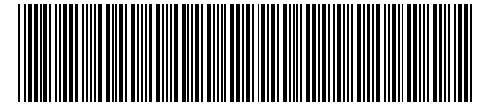


Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 6

Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				Rekomendasi Kebijakan		
	03	ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	4.00	Rekomendasi Kebijakan	5.481.950.000
	04	ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	727.922.000
	05	ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	674.355.000
	06	ABF.006	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.234.631.000
	07	ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	45.928.637.000
	08	ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.135.000.000
	09	ABF.009	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.339.830.000
	10	ABF.010	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.485.820.000
	11	ABF.011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.077.223.000
	12	ABF.012	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.077.220.000
	13	ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	446.350.000
	14	ABF.014	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	922.008.000
	15	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.501.770.000
	16	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	646.481.000
Klasifikasi Rincian Output	17	4197.AEE	Kemitraan	20,00	Kesepakatan	10.737.399.000
Rincian Output	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	1.502.541.000
	02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	13.00	Kesepakatan	3.860.000.000
	03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	3.324.441.000
	04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	1.00	Kesepakatan	2.050.417.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA



DS:1365-6650-8508-4200

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 7

Klasifikasi Rincian Output	18	:	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5,00	NSPK	2.366.602.000
Rincian Output	:	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	NSPK	742.049.000
		02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	781.173.000
		03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	477.313.000
		04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	366.067.000
Klasifikasi Rincian Output	19	:	4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	12,00	Laporan	6.441.156.000
Rincian Output	:	01	EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	824.409.000
		02	EAL.002	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	216.657.000
		03	EAL.003	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3.00	Laporan	3.019.200.000
		04	EAL.004	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Laporan	150.000.000
		05	EAL.005	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Laporan	1.194.260.000
		06	EAL.006	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Laporan	194.095.000
		07	EAL.007	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	634.946.000
		08	EAL.008	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	207.589.000

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021



I B. SUMBER DANA

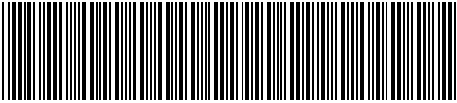
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	250.069.137.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	3.339.387 Rp. 48.755.040.000
1. Rupiah Murni	Rp.	139.349.850.000		(2) RPLN	US\$	4.244.127 Rp. 61.964.247.000
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	110.719.287.000		(2) RHLN	US\$	0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	ASIAN DEVELOPMENT BANK- 3455-INO 1F1NDHGA	USD USD IDR	3.342,81 48.805.040,00	3	48.805.040			
2	1	INTERNATIONAL BANK FOR 8717-ID 1HG72SWA	USD USD IDR	4.240,70 61.914.247,00	3	61.914.247			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:1365-6650-8508-4200

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	35.572.240	213.086.897	1.410.000	-	-	250.069.137		
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	58.371.627	-	-	-	58.371.627		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	-	58.371.627	-	-	-	58.371.627		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	4.813.401	-	-	-	4.813.401	01 . 54	
01	RM	-	4.813.401	-	-	-	4.813.401	139	
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	602.384	-	-	-	602.384	01 . 54	
01	RM	-	602.384	-	-	-	602.384	139	
4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.157.375	-	-	-	1.157.375	01 . 54	
01	RM	-	1.157.375	-	-	-	1.157.375	139	
4976.PEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	729.558	-	-	-	729.558	01 . 54	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



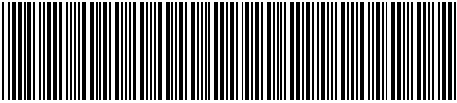
DS:1365-6650-8508-4200

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	729.558	-	-	-	729.558	139	RK 1HG72SWA
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.947.282	-	-	-	5.947.282	01 . 54	
01 RM		-	5.947.282	-	-	-	5.947.282	139	
4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	45.121.627	-	-	-	45.121.627	01 . 54	
02 PLN		-	45.121.627	-	-	-	45.121.627	140	
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	35.572.240	154.715.270	1.410.000	-	-	191.697.510		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	35.572.240	33.194.995	1.410.000	-	-	70.177.235		
4194.EAA	Layanan Perkantoran (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	35.572.240	25.438.323	-	-	-	61.010.563	01 . 54	
01 RM		35.572.240	25.438.323	-	-	-	61.010.563	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



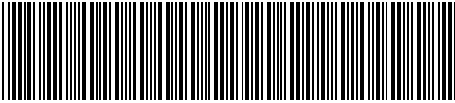
DS:1365-6650-8508-4200

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.221.601	-	-	-	1.221.601	01 . 54	
01 RM		-	1.221.601	-	-	-	1.221.601	139	
4194.EAC	Layanan Umum (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.198.190	-	-	-	2.198.190	01 . 54	
01 RM		-	2.198.190	-	-	-	2.198.190	139	
4194.EAD	Layanan Sarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	01 . 54	
01 RM		-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	139	
4194.EAE	Layanan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	410.000	-	-	410.000	01 . 54	
01 RM		-	-	410.000	-	-	410.000	139	
4194.EAF	Layanan SDM (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	601.373	-	-	-	601.373	01 . 54	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



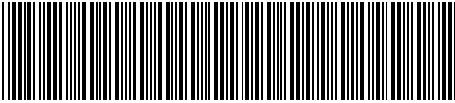
DS:1365-6650-8508-4200

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	601.373	-	-	-	601.373	139	
4194.EAG	Layanan Hukum (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	950.142	-	-	-	950.142	01 . 54	
01 RM		-	950.142	-	-	-	950.142	139	
4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	783.757	-	-	-	783.757	01 . 54	
01 RM		-	783.757	-	-	-	783.757	139	
4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.183.113	-	-	-	1.183.113	01 . 54	
01 RM		-	1.183.113	-	-	-	1.183.113	139	
4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	818.496	-	-	-	818.496	01 . 54	
01 RM		-	818.496	-	-	-	818.496	139	
4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	-	32.743.044	-	-	-	32.743.044		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



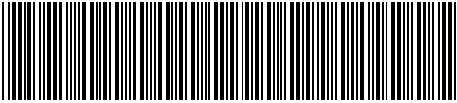
DS:1365-6650-8508-4200

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	23.902.188	-	-	-	23.902.188	01 . 54	RK 1F1NDHGA RK 1HG72SWA
01	RM	-	3.456.759	-	-	-	3.456.759	139	
02	PLN	-	8.818.301	-	-	-	8.818.301	140	
02	PLN	-	11.627.128	-	-	-	11.627.128	140	
4195.AEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.165.492	-	-	-	5.165.492	01 . 54	
02	PLN	-	5.165.492	-	-	-	5.165.492	140	
4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.510.000	-	-	-	1.510.000	01 . 54	
01	RM	-	1.510.000	-	-	-	1.510.000	139	
4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.211.543	-	-	-	1.211.543	01 . 54	RK 1HG72SWA
01	RM	-	1.211.543	-	-	-	1.211.543	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:1365-6650-8508-4200

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	953.821	-	-	-	953.821	01 . 54	RK 1F1NDHGA
01 RM		-	953.821	-	-	-	953.821	139	
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	88.777.231	-	-	-	88.777.231		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	69.232.074	-	-	-	69.232.074	01 . 54	
01 RM		-	29.245.335	-	-	-	29.245.335	139	
02 PLN		-	39.936.739	-	-	-	39.936.739	140	
02 PLN		-	50.000	-	-	-	50.000	140	
4197.AEE	Kemitraan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	10.737.399	-	-	-	10.737.399	01 . 54	
01 RM		-	10.737.399	-	-	-	10.737.399	139	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.366.602	-	-	-	2.366.602	01 . 54	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	2.366.602	-	-	-	2.366.602	139	
4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	6.441.156	-	-	-	6.441.156	01 . 54	
01 RM		-	6.441.156	-	-	-	6.441.156	139	
JUMLAH		35.572.240	213.086.897	1.410.000	-	-	250.069.137		

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

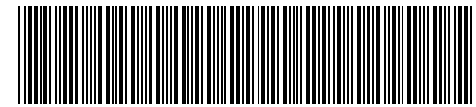
ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

Kementrian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:1365-6650-8508-4200

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

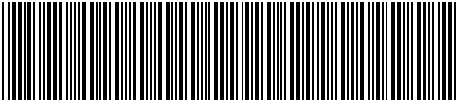
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	342.379	1.272.396	1.947.582	2.859.034	5.048.993	5.437.073	7.097.103	10.882.533	7.450.980	23.260.982	3.159.734	20.018.440	88.777.231

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV A. B L O K I R



DS:1365-6650-8508-4200

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

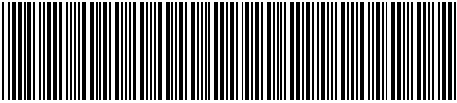
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV B. C A T A T A N



DS:1365-6650-8508-4200

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002



70

60

50

40

30

20

10